

Bagian ini akan menyajikan informasi terkait gambaran umum kondisi Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibagi dalam 4 sub judul yakni : (1) Aspek Geografi dan Demografi, (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (3) Aspek Pelayanan Umum dan (4) Aspek Daya Saing. Penyajian data yang ditampilkan dalam bentuk *time series* dan *cross section*. Adapun data yang ditampilkan maupun data yang diolah kembali merupakan data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik dan Tabel Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

## **2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan serta informasi kependudukan. Penjelasan pada bagian ini terbagi atas informasi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan demografi.

### **2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Karakteristik Lokasi dan wilayah menjelaskan mengenai informasi letak, luas dan batas wilayah. Selain itu, pada bagian ini juga akan paparkan kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi serta penggunaan lahan baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya.

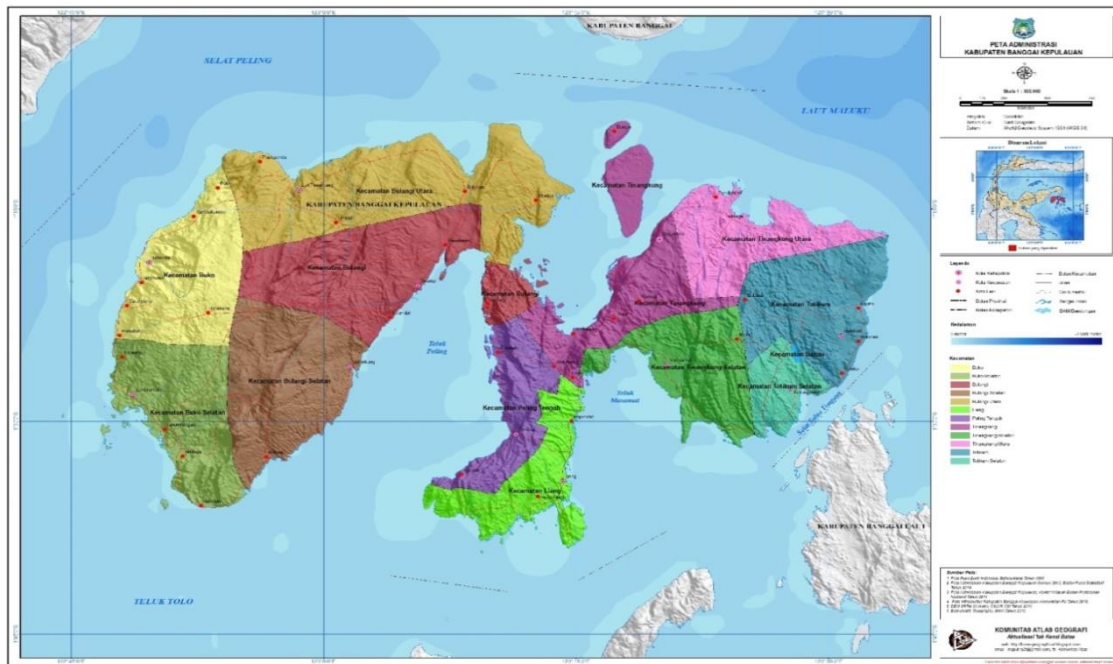
#### **A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan**

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan satu dari duabelas kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah Kabupaten Banggai yang resmi terbentuk menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966).

Secara astronomis, Kabupaten Banggai Kepulauan terletak antara 1° 06" 30" Lintang Selatan sampai dengan 1° 35' 58" Lintang Selatan dan 122° 37' 6,3" Bujur Timur sampai dengan 123° 40' 1,9" Bujur Timur di Pulau Sulawesi. Batas wilayah administrasi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banggai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Laut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku, dan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Peling.



**Gambar 2.1**  
**Peta Wilayah**

Kabupaten Banggai Kepulauan Secara Administrasi memiliki 12 kecamatan yang terbagi menjadi 141 desa, dan 3 kelurahan. Berikut ini Tabel yang menunjukkan jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Desa dan Kelurahan berdasarkan kecamatan**

Kecamatan	Desa	Kelurahan
01. Totikum	11	
02. Totikum Selatan	8	
03. Tinangkung	10	1
04. Tinangkung Selatan	9	
05. Tinangkung Utara	6	
06. Liang	16	
07. Peling Tengah	11	
08. Bulagi	15	1
09. Bulagi Selatan	20	
10. Bulagi Utara	11	1
11. Buko	13	
12. Buko Selatan	11	
<b>Banggai Kepulauan</b>	<b>141</b>	<b>3</b>

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Bulagi Selatan memiliki jumlah desa terbanyak yakni 20 desa, disusul Kecamatan Liang dengan 16 desa dan Kecamatan Bulagi dengan 15 desa dan 1 kelurahan. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri atas daratan dengan luas 2.488,79  $Km^2$  dan lautan dengan luas 6.671,32  $Km^2$ . Berikut ini tabel yang menunjukkan luas wilayah yang terdiri atas luas wilayah darat dan luas wilayah laut menurut kecamatan.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan**

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )			
	Darat	%	Laut	%
01. Totikum	155,45	12,55	1 082,85	87,45
02. Totikum Selatan	95,19	12,55	663,09	87,45
03. Tinangkung	312,60	41,16	446,96	58,84
04. Tinangkung Selatan	187,89	42,79	251,23	57,21
05. Tinangkung Utara	136,65	41,16	195,38	58,84
06. Liang	176,19	25,76	507,78	74,24
07. Peling Tengah	140,00	25,76	403,49	74,24
08. Bulagi	275,66	47,59	303,58	52,41
09. Bulagi Selatan	319,00	47,58	351,45	52,42
10. Bulagi Utara	318,00	47,59	350,21	52,41
11. Buko	184,84	14,96	1 050,60	85,04
12. Buko Selatan	187,32	14,96	1 064,70	85,04
Banggai Kep.	2 488,79	27,17	6 671,32	72,83

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data diolah)

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pada semua kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan area laut. Kecamatan Bulagi Selatan merupakan kecamatan dengan daratan terluas dibanding kecamatan lain. Di lain pihak, Kecamatan Totikum merupakan kecamatan dengan area laut yang paling luas. Adapun ibu kota Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di Kecamatan Tinangkung. Ketinggian daratan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dari permukaan laut yaitu

sebesar 98,61 persen berada kurang dari 500 Mdpl dan 1,39 persen berada pada ketinggian lebih dari 500 Mdpl.

## **B. Topografi**

Berdasarkan tinjauan bentuk muka bumi yang ditunjukkan oleh Topografi atau morfologi, struktur, dan proses pembentukannya, wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dibagi menjadi 4 satuan utama, yaitu: pegunungan/perbukitan struktural, pegunungan/perbukitan karst, perbukitan intrusif, dan dataran rendah.

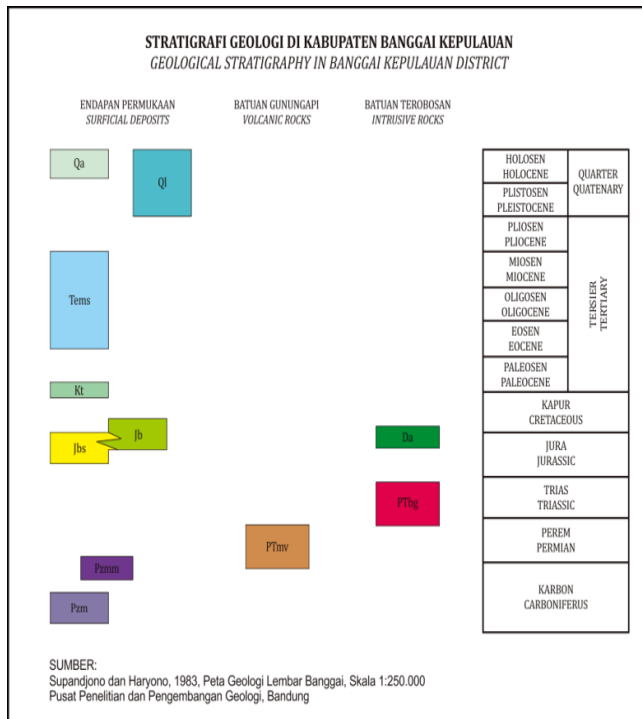
Pegunungan struktural terdapat di bagian barat Pulau Peling, memanjang dengan pola selatan - utara dengan ketinggian lebih dari 700 Mdpl, lereng curam hingga sangat curam dengan kemiringan  $\geq 40$  persen. Morfologi ini terdapat di sekitar perbatasan Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi Selatan, dan Kecamatan Bulagi. Perbukitan struktural terdapat hampir di seluruh pulau, dengan ketinggian mulai  $\pm 200$  hingga  $\pm 700$  meter di atas muka air laut, dengan lereng relatif miring (15-30 persen) hingga berbukit curam (30-40 persen), yang terdapat di Pulau Peling. Puncak-puncak bukit terdapat di Bukit Basasal di Pulau Peling bagian timur.

- (a) Perbukitan dan pegunungan karst menempati sebagian besar Pulau Peling, dan secara lokal-lokal pada pulau-pulau lainnya. Ciri khas morfologi ini adalah pola kerucut dan lembah karst, dolin, gua, ponor, dan sungai bawah tanah. Puncaknya terdapat di Gunung Tinakong (558 meter) dan Bukit Blombong di Pulau Peling.
- (b) Dataran rendah terbentang di sepanjang wilayah pesisir dan lembah-lembah antar perbukitan atau pegunungan, yang sebagian besar dijumpai di bagian utara Pulau Peling, dan sebagian kecil di selatan Pulau Peling.

## **C. Geologi**

Secara geologi regional, akibat sejarah geotektonik yang terjadi, maka batuan yang mengalasi wilayah kajian adalah batuan malihan, granit, dan batuan gunungapi. Batuan tertua berupa Kompleks Batuan Malihan (PZm) yang terdiri atas sekis, gneis, dan kuarsit. Kemudian menyusul Formasi

Menanga (Cmm) yang terbentuk dari perselingan batu gamping hablur, batu pasir malihan, batusabak, dan filit, dengan penarikan radiometri menyatakan berumur Karbon (tidak terdapat di Kabupaten Banggai). Stratigrafi batuan penyusun Kabupaten Banggai Kepulauan disajikan dalam Gambar 2.2.



Era	Periode atau Zaman	Kala	Lama (Juta tahun)	Umur (Juta tahun)	Orogenik
KENOZOIKUM	Kwarter	Holosen	10.000 thn		Cascadian
		Pleistosen	2	2	
	Tersier	Pliosen	3	5	
		Miosen	19	24	
		Oligosen	13	37	
		Eosen	21	58	
MESOZOIKUM	Kretasius		78	144	Laramian
	Jurasik		64	208	Nevadian
	Triasik		37	245	
PALEOZOIKUM	Permian		41	286	Appalachian (Hercynian)
	Karbon	Pennsylvanian	34	320	
		Mississippian	40	360	Acadian
	Devon		48	408	Caledonian
	Silur		30	438	Taconian
PRE KAMBRIUM	Ordo		67	505	
	Kambrium		65	570	
	Pre-Kambrium Akhir		0.3 - 0.4	0.9 - 1.0	Grenville
	Pre-Kambrium Tengah		0.6 - 0.8	1.6 - 1.7	Hudsonian
	Pre-Kambrium Awal		0.7 - 0.9	2.4 - 2.5	Kenoran
			0.9 - 1.0		
			Umur Batuan Tertua		3.6 - 3.8
			Earth Accretion Completed		4.6 - 4.7
			Age of Universe		17 - 18

(Sumber: Supandjono dan Haryono, 1993 dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2012)

**Gambar 2.2.**  
**Stratigrafi Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan**

Di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat 4 (empat) klasifikasi tanah tingkat ordo berdasarkan *Soil Taxonomy* (PPT Bogor, 1998), yaitu: *Entisols*, *Inceptisols*, *Ultisols*, dan *Mollisols*, yang dapat dirinci seperti pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**  
**Klasifikasi Tanah (Soil Taxonomy PPT, 1998) di Kabupaten Banggai Kepulauan**

<b>Ordo</b>	<b>Grup</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Satuan Ekoregion</b>
<b>Entisols Aluvial</b>	Fluvaquents	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stratigrafi lapisan dari bahan-bahan yang berbeda, warna coklat gelap kekelabuan (10YR 4/2), tekstur bervariasi bergantung endapan.</li> <li>▪ pH agak masam hingga netral, BO sedang hingga tinggi, P dan K total rendah hingga sangat tinggi, KTK rendah hingga tinggi, kejenuhan basa sangat tinggi.</li> </ul>	<b>Perbukitan atau Pegunungan (F1)</b>
	Endoaquents	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gleisasi sempurna dari bawah sampai atas.</li> <li>▪ Warna kelabu (5YR 5/1) dengan/tanpa karatan di lapisan atas, tekstur lempung hingga lempung berpasir.</li> <li>▪ Tanah agak alkalis pada daerah genangan, kadar P total sangat tinggi hingga sangat rendah, K total sangat tinggi, KTK dan kejenuhan basa tinggi hingga sangat tinggi.</li> </ul>	<b>Dataran Aluvial Rawa Lembah antar (F2)</b>
	Psammaquents	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warna kelabu agak gelap hingga gelap (5YR 3/1).</li> <li>▪ Struktur berbutir lepas, tekstur kasar (pasir berlempung hingga lebih kasar).</li> </ul>	<b>Dataran Aluvial Pesisir (Fm)</b>
<b>Ultisols Podsolik</b>	Quartzipsamma	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanah sangat asam. BO rendah hingga</li> <li>▪ Tekstur kasar (pasir dengan sedikit kandungan pasir kuarsa), warna coklat gelap (7,5YR 4/3), drainase cepat.</li> </ul>	<b>Wilayah Pesisir Bergisik (M)</b>
	Kandiudults	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horison kandik dengan penurunan lempung &lt;20 persen hingga kedalaman 150 cm, drainase baik.</li> <li>▪ Lapisan atas berwarna coklat gelap (10YR 4/3) sampai coklat gelap kekuningan (10YR 4/6), lapisan bawah coklat kekuningan (10YR 5/6) sampai merah kekuningan (5YR 5/6).</li> <li>▪ Tekstur halus hingga sedang, struktur kersai hingga gumpal agak membulat, konsistensi sangat gembur hingga gembur (lembab) agak lekat sampai lekat (basah).</li> <li>▪ Tanah masam, BO rendah, P dan K total sangat rendah hingga rendah, KTK dan kejenuhan basa rendah hingga sangat rendah, Al sangat tinggi.</li> </ul>	<b>Perbukitan Intrusif Vulkanik Tua (V)</b> <b>Perbukitan Satruktural Patahan Batuan Gunungapi Tua (S1)</b>
<b>Inceptisols</b>	Dystrudepts	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Solum sedang hingga dalam, warna coklat (7,5YR 4/6) sampai coklat kekuningan (10YR</li> </ul>	<b>Perbukitan dan Pegunungan</b>

Ordo	Grup	Karakteristik	Satuan Ekoregion
<b>Kambisol</b>		5/8). <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tekstur halus, struktur gumpal, konsistensi agak teguh hingga teguh, bahan induk batu gamping, batu lempung, dan batu pasir.</li> <li>▪ Tanah masam hingga netral, BO umumnya rendah, K total sangat rendah hingga sedang, P total rendah hingga sangat rendah, KTK rendah, basa rendah, Al tinggi hingga sangat tinggi.</li> </ul>	<b>Struktural Patahan Batuan Malihan dan Batugamping Napal (S2) (dominan)</b>  <b>Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K)</b>
<b>Oxisols Latosol</b>	<b>Kandiu doxs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horison kandik, drainase baik, warna homogen coklat hingga coklat kemerahan dan merah kotor (10YR 3/3-3/4 sampai 2,5YR 3/3-3/4) untuk lapisan, coklat kekuningan hingga coklat tua merah kekuningan (10YR 4/6-5/6 sampai 5YR 4/6-6/6) untuk lapisan bawah.</li> <li>▪ Tekstur lempung berdebu hingga lempung, struktur agak gumpal hingga kersai, konsistensi sangat gembur (lembab) dan lekat hingga plastis (basah).</li> <li>▪ Tanah netral hingga agak basa, BO rendah hingga sedang (atas) dan sangat rendah (bawah), P dan K total sangat rendah, KTK rendah, dan kejenuhan basa tinggi.</li> </ul>	<b>Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu (K) (dominan)</b>  <b>Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan (S2)</b>

Sumber: BP3, Departemen Pertanian RI (2006) dan Hasil Survei Lapangan (Mei-Juni, 2012) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012)

Berdasarkan laporan dari Lembaga Penelitian (LIPI) Geoteknologi Bandung Tahun 2003, secara umum ketersediaan air di Kabupaten Banggai Kepulauan yang dianalisis menggunakan metode Thornwaite, diperoleh hasil bahwa terjadi surplus air pada bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus; Di lain pihak, defisit air terjadi pada bulan-bulan Januari, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya, jika digunakan koefisien *runoff* sebesar 0,5 atau 50 persen, maka menurut neraca meteorologis, jumlah volume air di Pulau Peling mencapai 1.498.816.834 m<sup>3</sup>/tahun (LIPI-Geotek, 2002 dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan, 2012).

#### D. Hidrologi

Jika ditinjau dari ketersediaan air permukaan, di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat beberapa sungai, yang jika ditinjau berdasarkan sifat

pengalirannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (a) sungai *perennial*, sungai yang mengalir sepanjang tahun, yang biasanya bersumber dari mataair berdebit besar dan permanen sepanjang tahun, dan (b) sungai *intermittent*, sungai yang mengalir ketika musim hujan saja. Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula potensi air permukaan berupa danau yang airnya dapat pula dimanfaatkan untuk sesuatu keperluan yang potensial. Tabel 2.4. menyajikan sebaran sungai dan danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan satuan ekoregionnya.

**Tabel 2.4.**  
**Distribusi Sungai dan Danau berdasarkan Satuan Ekoregion di Kabupaten Banggai Kepulauan**

No	Nama Danau dan Sungai	Satuan Ekoregion
1	Danau Alani, Buko Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
2	Danau Tendetung, Totikum Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Karst Batugamping Terumbu
3	Sungai Patukuki, Peling Tengah	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
4	Sungai Malanggong, Buko	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
5	Sungai Kambani, Bulagi Selatan	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Patahan Kelompok Batuan Malihan Sekis, Gneis, dan Batunapal
6	Sungai Manggalai, Tinangkung	Lembah antar Perbukitan atau Pegunungan material Aluvium
7	Sungai Tatakalai, Tinangkung Utara	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium
8	Sungai Babasal, Kombutokan, Totikum	Dataran Aluvial Pesisir material Aluvium

Sumber: Geotek LIPI (2003) dalam KLHS Kabupaten Banggai Kepulauan (2012)

## E. Klimatologi

Pada Tahun 2016 suhu udara rata-rata pada stasiun Meteorologi Bubung berkisar antara 27,2°C sampai 29,3°C. Suhu udara maksimum terjadi di bulan Februari, yaitu sebesar 32,2°C. Di lain pihak, suhu udara minimum terjadi di bulan Juni, yaitu sebesar 24,0°C. Rata-rata kelembaban udara relatif pada Stasiun Meteorologi Bubung pada tahun 2016 berkisar antara 72 persen (September) dan 80 persen (April).

Pada Tahun 2016 tekanan udara rata-rata pada Stasiun Meteorologi Bubung berkisar antara 1.009,4 mb sampai 1.013,1 mb. Tekanan udara maksimum terjadi di bulan Januari. Di lain pihak, tekanan udara minimum terjadi di bulan Desember. Rata-rata kecepatan angin pada Stasiun Meteorologi Bubung pada Tahun 2016 berkisar antara 3 knot dan 4 knot.

Rata-rata jumlah curah hujan di Stasiun Meteorologi Bubung selama Tahun 2016 berkisar antara 15,1 mm<sup>3</sup> (September) dan 284,0 mm<sup>3</sup> (Maret). Di lain pihak, jumlah hari per bulan selama Tahun 2016 berkisar antara 8 hari (Agustus) dan 21 hari (Maret).

**Tabel 2.5.**  
**Rata-rata Parameter Cuaca pada Stasiun Meteorologi**  
**Bubung menurut Bulan**

No	Bulan	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Tekanan Udara (mb)	Kecepatan Angin (knot)
1	Januari	29,20	75	1.013,10	4
2	Pebruari	29,0	76	1.012,30	4
3	Maret	29,0	79	1.012,7	3
4	April	28,5	80	1.012,00	4
5	Mei	29,20	76	1.011,50	4
6	Juni	28,10	76	1.012,20	4
7	Juli	27,20	77	1.012,10	4
8	Agustus	27,50	78	1.012,40	4
9	September	28,6	72	1.011,90	3
10	Oktober	28,5	73	1.011,40	3
11	Nopember	29,30	74	1.010,60	3
12	Desember	29,10	76	1.009,40	3

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017

## **F. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004 yang terbesar adalah hutan. Perkembangan penggunaan lahan sawah rata yang masih kurang, sebagian penduduk bertani secara berpindah sehingga pertaniannya masih belum maksimal, serta kurangnya peningkatan kualitas pada sektor pangan.

Pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan diklasifikasikan dalam 3 kegiatan utama yaitu Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Tertentu. Kriteria Penetapan Kawasan-kawasan tersebut mengacu pada Keppres Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Kawasan Lindung dan Keppres Nomor 57 Tahun 1990 Tentang Kawasan Budidaya.

### **1. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036, kawasan Lindung terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Kawasan Hutan Lindung dengan luas kurang lebih 26.739 Ha terdapat di beberapa kecamatan berikut ini :

- a. Kecamatan Tinangkung, dengan luasan kurang lebih 2.025,920 Ha;
- b. Kecamatan Tinangkung Utara, dengan luasan kurang lebih 248,190 Ha;
- c. Kecamatan Bulagi, dengan luasan kurang lebih 8.318,105 Ha;
- d. Kecamatan Bulagi Utara, dengan luasan kurang lebih 810,621 Ha;
- e. Kecamatan Bulagi Selatan, dengan luasan kurang lebih 14.487,200 Ha;
- f. Kecamatan Peling Tengah, dengan luasan kurang lebih 852,564 Ha;
- g. Kecamatan Totikum Selatan, dengan luasan kurang lebih 200,655 Ha;
- h. Kecamatan Buko Selatan, dengan luasan kurang lebih 40,690 Ha.

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas kawasan resapan air yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan luasan 237.842 Ha.

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air; dan Kawasan ruang terbuka hijau.

Kawasan sempadan pantai terdapat di seluruh pulau di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan panjang pantai kurang lebih 789,58 km. Kawasan sempadan sungai meliputi:

- a. Sungai Paisu Bebek dan Sungai Balayon di Pulau Peling Kecamatan Liang;
- b. Sungai Ndudukan, Sungai Lomou, Sungai Tutung, Sungai Palam di Pulau Peling Kecamatan Totikum;
- c. Sungai Tobing, Sungai Tobungin, Sungai Nipah, Sungai Mandoni, Sungai Manggalai, Sungai Ambelang, Sungai Luksagu, Sungai Tatalalai di Pulau Peling Kecamatan Tinangkung.

Kawasan sekitar danau terletak di sekitar :

- a. Danau Tendetung dan Danau Ndudukan di Pulau Peling Kecamatan Totikum;
- b. Danau Alani di Pulau Peling Kecamatan Buko;
- c. Danau Kuakon di Pulau Peling Kecamatan Tinangkung; dan
- d. Danau Emeluk di Pulau Peling Kecamatan Bulagi Selatan;

Berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung ditetapkan kawasan lindung sekitar danau sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi. Danau yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat di Kecamatan Totikum yakni Danau Tendetung dan Danau Ndudukan, serta di Kecamatan Buko yakni Danau Alani.

Kawasan mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling danau, hulu sungai serta tebing-tebing sungai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian mata air yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air. Mata air di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat pada hulu sungai serta tebing sungai, tetapi debit airnya tidak cukup besar, sehingga untuk mengetahui kontinuitas dan

besaran debit mata air perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena kebutuhan air dengan jumlah dan kualitas yang baik sangat diperlukan guna menunjang kegiatan rumah tangga, industri serta kegiatan di masa mendatang sehingga perlu dijaga dan dilestarikan. Kawasan sekitar mata air meliputi mata air di Pulau Peling terdiri atas Paisu Sinangkal, Lalanday, Bangunemo, Manggalai, Lukpanenteng.

Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang ditetapkan di kawasan lapangan monumen Trikora di Kota Salakan. Kawasan Rawan Bencana Alam, tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang meliputi: kawasan rawan gempa bumi, rawan tsunami, dan rawan tanah longsor. Kawasan ruang terbuka hijau meliputi kawasan Kota Salakan dan wilayah perkotaan di seluruh kabupaten Banggai Kepulauan.

## **2. Kawasan Budidaya**

Kawasan Budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya pada hakekatnya adalah tempat di mana suatu wilayah dapat mengolah ruang sedemikian rupa menjadi peruntukan-peruntukan tersendiri sehingga dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan dan memberikan kemakmuran kepada penduduknya namun tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berbagai macam kawasan budidaya di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak akan dideskripsikan secara mendetail, hanya akan dijabarkan beberapa kawasan saja yang terkait erat dengan potensinya sebagai tolok ukur penting untuk pembangunan, namun juga memiliki potensi untuk merusak kestabilan kondisi lingkungan apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan matang. RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 mencatat Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan pantai berhutan bakau kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

**Tabel 2.6.**  
**Sebaran Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Ha)</b>	<b>Konservasi Laut (Ha)</b>	<b>Kawasan Cagar Budaya</b>
Tinangkung	153,37		Monumen Trikora Bonua Lua Benteng Bebengetan
Tinangkung Selatan	439,71		
Tinangkung Utara	17,22		Rumah Satu Tiang Luksagu
Liang	65,55	32.359,35	
Peling Tengah	125,2		
Bulagi	42,35		Makam Raja Dally, Makam Raja Boas, keramat Kombolon, Mustika Putih
Bulagi Utara	432,82		Batu Masigi, Batu Duangan
Bulagi Selatan	3,98	58.092,62	Tengkorak Manusia Zaman Dulu Desa Osan, Makam Lipuadino (Penyebar Islam), Peta Alam Desa Lolantang, Pusat Pembuatan Periuk
Buko	76,08		
Buko Selatan	226,06		Sanggar Batu Mesea

Sumber: Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan (2016-2036)

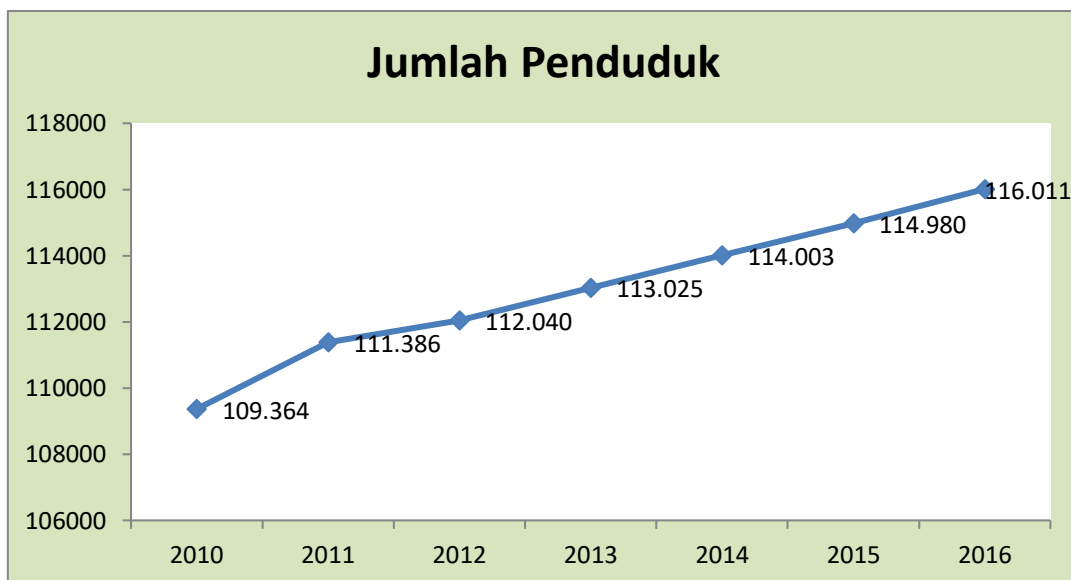
### **2.1.2 Demografi**

Bagian ini akan memaparkan kondisi kependudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Penjelasan terkait demografi Kabupaten Banggai

Kepulauan dibagi menjadi beberapa bagian yakni jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, serta kepadatan penduduk dan rasio jenis kelamin.

### 2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

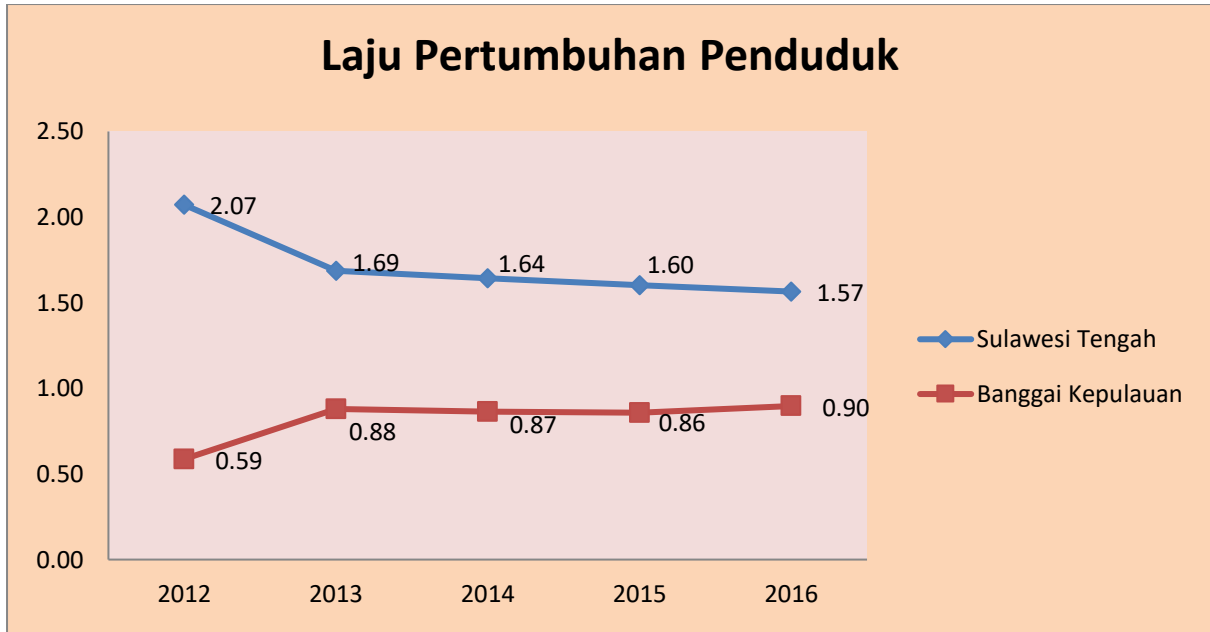
Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada Tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 109.364 jiwa. Terjadi peningkatan drastis di Tahun 2011 sebesar 111.386 jiwa. Jumlah ini meningkat pada Tahun 2016 mencapai 116.011 jiwa.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data diolah)

**Gambar 2.3**  
**Jumlah Penduduk**

Gambar di atas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk juga disebabkan oleh faktor angka harapan hidup yang terus meningkat tiap tahunnya. Adapun gambaran perkembangan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data diolah)

**Gambar 2.4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk**

Gambar 2.3 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan penduduk meningkat dari 0,59 persen di Tahun 2012 menjadi 0,88 persen di Tahun 2013. Pada Tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk mengalami sedikit peningkatan yakni 0,90 persen. Angka ini berada di bawah angka laju pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah yakni sebesar 1,57 persen pada Tahun 2016.

**2.1.2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk**

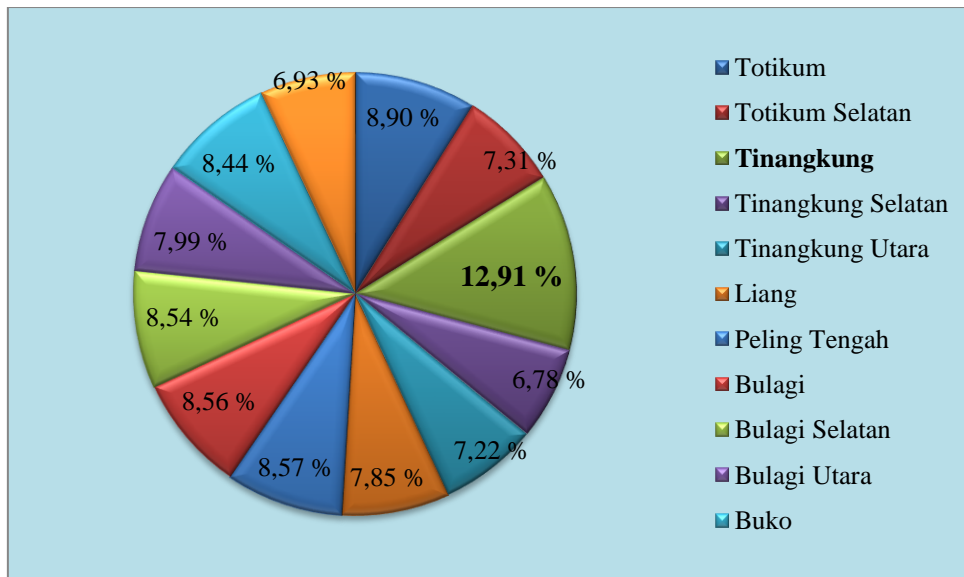
Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 sebagian besar berasal dari Kecamatan Tinangkung yakni 13 persen dari total penduduk. Selain Kecamatan Tinangkung, sebaran penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung merata di semua kecamatan. Berikut ini Tabel yang menunjukkan persebaran penduduk menurut kecamatan.

**Tabel 2.7**  
**Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	2016		
		L	P	Total
1	Totikum	5.281	5.046	10.327
2	Totikum Selatan	4.262	4.220	8.482
3	Tinangkung	7.499	7.481	14.980
4	Tinangkung Selatan	3.998	3.865	7.863
5	Tinangkung Utara	4.205	4.174	8.379
6	Liang	4.589	4.516	9.105
7	Peling Tengah	4.994	4.949	9.943
8	Bulagi	5.016	4.912	9.928
9	Bulagi Selatan	5.079	4.828	9.907
10	Bulagi Utara	4.760	4.508	9.268
11	Buko	4.904	4.883	9.787
12	Buko Selatan	4.019	4.023	8.042
<b>Jumlah</b>		<b>58.606</b>	<b>57.405</b>	<b>116.011</b>

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data diolah)

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan berjumlah 116.011 jiwa. Jumlah ini tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun Kecamatan Tinangkung memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 14.980 jiwa dan Kecamatan Tinangkung Selatan memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni berjumlah 7.863 jiwa. Gambar berikut ini menunjukkan sebaran penduduk menurut kecamatan dalam bentuk persentasi jumlah penduduk.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (data diolah)

**Gambar 2.5**  
**Sebaran Penduduk**

Gambar 2.5 menunjukkan bahwa sebanyak 12,91 persen penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan tinggal di Kecamatan Tinangkung. Di lain pihak, jumlah penduduk di Kecamatan Tinakung Selatan memiliki persentasi yang paling kecil yakni 6,78 persen.

### 2.1.2.3 Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kepadatan penduduk secara menyeluruh di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 46 orang per km<sup>2</sup>. Namun bila ditinjau berdasarkan kecamatan, wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Totikum Selatan dengan Kepadatan penduduk 89 orang per km<sup>2</sup>. Meski sebaran jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Tinangkung sebagai Ibu Kota Kabupaten, namun Kecamatan Totikum Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kecamatan Totikum Selatan. Hal ini dikarenakan daerah dengan luas wilayah yang paling kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut yakni hanya sebesar 95,19 km<sup>2</sup> memiliki penduduk yang berjumlah 8.482 jiwa. Berikut tabel yang menunjukkan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

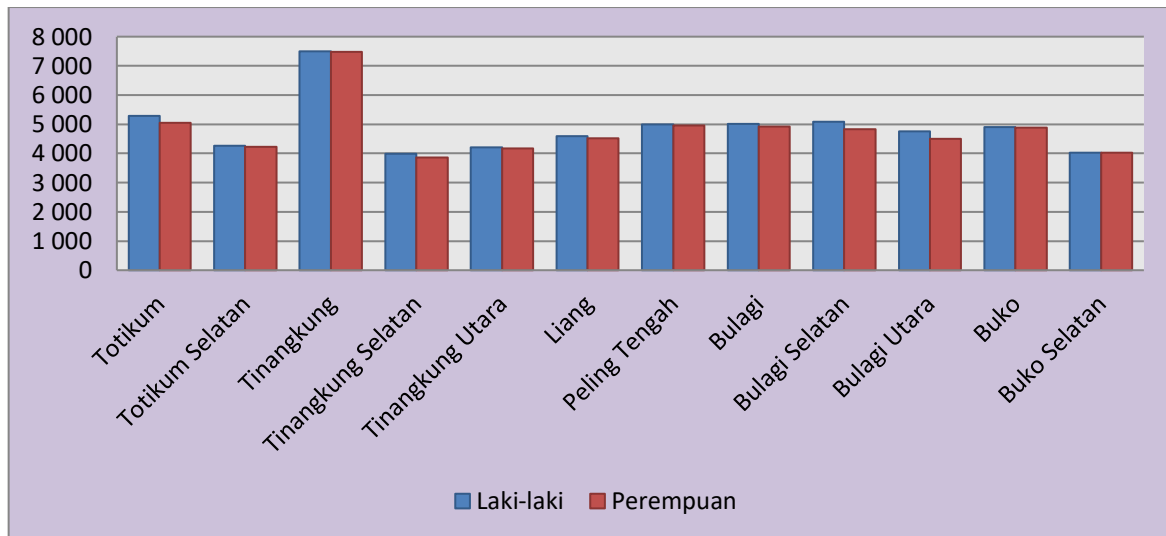
**Tabel. 2.8**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016**

Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk
	km <sup>2</sup>	%	Orang	%	(orang/km <sup>2</sup> )
01. Totikum	155,45	6,25	10.327	8,90	66,43
02. Totikum Selatan	95,19	3,82	8.482	7,31	89,11
03. Tinangkung	312,6	12,56	14.980	12,91	47,92
04. Tinangkung Selatan	187,89	7,55	7.863	6,78	41,85
05. Tinangkung Utara	136,65	5,49	8.379	7,22	61,32
06. Liang	176,19	7,08	9.105	7,85	51,68
07. Peling Tengah	140	5,63	9.943	8,57	71,02
08. Bulagi	275,66	11,08	9.928	8,56	36,02
09. Bulagi Selatan	319	12,82	9.907	8,54	31,06
10. Bulagi Utara	318	12,78	9.268	7,99	29,14
11. Buko	184,84	7,43	9.787	8,44	52,95
12. Buko Selatan	187,32	7,53	8.042	6,93	42,93
<b>Banggai Kepulauan</b>	<b>2488,79</b>	<b>100,00</b>	<b>116.011</b>	<b>100,00</b>	<b>46,61</b>

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017

Tabel 2.8 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan menurut kecamatan. Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Totikum Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni 89 orang pada setiap 1 kilometer persegi. Di lain pihak, Kecamatan Bulagi Utara merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah yakni 29 orang pada setiap 1 kilometer persegi.

Selain tingkat kepadatan penduduk, setiap proses perencanaan membutuhkan data kependudukan berdasarkan jenis kelamin. Hal ini bertujuan untuk terakomodirnya kebutuhan dasar baik laki-laki maupun perempuan serta pencapaian target pada program-program pemerintah bagi laki-laki dan perempuan. Berikut ini gambaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelami menurut kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka (2017)

**Gambar 2.6**  
**Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di semua kecamatan memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan (lihat Tabel 2.7). Hasil perhitungan menunjukkan rasio jenis kelamin Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 102. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Pada Tahun 2016, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar sudah di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Banggai Kepulauan lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Geologi Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di sepanjang zona tumbukan antara lempeng mikro kontinen Banggai – Sula dengan jalan ofiolit Sulawesi Timur. Tumbukan antara lempeng tersebut merupakan fenomena tektonik yang dicirikan dengan pergerakan sistem sesar sorong yang bergerak ke arah barat dan bersifat mendatar.

Distribusi pusat gempa dangkal dan gempa sedang terkonsentrasi di sekitar utara Pulau Peling, yang lainnya terdapat disebelah selatan dan

kepulauan Taliabu. Pusat gempa dengan kedalaman 26 Km dibawah permukaan laut yang terletak di Pulau Peling yang menyebabkan tsunami dengan ketinggian gelombang 10 sampai 15 meter yang mengakibatkan rusaknya rumah-rumah penduduk pada sekitar pesisir Pulau Peling. Kondisi ini dikarenakan letak diantara sesar Sorong Utara dan sesar Sorong Selatan, maka kawasan pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan, terutama pada pesisir pantai sebelah utara dan timur pulau Peling sangat rawan terjadi gelombang tsunami.

#### **2.1.4 Potensi Pengembangan Sumber Daya**

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan rencana pengaturan struktur pengembangan ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan secara terpadu dengan tetap memperhatikan keterkaitan wilayah, keserasian pertumbuhan serta perkembangan wilayah kabupaten dalam lingkup regional. Pengembangan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan pada dasarnya diarahkan untuk menyebarkan kegiatan di seluruh wilayah sesuai dengan fungsi dan peran yang dimiliki setiap wilayah, baik secara regional maupun internal.

Kota Salakan merupakan daerah yang berpotensi dikembangkan sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi maupun pemerintahan. Pada kota ini, Kabupaten Banggai Kepulauan menumpukan pelayanan-pelayanan terhadap keseluruhan wilayah. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, sistem perkotaan sebagai pusat pelayanan telah ditetapkan di berbagai wilayah ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk melayani kegiatan seluruh wilayah kabupaten, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan atau sub wilayah, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) untuk melayani kegiatan skala kecamatan saja. Kegiatan pada masing-masing pusat pelayanan tersebut membutuhkan jaringan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Bagian ini menjelaskan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

### **2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)**

Pendapatan Regional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perkembangan PDRB, struktur perekonomian, pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Data yang diperoleh menunjukkan beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan. Lapangan usaha tersebut yakni Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada Tahun 2016, 48,96 persen PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Banggai Kepulauan berasal dari kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan dan sebesar 19,54 persen berasal dari kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan distribusi PDRB (Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010) Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Tabel 2.9**  
**Perkembangan Distribusi PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan (%)**

PDRB Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,93	50,47	50,78	50,05	50,45	49,62	50,05	49,31	49,50	48,96
B. Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,77	0,82	0,78	0,85	0,80	0,89	0,82	0,91	0,85
C. Industri Pengolahan	2,50	2,57	2,49	2,56	2,51	2,56	2,52	2,54	2,55	2,54
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F. Konstruksi	2,27	2,11	2,35	2,11	2,44	2,13	2,50	2,15	2,44	2,07
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,87	18,96	19,04	19,30	19,11	19,49	19,10	19,53	19,12	19,54
H. Transportasi dan Pergudangan	3,07	3,15	3,13	3,17	3,14	3,18	3,13	3,18	3,16	3,20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,41	0,44	0,41	0,45	0,41	0,46	0,41	0,47	0,40	0,47
J. Informasi dan Komunikasi	3,04	2,99	2,99	3,05	2,99	3,13	3,00	3,22	3,00	3,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,78	1,78	1,85	1,77	1,77	1,70	1,83	1,70	2,07	1,92
L. Real Estate	1,96	2,07	1,92	2,07	1,87	2,07	1,82	2,06	1,76	2,02
M,N. Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,09	0,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,08	5,21	5,02	5,22	5,16	5,34	5,30	5,41	5,42	5,43
P. Jasa Pendidikan	5,58	5,70	5,56	5,70	5,58	5,72	5,63	5,74	5,69	5,73
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,12	2,15	2,12	2,16	2,20	2,21	2,26	2,26	2,35	2,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,38	1,41	1,32	1,37	1,32	1,37	1,37	1,39	1,41	1,41

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data Diolah)

Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan produksi dan harga jual beberapa komoditi sub sektor perkebunan menurun. Kontribusi sektor lain terhadap PDRB cenderung meningkat namun dalam jumlah yang kecil. Oleh karena itu, perlu intervensi pemerintah guna meningkatkan produksi

di berbagai sektor lapangan usaha guna meningkatkan PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (Seri 2010) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 adalah sebesar 6,40 persen. Kondisi ini mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,66 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 20,13 persen, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 9,57 persen, dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,39 persen. Berikut ini tabel yang menggambarkan laju pertumbuhan PDRB selama periode 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 2.10**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 (%)**

PDRB Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,31	7,23	11,17	6,30	10,82	6,09	9,16	5,99	8,47	5,64
B. Pertambangan dan Penggalian	17,84	9,66	14,23	9,37	15,11	9,47	15,15	9,43	12,13	9,39
C. Industri Pengolahan	10,74	6,75	11,16	6,68	12,14	6,80	10,37	5,90	11,24	6,42
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,00	9,52	12,99	13,04	15,71	14,62	1,66	16,44	9,12	6,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,23	6,46	10,13	5,77	11,32	5,92	10,89	5,85	11,09	5,74
F. Konstruksi	21,12	10,46	15,37	7,48	15,85	7,72	12,43	7,81	7,36	2,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,42	9,87	12,48	9,13	11,99	8,09	9,95	6,84	9,80	6,46
H. Transportasi dan Pergudangan	9,73	6,71	13,87	7,86	11,81	7,18	9,73	6,71	10,57	7,26
I. Penyediaan Akomodasi dan	11,02	8,93	10,61	8,84	11,59	9,59	11,11	9,40	6,37	5,84

PDRB Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015		2016	
	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
Makan Minum										
J. Informasi dan Komunikasi	13,88	9,22	9,58	9,25	11,57	9,95	10,30	9,58	9,89	9,57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	16,97	11,16	15,76	6,38	7,07	2,73	13,54	6,71	24,05	20,13
L. Real Estate	10,32	7,40	9,04	7,20	8,98	6,73	6,59	6,13	6,43	4,67
M,N. Jasa Perusahaan	10,55	6,77	10,87	9,49	10,48	8,77	10,56	9,18	10,66	9,25
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10,10	7,69	10,19	7,48	14,68	9,47	12,98	7,96	12,25	6,79
P. Jasa Pendidikan	11,25	6,62	11,02	7,34	11,99	7,28	10,94	7,16	10,84	6,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,69	6,87	11,45	7,63	15,82	9,45	13,35	9,17	13,79	9,10
R,S,T,U. Jasa Lainnya	12,24	7,53	6,87	4,03	11,50	7,65	13,97	7,70	13,51	7,88
Produk Domestik Regional Bruto	13,21	7,90	11,50	7,18	11,56	7,02	10,02	6,66	9,68	6,40

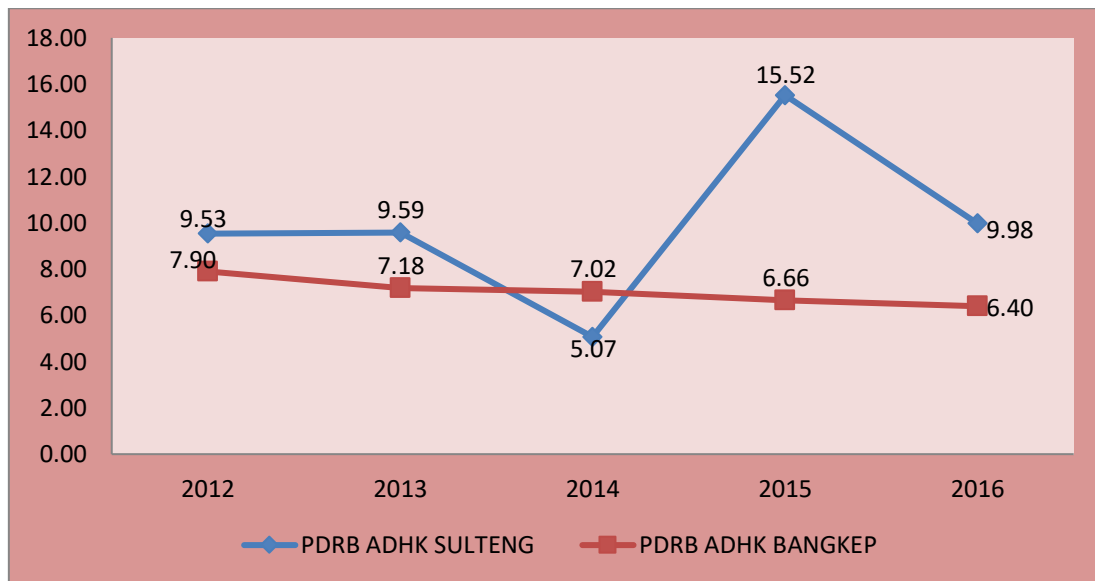
Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data Diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten terus menurun dari 7,90 persen pada Tahun 2012 masing-masing menjadi 7,18 persen; 7,02 persen; 6,66 persen; dan 6,40 persen untuk Tahun 2013; 2014; 2015; dan 2016. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor penunjang PDRB yakni sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus mengalami perlambatan. Di sisi lain, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor Jasa Perusahaan serta sektor Jasa Lainnya mengalami peningkatan laju pertumbuhan.

Beberapa sektor seperti konstruksi, sektor Pengadaan Air, sektor informasi dan komunikasi, sektor Penyediaan akomodasi dan sebagainya perlu ditingkatkan mengingat kontribusi sektor-sektor ini tidak berkembang

selama 5 tahun terakhir. Selain itu pula, laju pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tersebut berfluktuasi bahkan mengalami penurunan.

Data BPS Tahun 2016 juga menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 6,40 persen berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi yakni 9,98 persen. Berikut ini gambaran perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun terakhir.

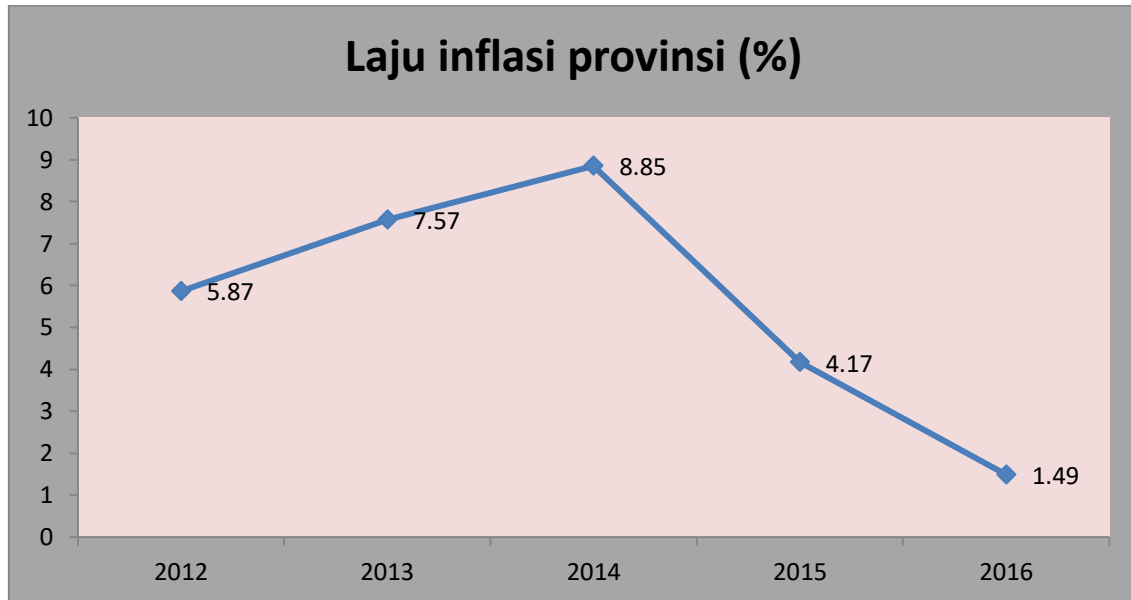


**Gambar 2.7**  
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010**

Gambar 2.7 memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai Kepulauan yang melambat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2011 laju pertumbuhan berada pada angka 8,16 persen. Angka tersebut terus merosot perlahan hingga Tahun 2016 berada di angka 6,40 persen yakni di bawah laju pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9,98 persen. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan melambat untuk sektor pertanian dan sektor perdagangan sebagai sektor yang memiliki kontribusi tertinggi bagi PDRB. Meskipun jumlah PDRB terus meningkat setiap tahunnya, namun laju pertumbuhan PDRB kabupaten Banggai Kepulauan melambat. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan program-program yang memacu produktivitas di berbagai sektor lapangan usaha khususnya sektor jasa yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

### 2.2.2 Laju Inflasi

Perhitungan inflasi dilakukan berdasarkan indeks harga ibu kota provinsi. Adapun perkembangan laju inflasi Kota Palu digambarkan sebagai berikut.

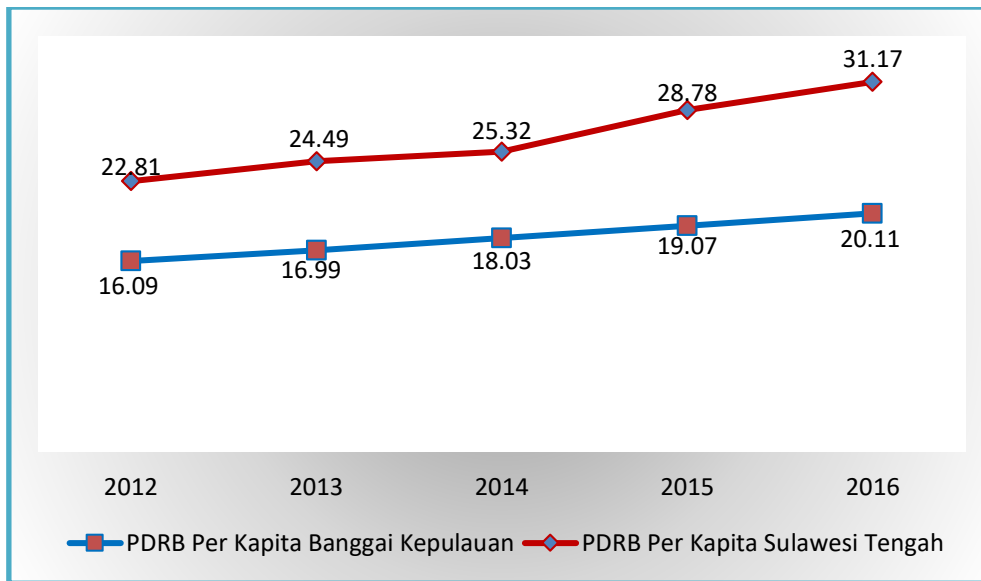


**Gambar 2.8**  
**Laju Inflasi Provinsi Sulawesi Tengah**

Perkembangan inflasi tersebut secara tidak langsung juga dapat menjadi gambaran perkembangan inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan. Gambar di atas menunjukkan *trend* peningkatan inflasi tahunan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014. Namun inflasi kemudian melambat di Tahun 2015 dan Tahun 2016, yang menunjukkan adanya kestabilan harga.

### 2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk di suatu wilayah tertentu. PDRB perkapita diperoleh dari jumlah PDRB tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Gambar berikut ini menunjukkan jumlah PDRB perkapita penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan dan PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah.



**Gambar 2.9**  
**PDRB Perkapita Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)**

Gambar 2.9 menunjukkan PDRB perkapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Adapun jumlah PDRB perkapita Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2012 tercatat 16.09 juta rupiah pertahun. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga di Tahun 2016 mencapai 20,11 Juta Rupiah per tahun. Meski demikian, peningkatan kinerja di setiap sektor lapangan usaha perlu ditingkatkan guna memacu peningkatan PDRB perkapita Kabupaten Banggai Kepulauan yang masih berada di bawah PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Tengah yang juga terus meningkat dari angka 21,18 Juta Rupiah pada Tahun 2011 meningkat mencapai angka 31,17 Juta Rupiah pada Tahun 2016. *Trend* pada gambar 2.9 menunjukkan bahwa dari Tahun 2012 ke 2014 selisih antara PDRB per kapita Kabupaten Banggai Kepulauan mengecil, namun dari Tahun 2014 ke 2016, selisih tersebut menjadi melebar. Hal ini dibuktikan oleh rasio PDRB per kapita Banggai Kepulauan terhadap PDRB Sulawesi Tengah yaitu 0,7053 (2012); 0,6938 (2013); 0,7121 (2014); 0,6626 (2015); dan 0,6452 (2016).

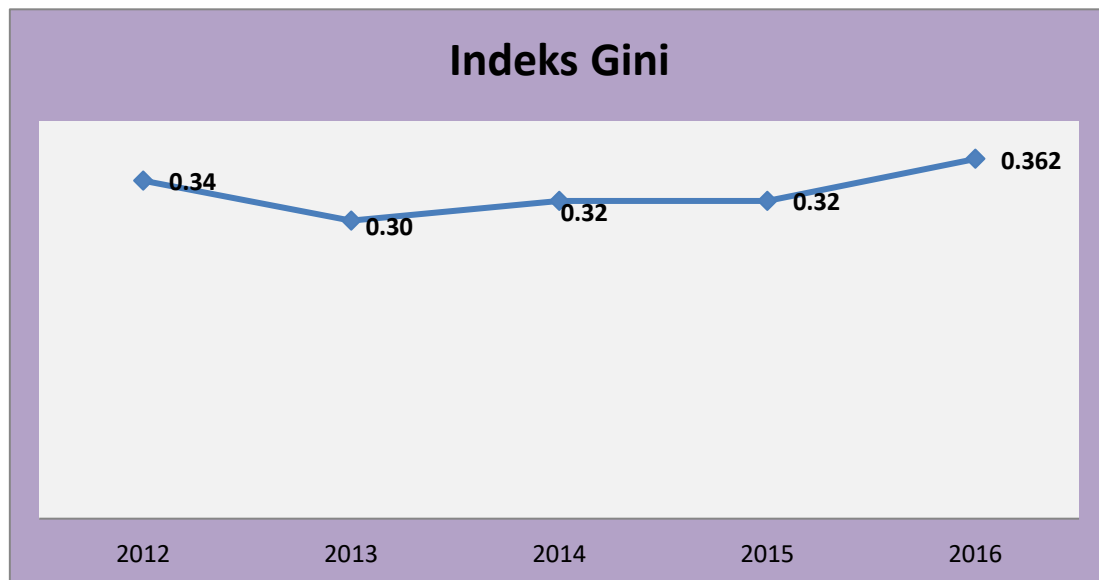
#### 2.2.4 Indeks Gini

Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi

yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, dengan makna :

- ♦  $G < 0,3$  = ketimpangan rendah
- ♦  $0,3 \leq G \leq 0,5$  = ketimpangan sedang
- ♦  $G > 0,5$  = ketimpangan tinggi

Adapun gambaran indeks gini selama lima tahun terakhir ditunjukkan pada gambar berikut ini



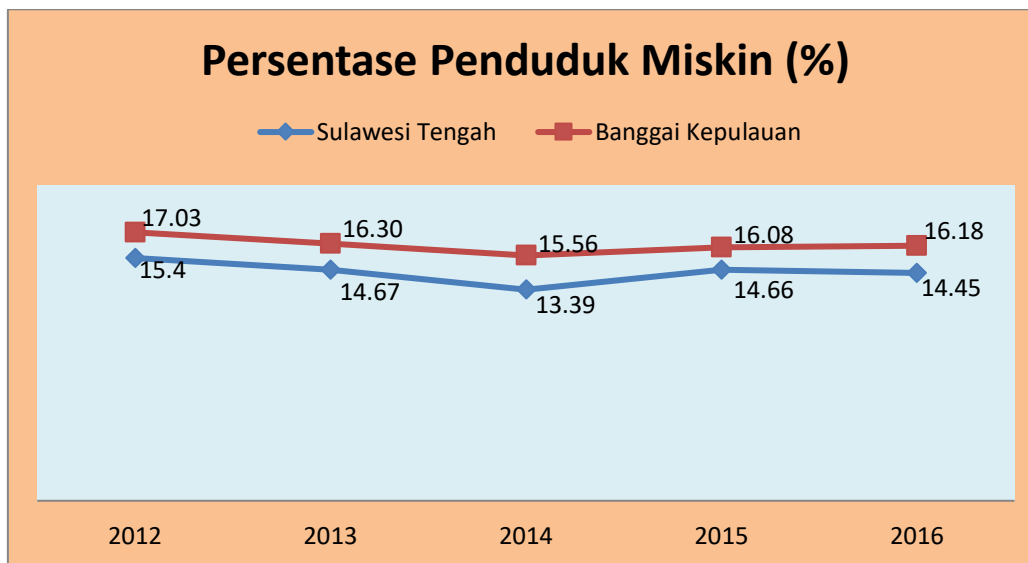
**Gambar 2.10**  
**Perkembangan Indeks Gini**

Gambar 2.10 menunjukkan perkembangan kesenjangan pemerataan pendapatan yang berfluktuasi. Indeks Gini yang berada pada kisaran lebih dari 0,30 memiliki makna bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada posisi ketimpangan sedang. Oleh karena itu, perlu peran pemerintah untuk menndistribusikan pembangunan sehingga dapat menekan ketimpangan pendapatan di kelompok masyarakat.

### **2.2.5 Tingkat Kemiskinan**

Jumlah penduduk miskin diukur berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 adalah sebesar Rp230.688,- per bulan

meningkat menjadi Rp290.742,- per bulan pada Tahun 2016. Perkembangan persentasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung berfluktuasi sepanjang tahun. Namun jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen, dari jumlah 18.570 jiwa di Tahun 2015 meningkat menjadi 18.720 jiwa di Tahun 2016. Secara umum, persentase jumlah penduduk miskin menurun yakni sebesar 15,40 persen di Tahun 2012, turun menjadi 14,45 persen di Tahun 2016. Berikut ini gambar yang menunjukkan pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

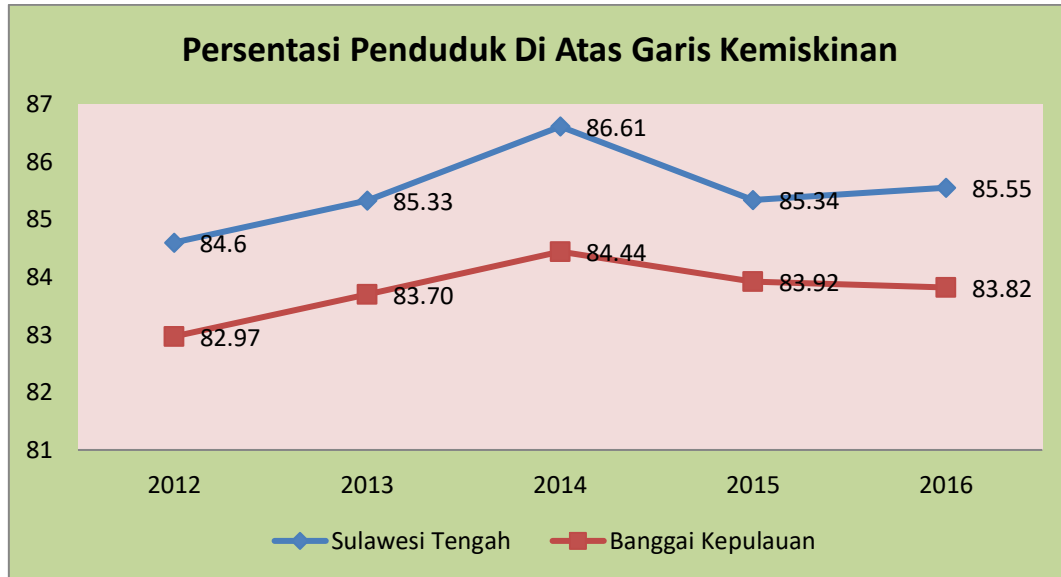


**Gambar 2.11**  
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan**

Gambar 2.11 menunjukkan persentase kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang berfluktuasi. Selain itu, gambar di atas juga menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 16,18 persen, masih lebih tinggi bila dibandingkan persentase kemiskinan provinsi yakni 14,45 persen. Bila ditinjau berdasarkan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sasaran penduduk miskin Negara Indonesia pada Tahun 2019 menurun menjadi 7-8 persen. Hal ini dapat dicapai bila mana seluruh daerah konsisten dalam melaksanakan program-program penanggulangan

kemiskinan dengan bersinergi bersama PERANGKAT DAERAH terkait lainnya.

Dengan demikian, dapat diketahui persentasi penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.12**  
**Persentasi Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)**

Gambar 2.12 menampilkan persentase jumlah penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan pergerakan positif yakni dari Tahun 2012, persentase jumlah penduduk di atas garis kemiskinan sebesar 82,97 persen meningkat menjadi sebesar 83,82 pada Tahun 2016. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa taraf hidup sebanyak 83,86 persen penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan telah berada diatas garis kemiskinan. Meski demikian, angka ini masih berada di bawah angka Provinsi. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dan intervensi pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan.

Penghapusan kemiskinan merupakan tujuan pertama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi arah pembangunan bagi negara-negara di dunia guna tercapainya kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun upaya menekan bahkan menghapus angka kemiskinan perlu menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan

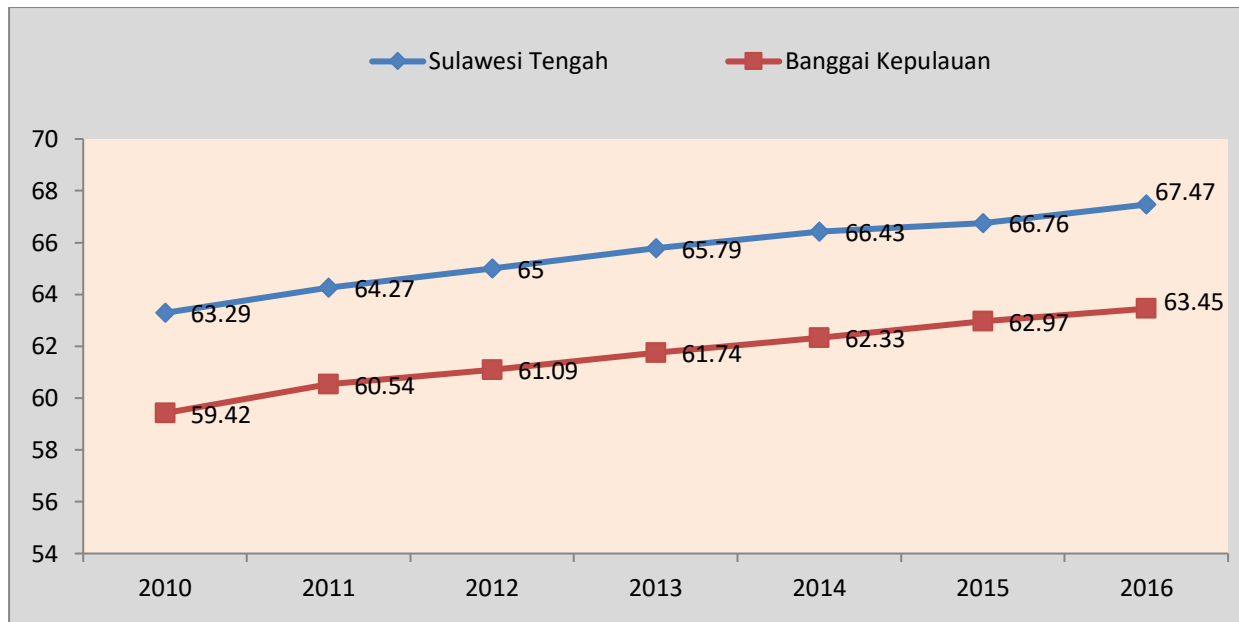
demikian, setiap program dan kegiatan perangkat daerah harus dapat bersinergi dan mampu menyentuh masyarakat miskin di berbagai pelosok kabupaten dan di semua sektor lapangan usaha secara menyeluruh.

### **2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan Human Development Report (HDR) pertama Tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun angkanya masih berada di bawah IPM provinsi. Pada Tahun 2016 IPM Kabupaten Banggai Kepulauan berada pada angka 63,45 masih di bawah IPM Provinsi Sulawesi Tengah yakni 67,47. Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun.

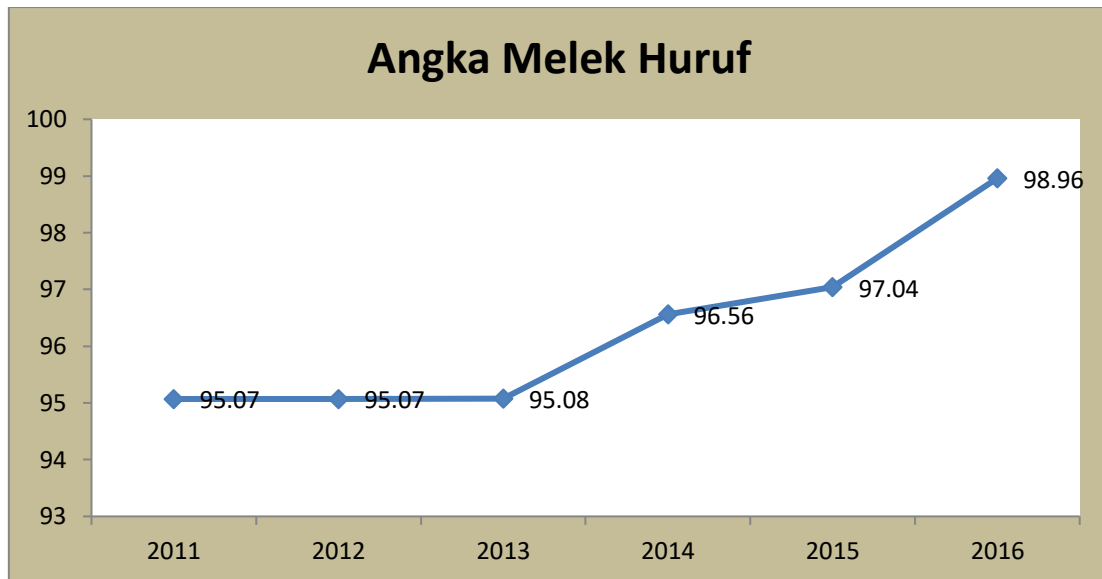


**Gambar 2.13**  
**Indeks Pembangunan Manusia**

### 2.2.7 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia di mana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Berikut ini Gambar yang menunjukkan perkembangan AMH Kabupaten Banggai Kepulauan.

Gambar 2.14 menunjukkan AMH yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 angka melek huruf sebesar 95,07 persen. Angka ini terus meningkat selama lima tahun terakhir dan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 98,96 persen. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program pengentasan buta huruf serta adanya potensi pertukaran dan penyerapan informasi serta perkembangan intelektual ke arah yang lebih baik.



Sumber : Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan

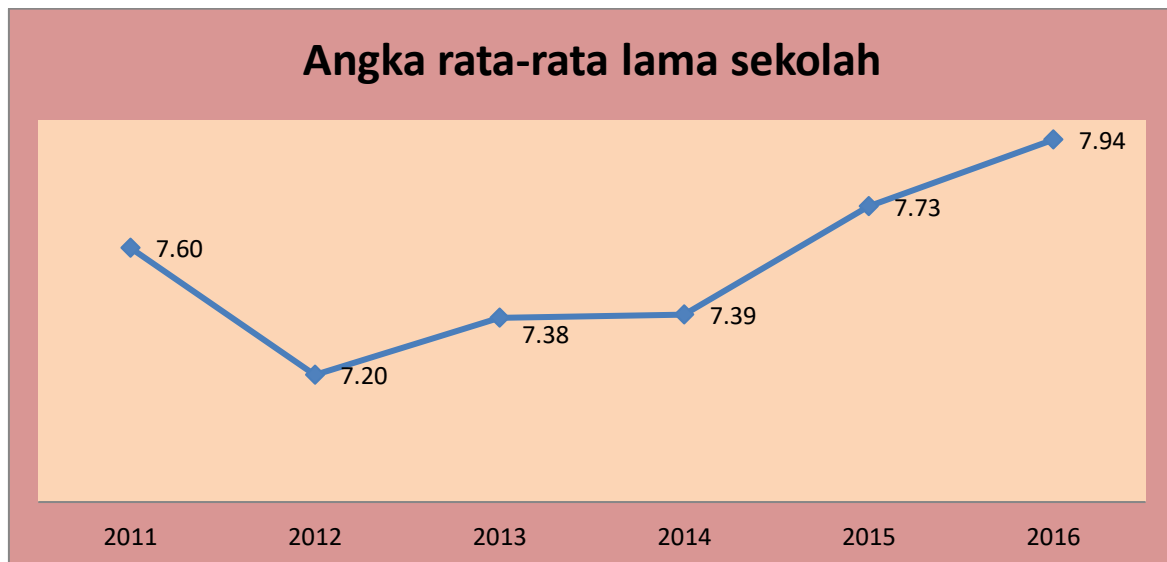
**Gambar 2.14**  
**AMH Kabupaten Banggai Kepulauan**

### 2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Lamanya Sekolah atau *years of mean schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Berikut ini gambaran angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2.15 menunjukkan adanya peningkatan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Angka rata-rata lama sekolah pada Tahun 2011 mencapai 7,25 tahun meningkat sebesar 0,48 poin dalam kurun waktu 5 tahun. Pada Tahun 2016 angka rata-rata lama

sekolah sebesar 7,94 tahun. Meskipun peningkatan tersebut belum begitu signifikan, namun adanya peningkatan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa kualitas pendidikan berada pada arah yang lebih baik. Meskipun angka ini masih belum sempurna karena mengabaikan jumlah siswa tidak naik kelas dan lama penyelesaian studi pada setiap tingkatan pendidikan. Jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya, sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, data diolah

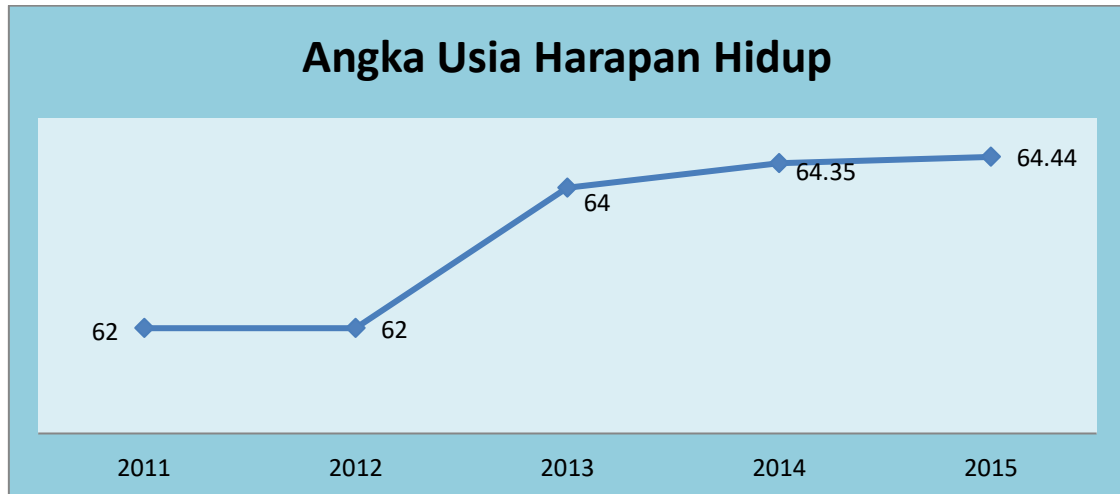
**Gambar 2.15**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah**

### 2.2.9 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.16**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan**

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa angka harapan hidup terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 Usia harapan hidup berada di angka 62 tahun dan pada Tahun 2016 meningkat menjadi 64,44 tahun. Hal ini berarti bahwa perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat sehingga angka harapan hidup juga ikut meningkat.

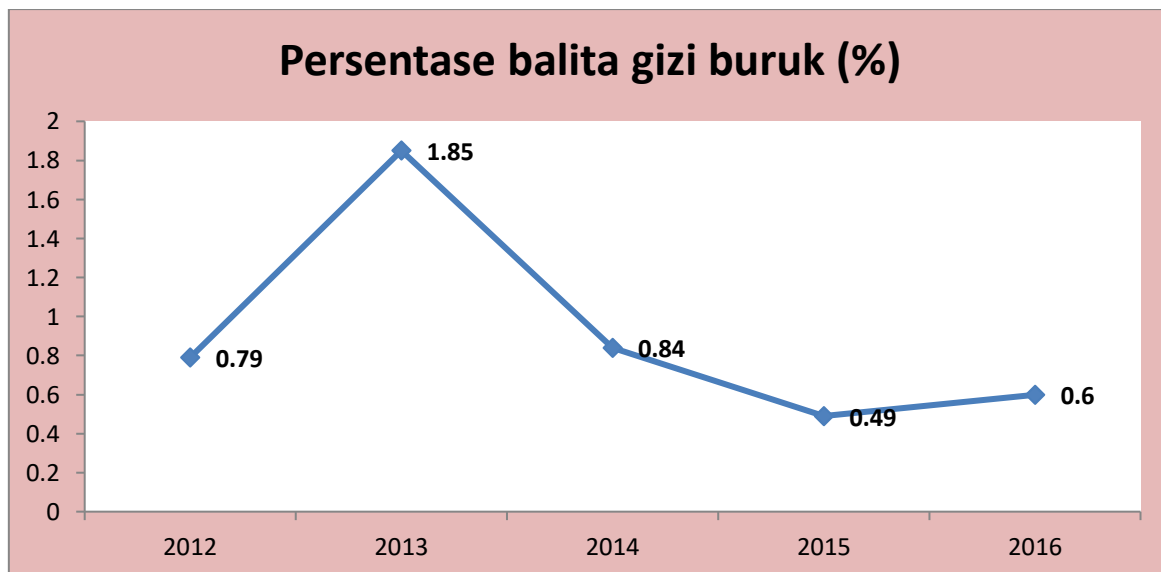
#### **2.2.10 Persentase Balita Gizi Buruk**

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan kabupaten/kota untuk provinsi berdasarkan

prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

- a. Rendah = di bawah 10 %
- b. Sedang = 10-19 %
- c. Tinggi = 20-29 %
- d. Sangat tinggi = 30 %

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Sumber : Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

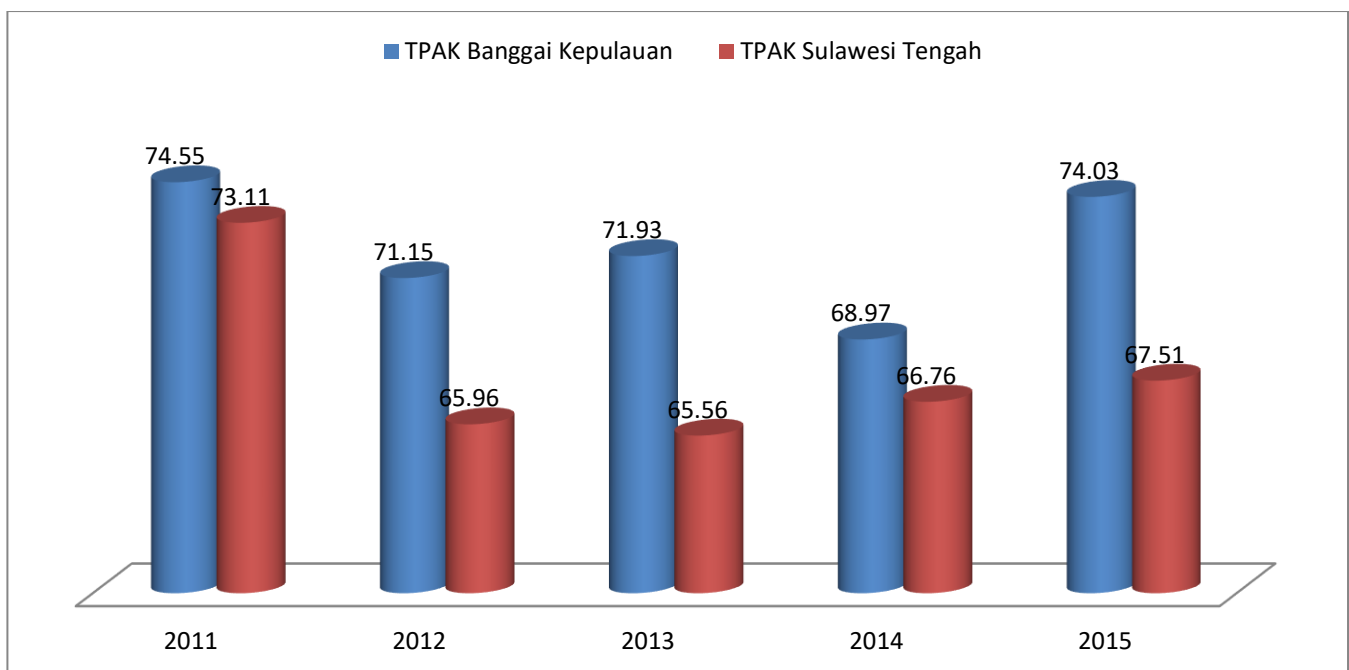
**Gambar 2.17**  
**Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Banggai Kepulauan**

Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori rendah yakni 0,6 persen. Gambar di atas juga memperlihatkan adanya penurunan persentase balita Gizi Buruk di

Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan dan gizi.

### 2.2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.18**  
**Gambaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2015**

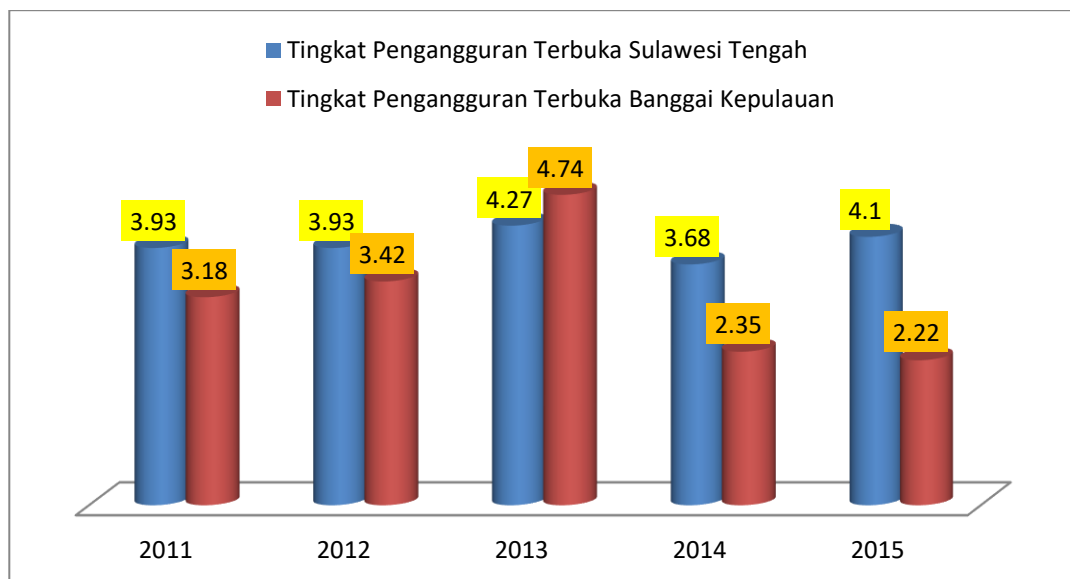
Berdasarkan grafik terlihat bahwa kurun waktu 2011-2015, TPAK Kabupaten Banggai Kepulauan berada di atas TPAK Sulawesi Tengah dengan capaian yang tertinggi Tahun 2011, 74,55 persen dan Tahun 2015 dengan capaian 74,03 persen. Makin besar nilai indikator ini makin baik.

### 2.2.12. Pengangguran

Penduduk yang bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kriteria satu jam (*one-hour criterion*) digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu daerah, termasuk di dalamnya pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work* dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur.

Usia Kerja; adalah batas bawah usia kerja seseorang menurut hukum yang berlaku. Indonesia menggunakan batas bawah 15 tahun dan tanpa batas atas sebagai usia kerja (*economically active population*).



**Gambar 2.19**

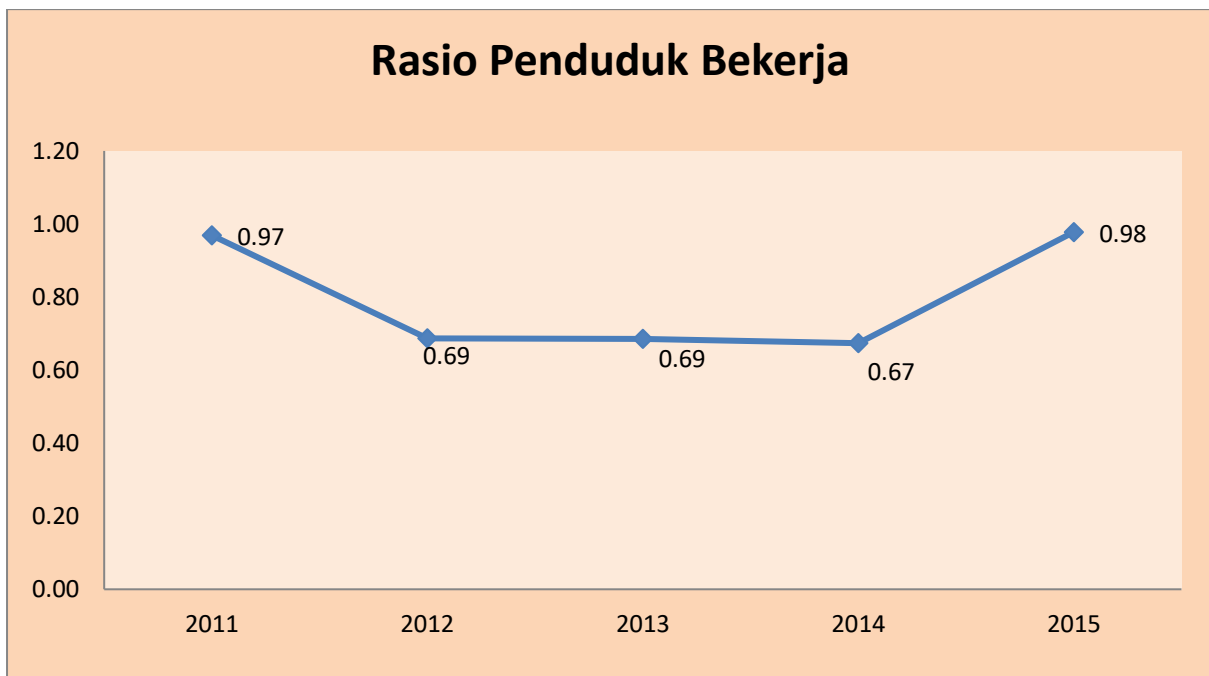
#### **Gambaran Tingkat Pengangguran Banggai Kepulauan dengan Sulawesi Tengah 2011-2015**

Indikator ini berguna untuk mengetahui berapa jumlah penduduk yang bekerja dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja (penganggur) terhadap angkatan kerja pada waktu tertentu. Makin rendah nilai pada indikator ini, makin sedikit penduduk yang tidak memiliki

pekerjaan. Berdasarkan gambar di atas terlihat pengangguran di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung mengalami penurunan.

### 2.2.13. Rasio Penduduk yang Bekerja

Angkatan kerja (*labour force*) dalam didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah  $= (1 - \text{angka pengangguran})$ .



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (Data diolah)

**Gambar 2.20**  
**Rasio Penduduk Yang Bekerja**

Gambar 2.20 menunjukkan kecenderungan peningkatan Rasio Penduduk yang Bekerja. Rasio penduduk bekerja di Tahun 2015 mencapai 98 persen. Angka ini mendekati 100 persen yang artinya bahwa sebagian besar bahkan mendekati keseluruhan jumlah angkatan kerja telah bekerja. Hal ini juga menunjukkan angka pengangguran di Kabupaten Banggai Kepulauan yang rendah.

## 2.2.14 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

### 2.2.14.1 Kebudayaan

Bidang kebudayaan merupakan pengembangan dan sekaligus pemeliharaan atas warisan leluhur secara turun-temurun terhadap barang dan perilaku masyarakat. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki seni dan budaya beragam. Ada beberapa jenis seni dan budaya yaitu seni tari, suara, dan drama/teater.

**Tabel 2.11**  
**Perkembangan Grup dan Gedung Kesenian**

Kebudayaan	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah grup kesenian	Grup	12	12	12	13	14	14
Jumlah Gedung	Unit	-	-	5	-	-	-

Sumber : Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

Tabel 2.11 menunjukkan jumlah grup kesenian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2011 grup kesenian berjumlah 12 grup dan terus meningkat sampai dengan saat ini. Pada Tahun 2016 grup kesenian berjumlah 14 grup dan terdapat 5 Gedung kesenian yang tersebar di wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan.

### 2.2.14.2 Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Tabel 2.12 menunjukkan peningkatan jumlah klub olah raga yang berjumlah 100 klub pada Tahun 2011 dan meningkat menjadi 128 klub pada Tahun 2016. Terdapat 2 Gedung olahraga yang tersebar di Kabupaten Banggai Kepulauan. Jumlah ini belum meningkat dari Tahun 2013 sampai dengan saat ini.

**Tabel 2.12**  
**Perkembangan Klub dan Gedung Olahraga**

<b>Kebudayaan</b>	<b>Satuan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Jumlah klub olahraga	Klub	112	115	120	124	128
Jumlah gedung olahraga	Unit	-	2	2	2	2

Sumber : Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

### **2.3 ASPEK DAYA SAING**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

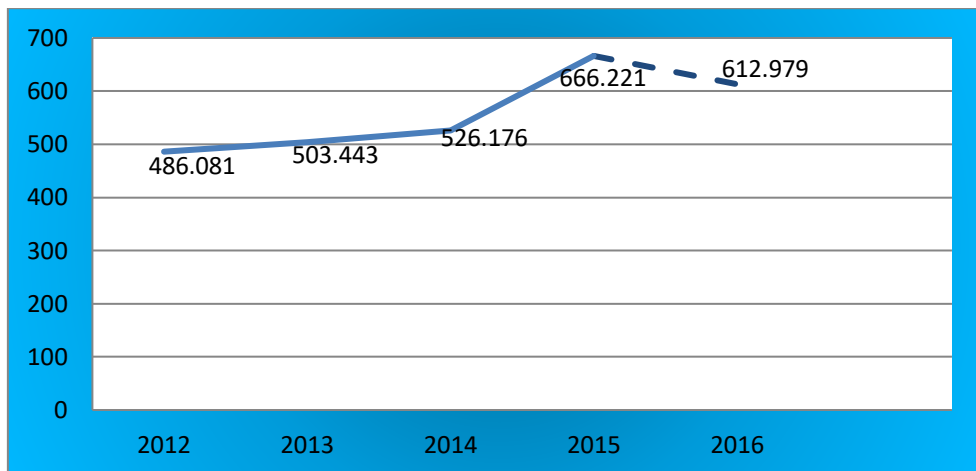
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, fokus pada aspek daya saing terdiri dari 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita; 2) Nilai tukar petani; 3) Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita; 4) Produktivitas total daerah; 5) Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa; 6) Rasio ekspor + impor terhadap PDB; 7) Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum; 8) Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR; 9) Angka kriminalitas yang ditangani; dan 10) Rasio ketergantungan. Seluruh data yang dianalisis dalam aspek daya saing diperoleh dari tabel Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) dan BPS Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Fokus kemampuan ekonomi daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemampuan ekonomi menjadi daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menciptakan produktivitas daerah. Semakin tinggi (meningkat) kemampuan ekonomi daerah, maka semakin baik daya saing suatu daerah. Fokus kemampuan ekonomi diukur dengan indikator: 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita; 2) Nilai tukar petani; 3) Pengeluaran

konsumsi non pangan; dan 4) Produktifitas total daerah. Data yang diperoleh di Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan adanya peningkatan daya daya saing Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2012 hingga 2015. Namun terjadi penurunan pada Tahun 2016. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

### 2.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga



Sumber: Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

**Gambar. 2.21**  
**Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan angka yang diperoleh dari perbandingan total seluruh konsumsi makanan dan bukan makanan oleh rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah rumah tangga yang ada pada kabupaten tersebut. Dari Tahun 2012 sampai 2015 terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi perkapita, seperti ditunjukkan oleh gambar di atas.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran rumah tangga terhadap konsumsi pada Tahun 2012 sampai 2015. Hal ini merupakan kondisi yang baik untuk meningkatkan daya saing, yakni semakin tinggi nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, diharapkan rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan mampu mencukupkan kebutuhan gizi yang bersumber dari makanan. Pada Tahun 2012, nilai pengeluaran konsumsi Rp486.081,- naik hingga Rp666.221,-

per bulan pada Tahun 2015. Namun pada Tahun 2016 nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga turun menjadi Rp612.979,- per bulan.

Data tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target dari RPJMD sebelumnya, hal tersebut karena pada RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan periode sebelumnya, tidak terdapat proyeksi data pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita.

Pada pembangunan berkelanjutan, dijelaskan bahwa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi dari suatu penduduk, di mana konsumsi makanan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat. Secara singkat dapat diartikan sebagai probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur besarnya balita yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi. Berdasarkan data Riskesda Tahun 2013, prevalensi balita gizi buruk di Indonesia yaitu sebesar 5,7 persen dan 13,9 persen untuk gizi kurang.

### **2.3.1.2 Nilai Tukar Petani**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Sebagai rujukan Kabupaten Banggai Kepulauan, disajikan data NTP tingkat Sulawesi Tengah sebagai berikut.

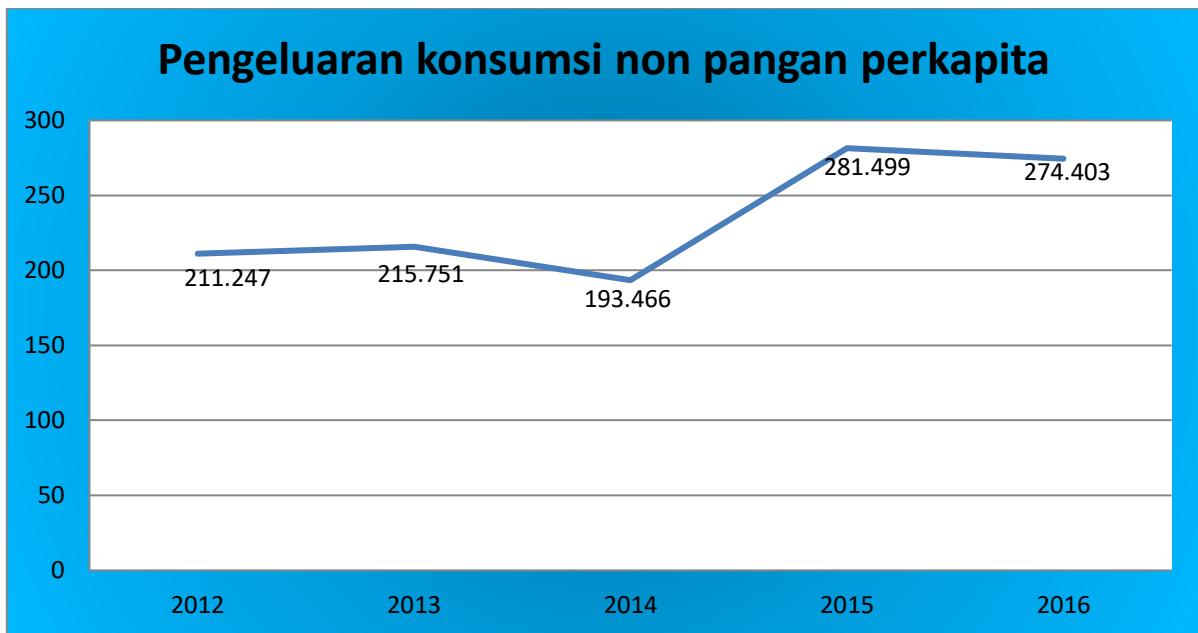
**Tabel 2.13**  
**Nilai Tukar Petani Gabungan Sulawesi Tengah**

No.	Bulan	Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Petani serta Nilai Tukar Petani Gabungan				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	99.04	97.22	101.36	98.37	99.09
2	Februari	98.15	97.22	102.15	97.75	99.08
3	Maret	97.86	97.42	103.3	97.85	99.67
4	April	97.48	97.61	103.24	96.52	99.48
5	Mei	97.69	97.98	103.53	96.7	99.91
6	Juni	97.73	98.07	103.78	97.62	100.62
7	Juli	97.52	96.9	102.87	102.87	100.59
8	Agustus	97.68	96.43	102.71	102.71	99.77
9	September	97.8	96.87	102.26	102.26	99.24
10	Oktober	98.05	96.12	101.8	101.81	98.68
11	November	97.36	96.39	100.66	100.66	98.2
12	Desember	97.16	96.99	98.49	98.49	97.87
<b>Rata-rata</b>		<b>97.79</b>	<b>97.10</b>	<b>102.18</b>	<b>99.47</b>	<b>99.35</b>

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka (BPS) berbagai tahun terbitan

Jika NTP lebih besar dari 100, maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Pada data yang disajikan pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa nilai tukar petani yang diterima relatif baik pada Tahun 2014, karena pada Tahun 2014 pada bulan Januari sampai dengan November, NTP Sulawesi Tengah di atas angka 100. Sedangkan pada tahun – tahun yang lainnya masih relatif lebih banyak (pada masing-masing bulannya) NTP yang di bawah 100. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan pada nilai daya beli petani jika dibandingkan dengan tahun dasar. Mengingat nilai mata uang rupiah yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka sebaiknya pemerintah mulai memperhatikan NTP sehingga petani menerima harga yang sesuai untuk peningkatan kesejateraannya.

### 2.3.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita



Sumber: Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

**Gambar 2.22**  
**Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga selain konsumsi untuk pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dihitung dengan perbandingan proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap jumlah penduduk.

Data yang diperoleh menunjukkan terjadi perubahan nilai pengeluaran untuk konsumsi non pangan perkapita di Kabupaten Banggai Kepulauan pada setiap tahunnya. Perubahan tersebut berfluktuasi, yakni pada Tahun 2012 dan 2013 naik menjadi masing-masing Rp211.247,- menjadi Rp215.751,- per bulannya. Penurunan pengeluaran konsumsi non pangan terjadi pada Tahun 2014 menjadi Rp193.466,- perbulan.

Nilai tersebut mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp281.499,- per bulan. Namun pada Tahun 2016 terjadi penurunan konsumsi non pangan hingga menjadi Rp274.403 perbulan. Konsumsi non pangan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi pangan, lihat tabel berikut.

**Tabel 2.14**  
**Persentase Pengeluaran Non Pangan Per Bulan**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Pengeluaran Non Makanan	Rp211,247	Rp215,751	Rp193,466	Rp281,499	Rp274,403
Total Pengeluaran Perkapita	Rp697,328	Rp719,194	Rp719,642	Rp947,720	Rp887,382
<b>Persentase</b>	<b>30.29%</b>	<b>30.00%</b>	<b>26.88%</b>	<b>29.70%</b>	<b>30.92%</b>

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

Tabel tersebut menggambarkan perbandingan Pengeluaran Penduduk kelompok non makanan dibandingkan dengan total pengeluaran per kapita. Total pengeluaran perkapita diperoleh dengan penjumlahan pengeluaran konsumsi kelompok makanan dan non makanan. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar dihabiskan untuk konsumsi pangan.

Pada Tahun 2012, persentase pengeluaran non makanan sebesar 30.29 persen menurun menjadi 30 persen pada Tahun 2013 dan 26.88 persen di Tahun 2014. Nilai persentase pengeluaran non makanan naik pada Tahun 2015 menjadi 29.70 persen dan pada Tahun 2016 menjadi 30,92 persen. Konsumsi non pangan digunakan untuk kebutuhan sekolah, investasi kesehatan, investasi modal dan kebutuhan pelengkap sarana dan pra sarana rumah tangga masih relatif kecil. Artinya semakin tinggi nilai persentase pengeluaran non pangan, maka semakin baik alokasi pengeluaran penduduk karena dapat digunakan untuk konsumsi yang bersifat produktif.

#### **2.3.1.4 Produktivitas Total Daerah**

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung perbandingan produktivitas daerah yang tercermin dari PDRB daerah dibagi dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan.

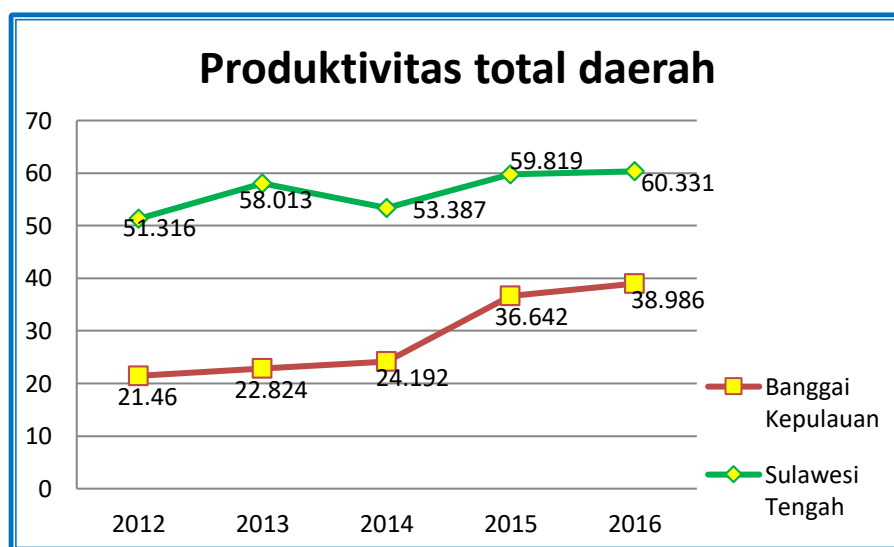
**Tabel 2.15**  
**Produktivitas Total Daerah**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Produktivitas total daerah</b>	<b>21.460</b>	<b>22.824</b>	<b>24.192</b>	<b>36.642</b>	<b>38.986</b>
PDRB ADHK	1,792,018	1,920,748	2,055,537	2,192,338	2,332,565
Jumlah angkatan kerja	83503	84152	84966	59830	59830

Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2017 (BPS)

Hasil perhitungan produktifitas daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan, menunjukkan terjadi peningkatan atas produktivitas daerah. Pada Tahun 2012 nilai produktivitas total sebesar 21,460, naik menjadi 22,824 di Tahun 2013 dan di Tahun 2013 menjadi 24,192. Rasio peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2014 yaitu sebesar 36,642 dan di Tahun 2016 menjadi 38.986. Semakin tinggi nilai produktivitas total daerah, maka semakin baik kemampuan per angkatan kerja dalam memaksimalkan potensi peningkatan produktivitasnya.

Nilai tersebut tidak dapat dilakukan perbandingan atas kinerja target dan kinerja capaian. Hal ini dikarenakan tidak terdapat perhitungan produktivitas total daerah dalam RPJMD periode sebelumnya. Perbandingan dengan produktivitas total Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 2.23**  
**Perbandingan Produktivitas Kabupaten dan Provinsi**

Semakin tinggi produktivitas total daerah, maka semakin baik daerah tersebut mampu menciptakan produksi daerah. Pada gambar di atas menunjukkan bahwa total produktivitas daerah di Sulawesi tengah masih lebih unggul dibandingkan Kabupaten Banggai Kepulauan. Bahkan di tahun tertentu produktivitas total Sulawesi Tengah unggul 2 kali lebih besar nilainya dibanding Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini menunjukkan produktivitas daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan masih relatif rendah jika dibandingkan dengan produktivitas pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

### 2.3.2 Fokus Iklim Investasi

#### 2.3.2.1 Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa maju (swasembada) adalah desa yang berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan juga dalam hal dana modal sehingga sudah dapat memanfaatkan dan menggunakan segala potensi fisik dan non fisik desa secara maksimal. Kehidupan desa swasembada sudah mirip kota yang modern dengan pekerjaan mata pencarian yang beraneka ragam serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang kehidupan masyarakat pedesaan maju.

**Tabel 2.16**  
**Desa Swasembada**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	0	100	-	0	0
Desa swasembada	0	141	-	-	-
Jumlah desa	204	141	-	141	141

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017(BPS)

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, satu dari beberapa potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/kelurahan dan dikalikan dengan 10.000. Hasil penelusuran data,

hanya diperoleh jumlah desa berswasembada pada Tahun 2013, yaitu 141 desa dari 141 desa yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Artinya seluruh desa di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2013 sudah berstatus swasembada.

### 2.3.2.2 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB menunjukkan keterbukaan ekonomi suatu daerah. Diasumsikan semakin besar nilai keterbukaan ekonomi menunjukkan semakin kuat hubungan suatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam hal perdagangan barang dan jasa. Terjadi pemasukan barang dan jasa dari luar dan barang dan jasa dari Kabupaten Banggai Kepulauan dikonsumsi oleh daerah lainnya. Rasio keterbukaan dihitung dari perbandingan total ekspor dan impor dibagi dengan Produk Domestik Regional Bruto menurut komponen penggunaan atas dasar harga konstan (tahun 2010) dalam satuan Juta Rupiah.

**Tabel 2.17**  
**Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Indikator keterbukaan ekonomi</b>	<b>0.2258</b>	<b>0.2260</b>	Na	na	na
Jumlah eks dan imp	121064	131376	Na	na	na
PDB	536119	581355	Na	na	na

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017(BPS)

Data yang berhasil dihimpun adalah pada Tahun 2012 dan 2013 yang bersumber dari BPS (Kabupaten Banggai Kepulauan dalam angka 2014). Data tersebut menunjukkan bahwa nilai ekspor dan impor barang dan jasa dengan PDRB, memperoleh hasil masih di bawah 50 persen. PDRB yang digunakan adalah PDRB menurut komponen penggunaan atas dasar harga berlaku. Komponen PDRB tersebut adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta, konsumsi pemerintah, PMTB, perubahan stok, ekspor barang dan jasa dan dikurangi impor. Penyumbang nilai pembentuk PDRB terbesar adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Nilai indikator keterbukaan ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2012 adalah sebesar 0.226 atau 22.58 persen dan Tahun 2013

naik menjadi 0.226 atau 22.6 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan masih relatif rendah, aktivitas ekonomi masih didominasi oleh perekonomian dalam Kabupaten.

Nilai tersebut belum dapat dibandingkan dengan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan periode sebelumnya, karena rasio ini merupakan rasio yang baru dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

### 2.3.3 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan jumlah aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 tahun dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan kemudian dikalikan dengan 10.000.

**Tabel 2.18**  
**Angka Kriminalitas**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
RasioAngka kriminalitas	-	12,92	10,09	14,61	9,48
Jumlah tindakan kriminal	-	146	115	168	110
Jumlah penduduk	112040	113025	114003	114980	116011

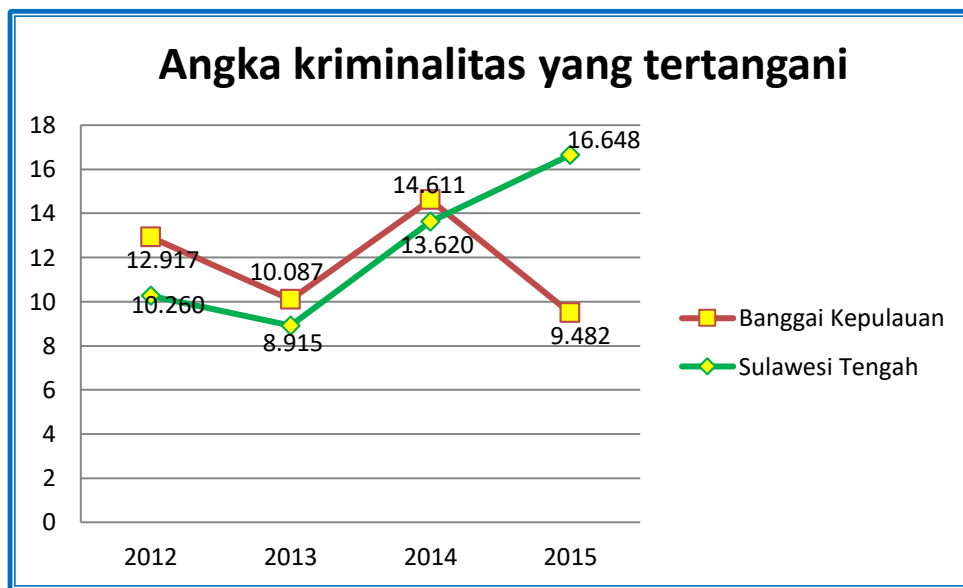
Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017 (BPS)

Pada Tabel 2.18, belum dapat dihitung rasio angka kriminalitas pada Tahun 2012 karena data jumlah tindakan kriminal tidak diperoleh. Nilai rasio kriminalitas yang ditangani mengalami fluktuasi yakni pada Tahun 2013 sebesar 12,92, turun menjadi 10.09 pada Tahun 2014. Hal merupakan nilai yang baik (jika mengalami penurunan) kerana mengindikasikan kurangnya tindakan/kasus kriminal yang terjadi pada tahun tersebut. Pada Tahun 2015, nilai rasio angka kriminalitas naik menjadi 14.61 dan pada Tahun 2016 turun menjadi 9.48.

Nilai rasio kriminalitas yang ditangani tersebut, belum dapat dibandingkan dengan target pada RPJMD periode sebelumnya, karena di

RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan sebelumnya tidak diperoleh nilai tersebut. Perbandingan dengan Angka Kriminalitas Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar berikut.

Perbandingan angka kriminalitas Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pada Tahun 2012 sampai dengan 2016. Hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan dokumen ini belum memperoleh data yang akurat untuk angka kriminalitas yang ditangani Tahun 2016 pada Provinsi Sulawesi Tengah.



**Gambar 2.24**  
**Perbandingan Angka Kriminalitas Kabupaten dan Provinsi**

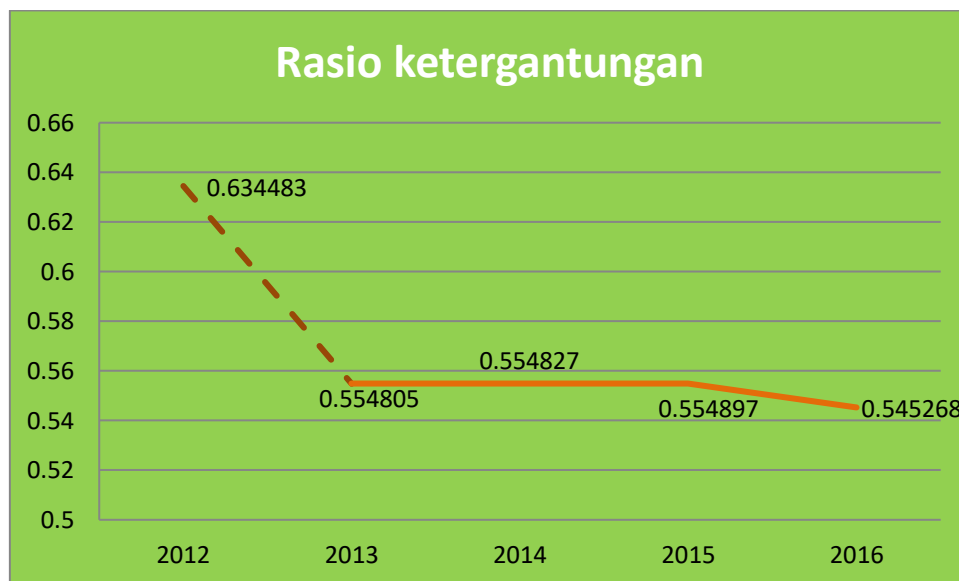
Pada Gambar 2.24 menunjukkan bahwa pada Tahun 2012 – 2014, angka kriminalitas yang ditangani di Sulawesi Tengah masih relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan. Namun pada Tahun 2015, angka kriminalitas yang ditangani di Kabupaten Banggai Kepulauan menurun jika dibandingkan dengan Sulawesi Tengah.

Pada Pembangunan Berkelanjutan, angka kriminalitas di dilihat dari tindakan terhadap Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana. Sepertiga pelaku kriminalitas yang ditangani oleh sistem peradilan masih berstatus sebagai tahanan. Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana di Tahun 2011 sebesar 36,40 persen, kemudian menurun menjadi 32,06 persen di Tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi dari sistem peradilan dalam

menentukan bersalah atau tidaknya seseorang hingga dapat dibuktikan. Penurunan proporsi tersebut juga menandakan perhatian bagi peradilan dalam pencarian sumber daya, efisiensi biaya, dan psikologis keluarga tersangka.

### 2.3.4 Rasio Ketergantungan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.



Sumber: Tabel EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017

**Gambar 2.25**  
**Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Nilai ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif perbandingan

(jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun) terhadap jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 terdapat 64 persen rasio ketergantungan dan turun menjadi 63,45 persen di Tahun 2012. Penurunan drastis terjadi pada Tahun 2013 yaitu rasio ketergantungan menjadi 55,48 persen sama dengan di Tahun 2014. Pada Tahun 2016, nilai rasio ketergantungan menjadi sebesar 54.53 persen. Hal ini disebabkan adanya pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang lebih cepat dibanding laju pertumbuhan penduduk usia tidak produktif. Namun demikian, nilai tersebut tergolong besar karena lebih besar dari 50 persen, yang artinya lebih dari setengah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan masih menggantungkan hidupnya (penghasilan) pada orang lain.

Jika dibandingkan dengan nilai target pada RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan sebelumnya, maka diperoleh seperti gambar berikut:



**Gambar 2.26**  
**Perbandingan Rasio Ketergantungan Data Target dan Riil**

Gambar 2.26, menunjukkan nilai rasio ketergantungan berada lebih rendah dibandingkan dengan nilai yang ditargetkan. Secara matematis,

nilai yang lebih rendah dari target adalah tidak baik. Namun mengingat nilai rasio ketergantungan yaitu jumlah orang yang harus ditanggung karena diasumsikan sudah tidak produktif terhadap penduduk produktif, maka semakin kecil nilai rasio, maka akan semakin baik kondisi daya saing suatu wilayah.

## **2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM**

Kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil pelaksanaan pembangunan selama periode 5 tahun terakhir (2011-2016) pada kondisi pelayanan umum yang mencakup fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Indikator kinerja pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2012-2016 disampaikan berikut:

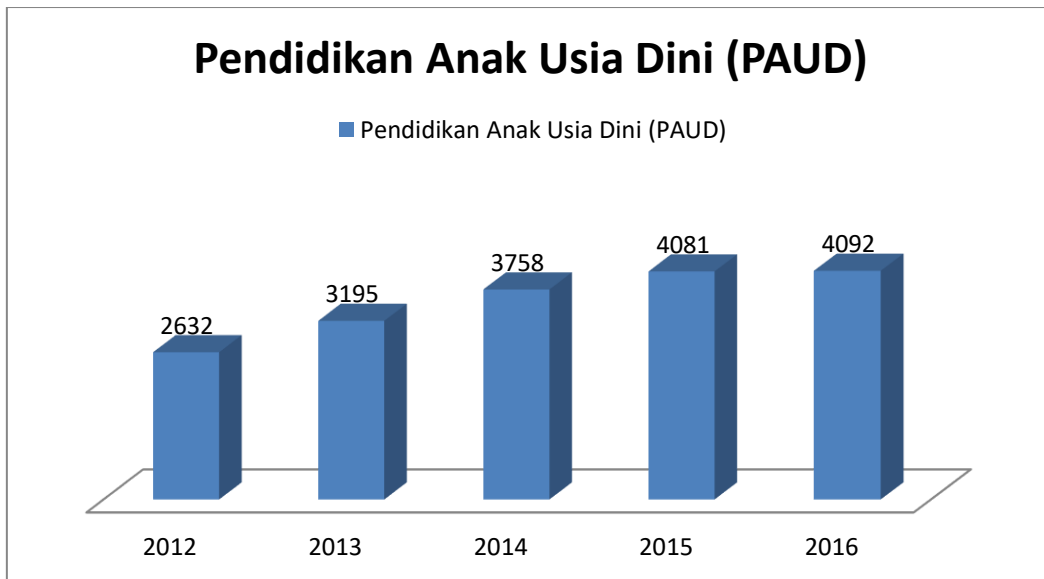
### **2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar**

#### **2.4.1.1 Pendidikan**

##### **1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Pendidikan Anak Usia Dini memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah ini. Gambar berikut ini memberikan gambaran secara umum tentang perkembangan jumlah anak didik pada jenjang pendidikan non formal PAUD di Kabupaten Banggai Kepulauan dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016. Dari gambar tersebut dapat dilihat perkembangan jumlah peserta didik pada PAUD di wilayah ini yang terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 12,42 persen pertahun.

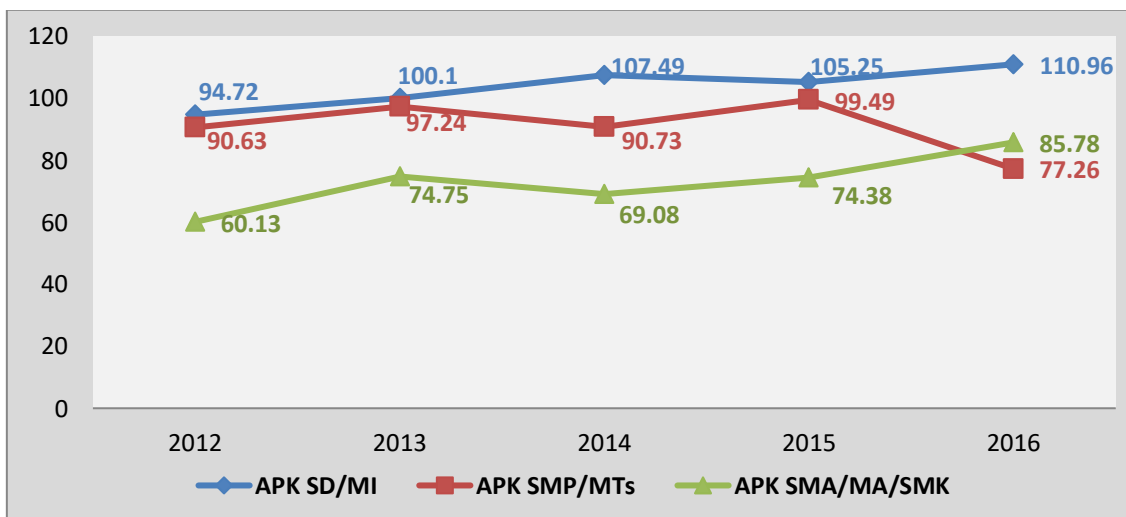
Secara kumulatif, perkembangan jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan PAUD dari Tahun 2012 hingga 2016 di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung mengalami peningkatan.



**Gambar 2.27**  
**Gambaran Jumlah Murid PAUD di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

## 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Misal, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (data diolah)

**Gambar 2.28**  
**APK Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016**

Angka Partisipasi Kasar SD/SLTP/SLTA adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 hingga 18 tahun.

Gambar 2.28 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan APK pada jenjang pendidikan SD dan SMA. Namun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs bersifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkatan SMP/MTs. Gambar 2.28 juga menunjukkan APK tingkat SD masih paling tinggi dan APK tingkat SMA masih menjadi yang terendah.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

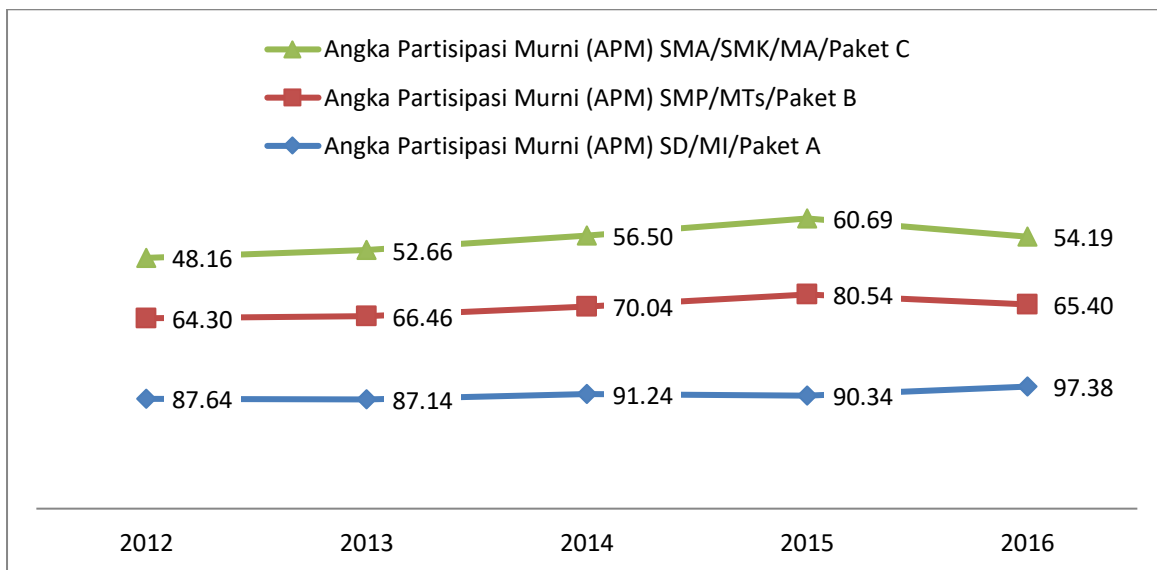
Jika dibandingkan dengan SDG's standar yang menjadi acuan pembangunan di bidang pendidikan untuk indikator APK adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada Tahun 2019 menjadi 114,09 persen (2015: 108 persen). Hingga tahun 2015 APK pada tingkatan SD/MI/ sederajat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 105,25 poin dan belum mencapai target SDG's.
- b. Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada Tahun 2019 menjadi 106,94 persen (2015: 100,7 persen). Hingga tahun 2015, APK pada tingkatan SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 99,49 poin dan belum mencapai target SDG's.
- c. Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada Tahun 2019 menjadi 91,63 persen (2015: 76,4 persen). Hingga tahun 2015, APK pada tingkatan SMA/SMK/MA/ sederajat di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 74,36 poin dan belum mencapai target SDG's.

### **3. Angka Partisipasi Murni**

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.



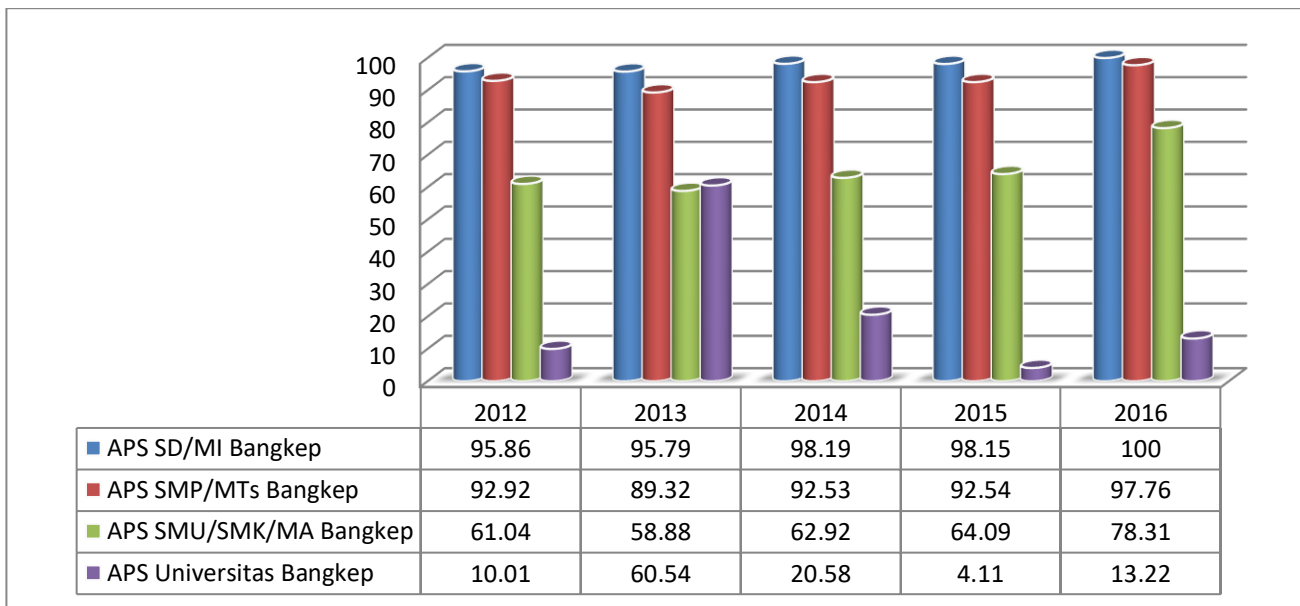
Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 (data diolah)

**Gambar 2.29**  
**APM Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

Gambar 2.29 menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan tersebut di atas cenderung mengalami peningkatan. Dengan demikian, perbaikan kualitas pendidikan di masing-masing usia dan jenjang pendidikan semakin membaik serta menunjukkan bahwa kemampuan penduduk menjangkau pendidikan semakin meningkat. Namun pada Tahun 2016, APM baik di tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah murid dibanding jumlah penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan baik SMP maupun SMA. Dibandingkan dengan angka APK pada tingkat SD/MI dan

SMA/MA/SMK terdapat kesenjangan yang tinggi yang menunjukkan cukup banyaknya peserta didik pada kedua tingkat pendidikan tersebut yang berusia kurang atau melebihi usia normal untuk tingkat pendidikan yang bersangkutan.

#### 4. Angka Partisipasi Sekolah



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012-2016

**Gambar 2.30**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS), Kabupaten Banggai Kepulauan,**  
**Tahun 2012-2016**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1000 penduduk usia pendidikan dasar. Adapun kegunaan dari APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut juga memperhitungkan terjadinya perubahan penduduk, terutama penduduk usia muda.

Pada Tahun 2012-2016, APS untuk tingkatan SD/MI di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan capaian terendah Tahun 2011 dengan nilai 95,86 poin dan yang tertinggi Tahun 2016 sebesar 100 poin yang berarti hingga Tahun 2016 seluruh penduduk di usia 7-12 tahun di Kabupaten Banggai Kepulauan telah terserap di tingkat pendidikan SD/MI.

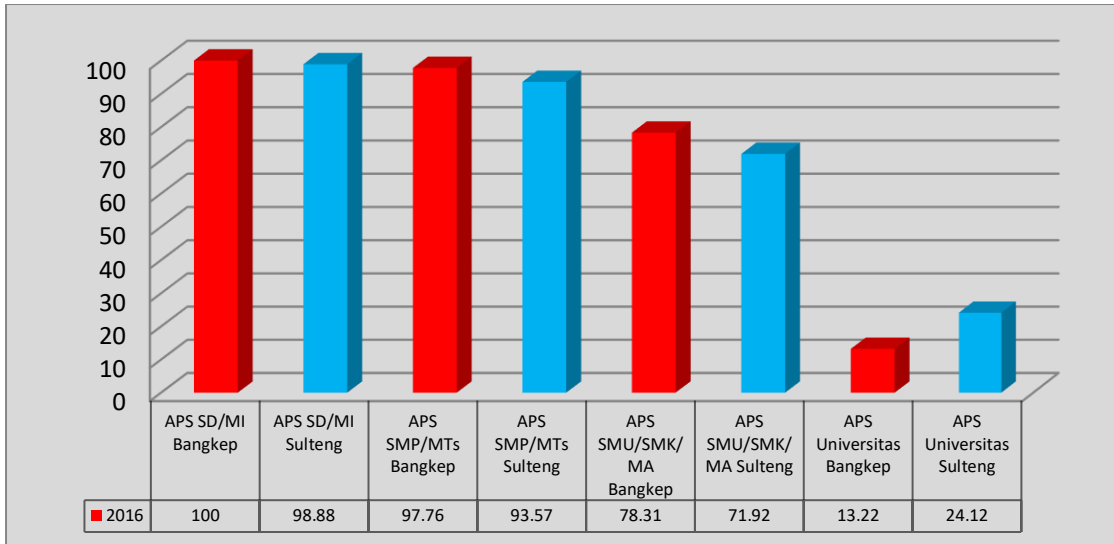
Pada tingkat sekolah SMP/MTs di Kabupaten Banggai Kepulauan dari Tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan kecuali Tahun 2013 yang mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2012 dengan nilai APS 89,32 poin. Hingga Tahun 2016, pada tingkatan pendidikan ini sebesar 2,24 persen penduduk pada kelompok usia ini yang belum terserap.

APS pada tingkatan SMU/SMK/MA di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2011 masih 48,15 persen penduduk usia 16-18 tahun yang tidak sekolah. Sepanjang Tahun 2012-2016 nilai APS pada tingkatan ini cenderung mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi Tahun 2016 mencapai 78,31 poin yang berarti sebanyak 78,31 persen penduduk usia 16-18 tahun di Kabupaten Banggai Kepulauan telah sekolah di SMU/SMK/MA. Sedangkan untuk tingkatan universitas dari Tahun 2012-2016 nilai APS belum mencapai 15 persen.

Angka partisipasi sekolah merupakan indikasi bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Jadi semakin tinggi angka partisipasi sekolah, dapat diartikan semakin baik infrastruktur yang tersedia, dan semakin baik pula akses penduduk terhadap pendidikan. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan semakin baiknya kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Pada Tahun 2016, APS tingkatan SD/MI hingga SMU/SMK/MA, APS Kabupaten Banggai Kepulauan lebih tinggi dari APS Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk tingkatan universitas, APS Kabupaten Banggai Kepulauan di bawah APS Sulawesi Tengah.

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur

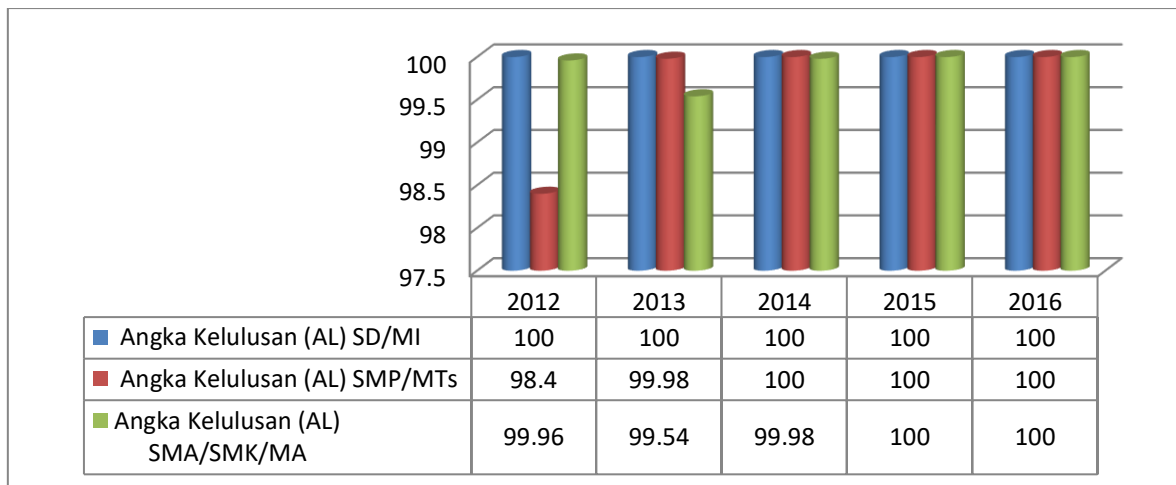


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012- 2016, data diolah

**Gambar 2.31**

**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Bangkai Kepulauan, Tahun 2016**

**5. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012- 2016, data diolah

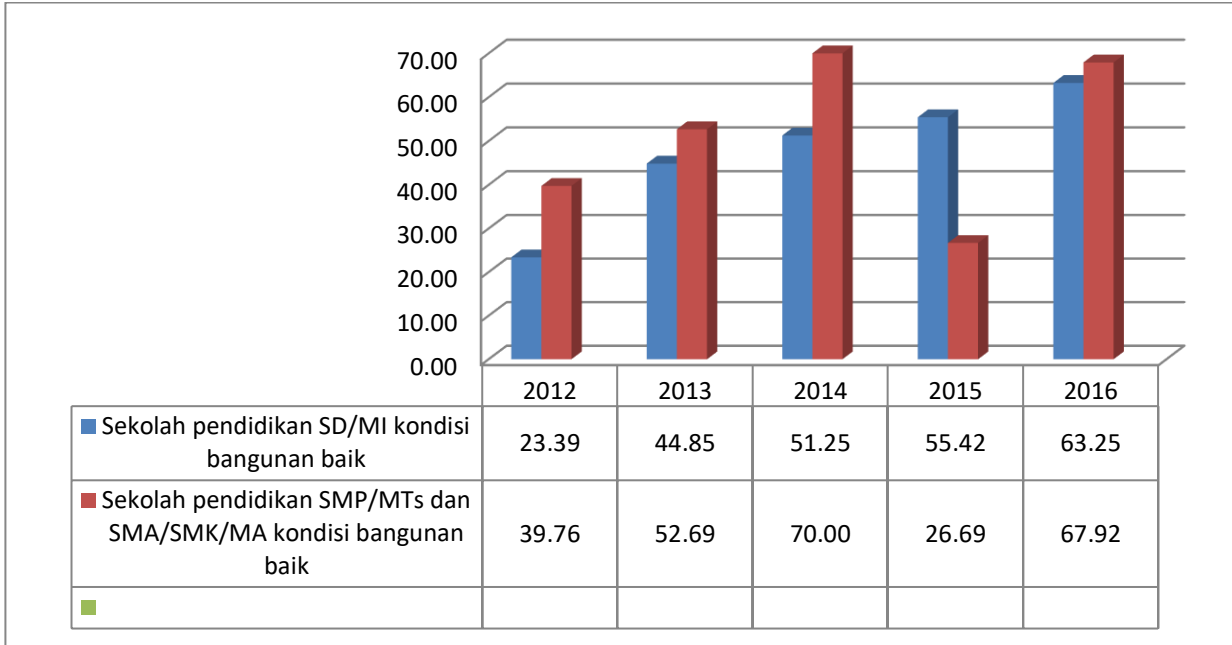
**Gambar 2.32**

**Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bangkai Kepulauan 2012-2016**

Rata-rata angka kelulusan di Kabupaten Bangkai Kepulauan untuk jenjang pendidikan SD/MI dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016 mencapai tingkat 100 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2014-2016 rata mencapai 100 persen dan pada Tahun 2012 dan 2013, capaiannya kurang dari 100 persen. Untuk jenjang pendidikan

SMA/SMK/MA, tingkat kelulusan 100 persen dicapai pada Tahun 2015 dan 2016.

**6. Fasilitas Pendidikan**



**Gambar 2.33**  
**Sekolah pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Gedung sekolah merupakan fasilitas yang utama dalam proses belajar mengajar. Namun pada dasarnya bukan hanya jumlah gedung sekolah yang menjadi perhatian namun yang juga menjadi fokus adalah kondisinya juga baik. Pada Tahun 2012-2016, baik jumlah sekolah pada tingkatan SD/MI maupun SMP/MTs dengan kondisi di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak mencapai 70 persen. Pada tingkatan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA pada Tahun 2015 dan 2016 persentase jumlah sekolah dalam kondisi baik masing-masing 26,69 persen.

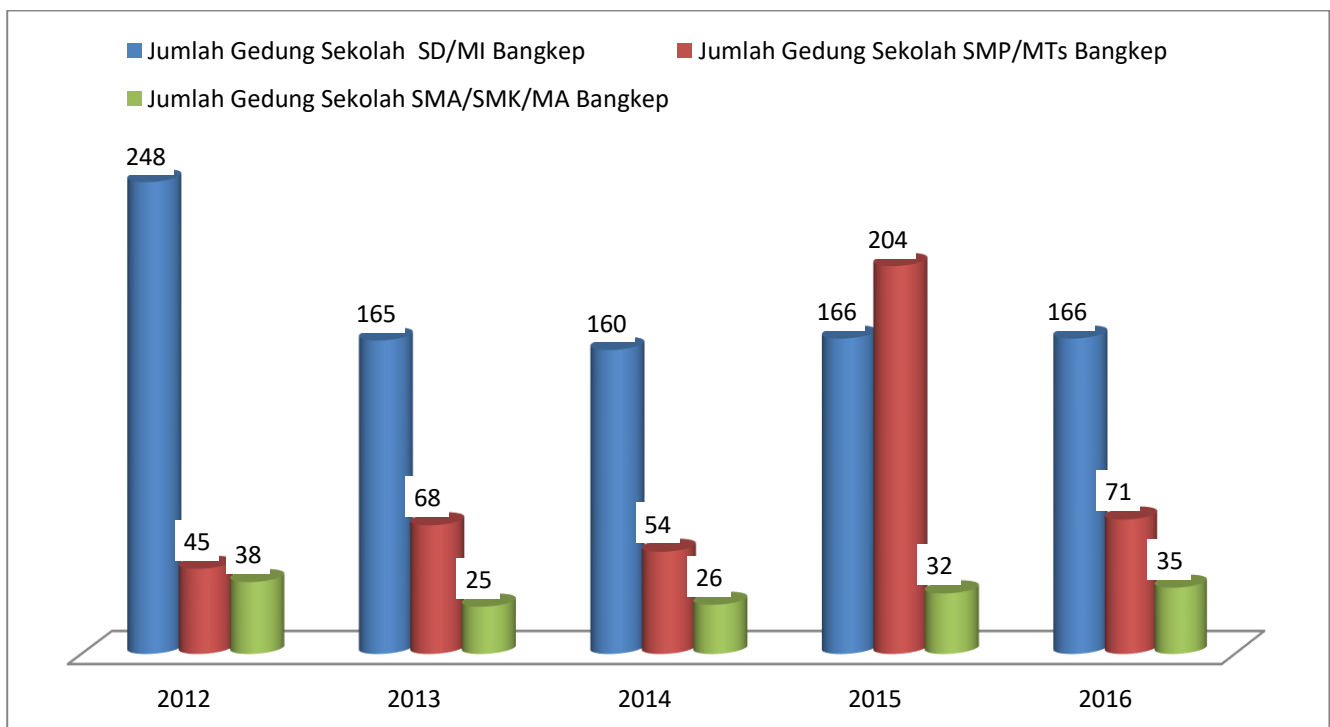
**7. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar**

Pada Tahun 2012-2016 jumlah gedung sekolah pada tingkatan SD/MI di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung berfluktuasi. Pada Tahun 2012 jumlah Gedung SD/MI mencapai 248 gedung dan pada Tahun 2013

menjadi 165 gedung. Hingga Tahun 2015-2016 jumlah gedung sekolah SD/MI mencapai 166 gedung.

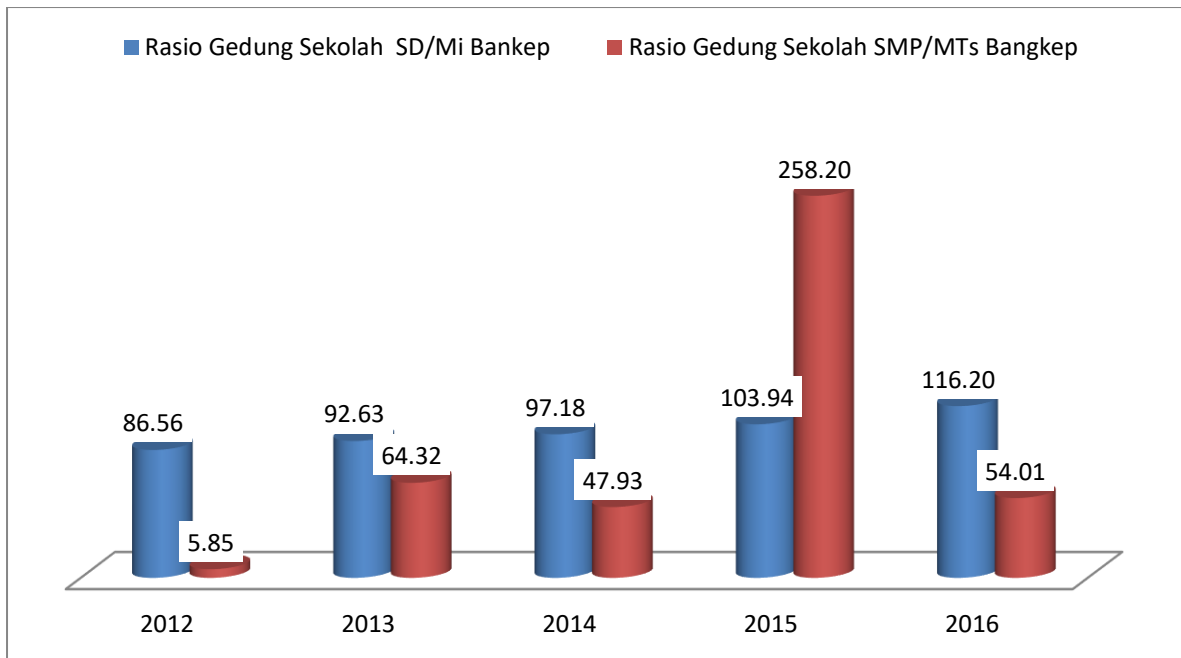
Pada tingkatan SMP/MTs jumlah gedung sekolah pada tingkatan ini cenderung mengalami berfluktuasi dengan jumlah gedung mencapai 71 gedung sekolah. Jumlah gedung sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan pada setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan nilai rasio gedung Tahun 2016 sebesar 116,20 poin bahwa setiap sekolah diperuntukan bagi 1162 penduduk sekolah SD/MI. Dari Tahun 2012-2016 rasio gedung sekolah cenderung mengalami peningkatan dengan rasio terendah Tahun 2011 yakni 86,56 poin dan yang tertinggi Tahun 2016.

Pada tingkatan sekolah SMP/MTs di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung berfluktuasi dengan rasio gedung sekolah yang terendah pada Tahun 2012 dan yang tertinggi Tahun 2015.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan 2016, data diolah

**Gambar 2.34**  
**Jumlah Gedung Sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2012-2016**



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.35**  
**Ketersediaan Sekolah SD/MI dan MTs**  
**di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

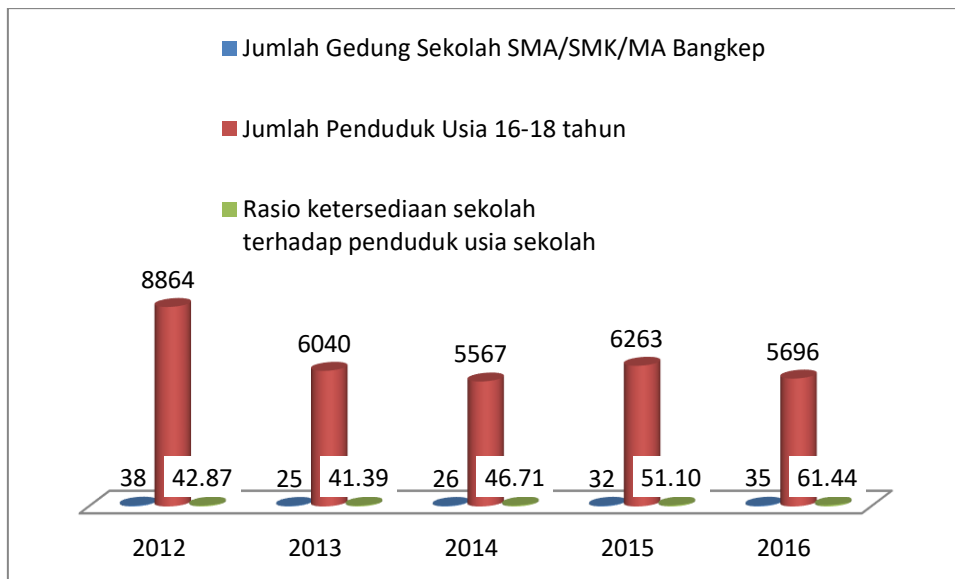
Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Dengan demikian, hal ini juga mencerminkan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Hal ini dapat mengindikasikan, makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Semakin tinggi pula daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

### **8. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah**

Jumlah gedung sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Banggai Kepulauan pada Tahun 2012 sebanyak 38 gedung. Hingga Tahun 2016, jumlah gedung sekolah pada tingkatan SMA/SMK/MA sebanyak 35 unit.

Berdasarkan nilai rasio gedung SMA/SMK/MA Tahun 2016 sebesar 61,44 poin yang berarti, setiap sekolah diperuntukan bagi 614 penduduk. Kurun waktu Tahun 2012-2016 rasio gedung sekolah cenderung mengalami

peningkatan dengan rasio terendah Tahun 2013 mencapai 41,39 poin dan yang tertinggi Tahun 2016 dengan 61,44 poin.



Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2017, data diolah

**Gambar 2.36**  
**Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA**  
**di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

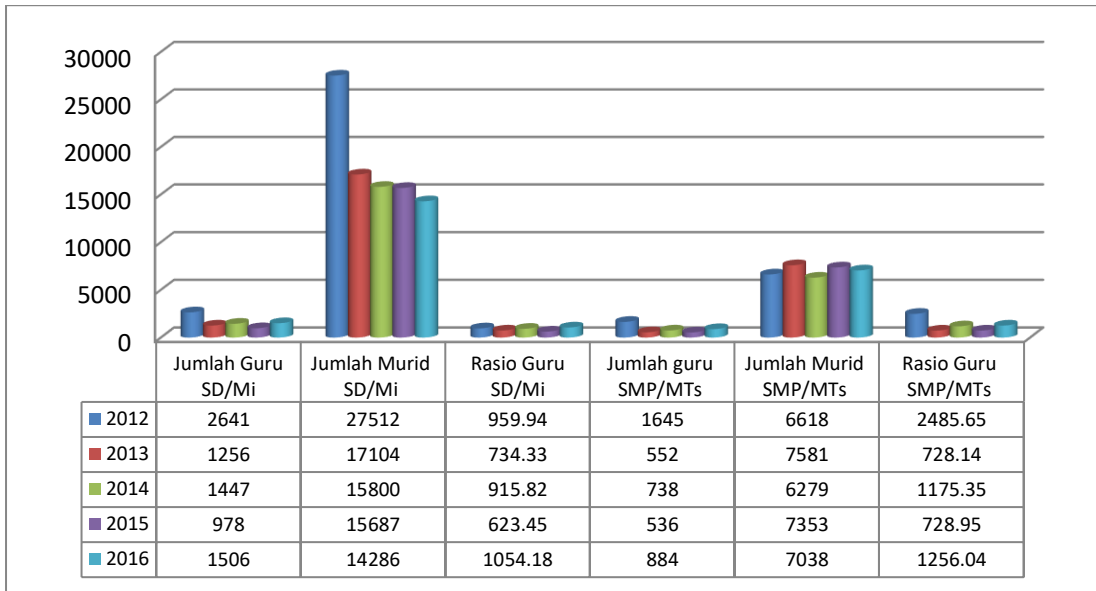
## 9. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di suatu daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Di samping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar-mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan. Makin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Hal ini semakin tinggi pula daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

Pada Tahun 2012-2016, jumlah guru SD/MI di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung mengalami fluktuasi dengan jumlah guru SD/MI yang

terbanyak Tahun 2012 sebesar 2641 orang dan jumlah yang paling sedikit Tahun 2015 sebanyak 978 orang. Hingga Tahun 2016 jumlah guru mencapai 1506 orang. Di sisi lain, jumlah murid SD/MI cenderung mengalami penurunan dengan jumlah yang terbanyak Tahun 2012 sebanyak 27.512 orang dan hingga Tahun 2016 jumlah siswa sebanyak 14.286 orang siswa.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.37**

**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Banggai Kepulauan, Tahun 2012-2016**

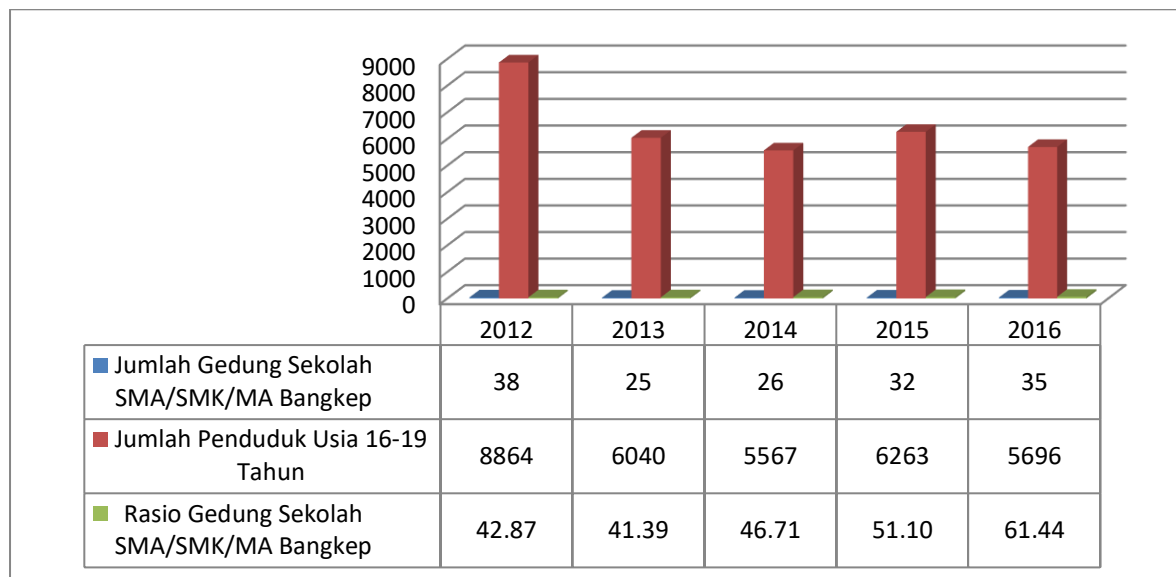
Selanjutnya pada tingkatan SLTP/MTs jumlah guru cenderung berfluktuasi dengan jumlah murid yang cenderung mengalami penurunan periode 2012-2016. Berdasarkan data dari BPS, jumlah murid mencapai 7038 orang siswa pada Tahun 2016. Rasio Guru SD/MI di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung mengalami fluktuasi dengan rasio yang tertinggi Tahun 2016 sebesar 1054,18 poin dan yang terendah rasio guru Tahun 2015 mencapai 623,45 poin. Rasio guru mencapai 1054,18 di Tahun 2016 bermakna bahwa bahwa setiap 100 orang guru melayani sekitar 1054 murid atau setiap guru diperuntukkan bagi 10 orang murid.

Sedangkan rasio guru SLTP/MTs di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung berfluktuasi dengan rasio guru tertinggi Tahun 2012 dengan rasio 2485,65 poin. Tahun 2016, rasio guru SLTP/MTs mencapai 1256,04

poin, yang mengindikasikan bahwa hingga Tahun 2016, bahwa setiap guru melayani sekitar 12 orang murid.

Berdasarkan data tersebut dari Tahun 2012-2016, kemampuan Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluktuasi sehingga memerlukan perhatian yang lebih sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan secara permanen sebagai salah satu penanda kemampuan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam hal penyelenggaraan layanan pendidikan khususnya pendidikan dasar.

#### 10. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah



Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.38**

#### **Rasio Guru SMA/SMK/MA di Kabupaten Banggai Kepulauan**

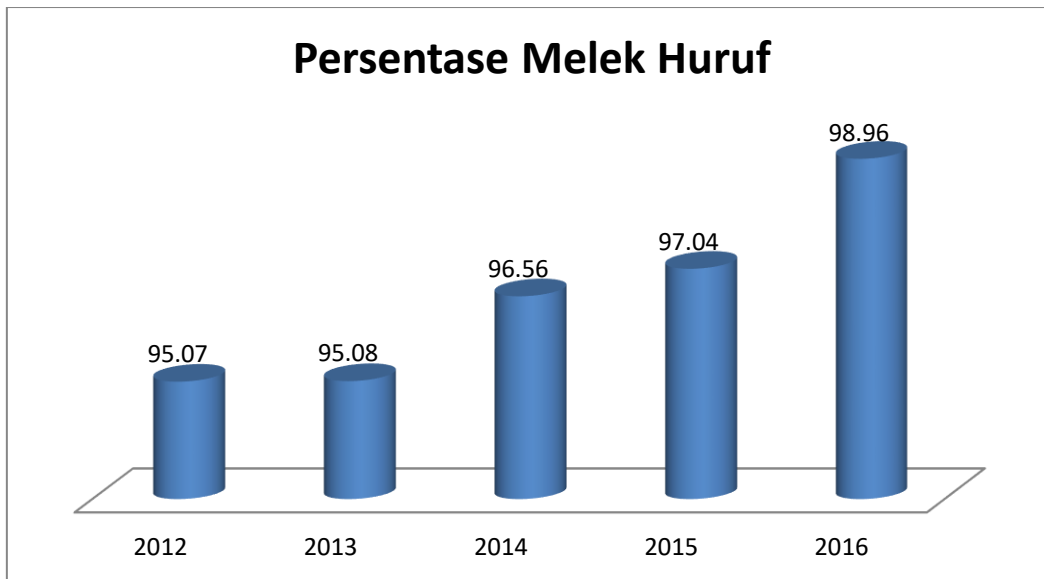
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di sebuah daerah yang dapat dibaca sebagai cerminan dari kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Di samping itu, rasio guru terhadap murid juga dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya jumlah ideal murid untuk setiap guru agar dapat menjamin berlangsungnya proses belajar-mengajar yang bermutu dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan data bahwa pada tingkatan SMA/SMK/MA di Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai rasio guru yang cenderung berfluktuasi periode 2012-2016. Dengan rasio guru yang terbesar Tahun 2015 sebesar 1315,10 poin dan yang terendah Tahun 2014 sebesar 758,48 poin. Makna yang terdapat pada rasio guru Tahun 2016 dimaknai bahwa setiap 100 orang guru melayani 1048 orang murid atau setiap 1 orang guru melayani sekitar 10 atau 11 orang murid. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Hal ini semakin tinggi pula daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

### **11. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan Dan Laki-Laki**

Angka melek huruf (AMH) menunjukkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia di mana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media selain itu, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga angka melek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Berikut ini Gambar yang menunjukkan perkembangan AMH Kabupaten Banggai Kepulauan.

Gambar 2.39 menunjukkan AMH yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2011 angka melek huruf sebesar 95,07 persen. Angka ini terus meningkat selama lima tahun terakhir dan pada Tahun 2016 menjadi sebesar 98,96 persen. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan program pengentasan buta huruf serta adanya potensi pertukaran dan penyerapan informasi serta perkembangan intelektual ke arah yang lebih baik.



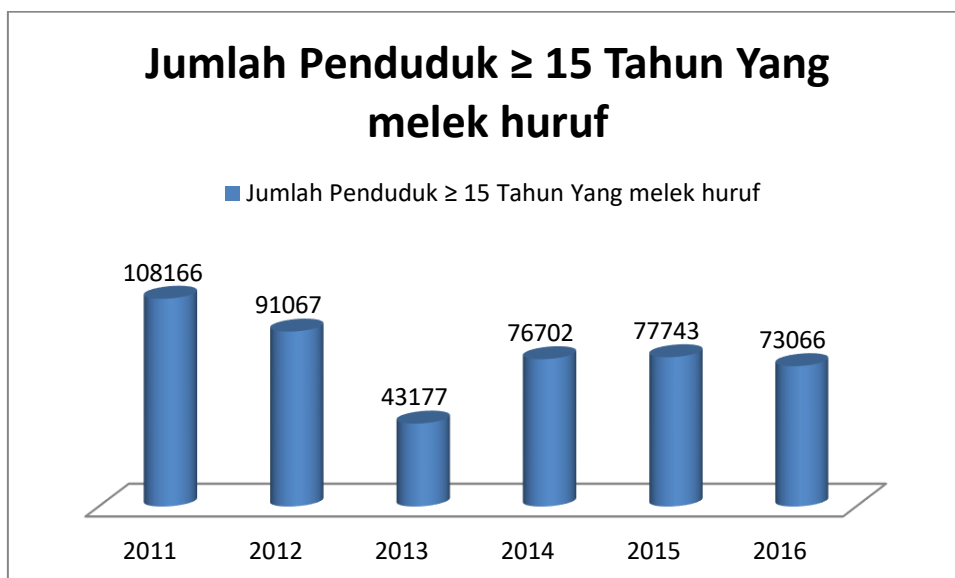
Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.39**

**AMH Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

**12. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)**

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya



Sumber : BPS Sulawesi Tengah Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.40**

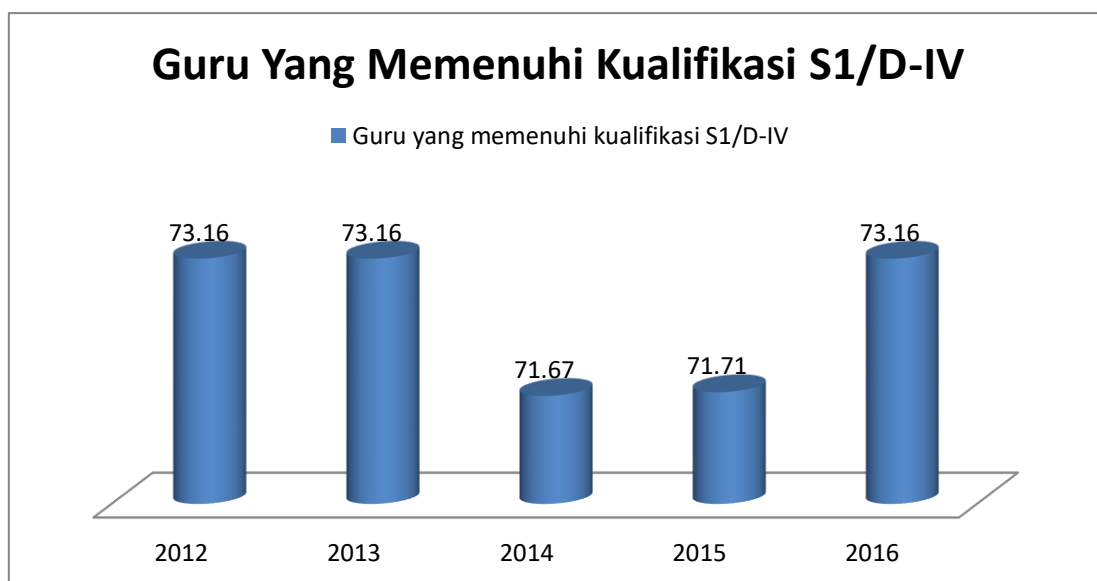
**Penduduk Berusia Lebih dari 15 Tahun yang Melek Huruf**

Pada indikator ini yang digunakan adalah data persentase penduduk yang melek huruf di Kabupaten Banggai Kepulauan dikalikan dengan total penduduk dengan usia  $\geq 15$  tahun, yang menghasilkan data jumlah penduduk  $\geq 15$  Tahun yang melek huruf. Pada Tahun 2013, jumlah penduduk yang melek huruf mencapai 43.177 orang dan pada Tahun 2014 meningkat 77,6 persen. Hingga Tahun 2016, jumlah penduduk melek huruf mencapai 73.066 orang atau lebih rendah dari Tahun 2015 sebanyak 77.743 orang. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin mampu suatu daerah menyediakan akses terhadap pendidikan, dan semakin tinggi pula daerah tersebut menyelenggarakan otonomi daerah.

Target SDG's meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1 persen (2015: 95,2 persen). Hingga Tahun 2015, untuk kabupaten Banggai Kepulauan belum mencapai target SDG's.

### 13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Periode Tahun 2012-2016 persentase jumlah guru dengan kualifikasi S1/D-IV mencapai 71-73 persen dengan capaian yang tertinggi 73,16 persen dan yang terendah lebih dari 71 persen pada Tahun 2014 dan 2015.

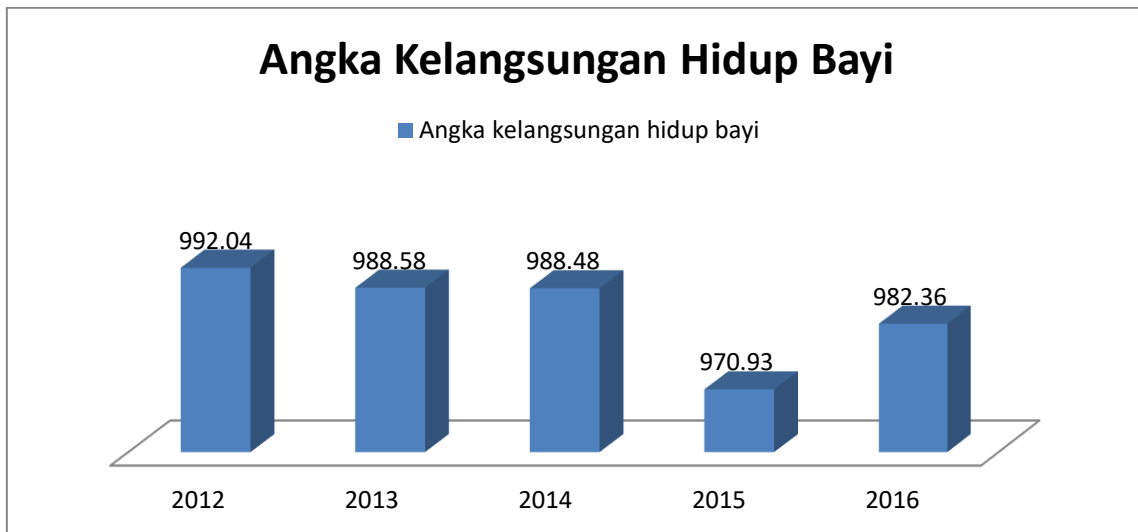


Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.41**  
**Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

## 2.4.1.2 Kesehatan

### 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.42**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi**  
**Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Kelangsungan hidup bagi bayi di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan data berikut ini menunjukkan terjadinya penurunan. Hal ini menandakan bahwa kelangsungan hidup bayi mengalami kemunduran yakni bayi yang bertahan hidup hingga usia satu tahun jumlahnya menurun (terjadi peningkatan kematian bayi usia di bawah satu tahun).

### 2. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1000 balita. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu yang merupakan kegiatan pelayanan terpadu untuk imunisasi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, penanggulangan diare dan gizi (melakukan penimbangan dan pemberian makanan tambahan untuk balita). Posyandu diselenggarakan oleh masyarakat melalui kader kesehatan di bawah bimbingan Puskesmas.

Tujuan Posyandu adalah untuk mempercepat penurunan angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran. Selain itu, Posyandu juga bertujuan untuk mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), serta agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan

kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Satu unit Posyandu, idealnya melayani sekitar 100 balita (120 kepala keluarga) atau sesuai dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat.

Posyandu KB Kesehatan biasanya dipadukan dengan pelayanan kesehatan lainnya, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lengkap pada waktu dan tempat yang sama. Posyandu umumnya dibuka sebulan sekali dan dilaksanakan oleh kader Posyandu yang terlatih di bidang KB dan kesehatan yang berasal dari PKK, tokoh masyarakat dan pemuda secara sukarela dengan bimbingan tim pembina dari Puskesmas. Ketersediaan posyandu untuk melayani balita di Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan (aggregate) cukup memadai. Menurut Kementerian Kesehatan idealnya satu posyandu melayani 100 balita atau ratio posyandu per 1000 balita berada di atas angka 10.

Rasio Posyandu per satuan balita digunakan untuk mengukur ketersediaan Posyandu berdasarkan jumlah balita yang ada. Semakin besar nilai rasio ini, makin tinggi tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan.

**Tabel 2.19**  
**Rasio Posyandu per Balita Kabupaten Banggai Kepulauan**

<b>Uraian</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Jumlah Posyandu</b>	245	185	170	169	172
<b>Jumlah Balita</b>	20412	8039	12050	12153	11912
<b>Rasio Posyandu Per Satuan Balita</b>	12,00	23,01	14,11	13,91	14,44

Sumber : BPS, Statistik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berbagai tahun terbitan, data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, yang menyajikan rasio posyandu di Kabupaten Banggai Kepulauan kurun waktu 2012-2016 bahwa di kabupaten ini termasuk katagori ideal dengan rasio di atas 10. Rasio ini mengindikasikan satu posyandu telah melayani lebih dari 100 orang balita.

### 3. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per Satuan Penduduk adalah jumlah seluruh puskesmas, poliklinik, puskesmas pembantu per 1000 penduduk. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan (misalnya di DKI Jakarta).

Poliklinik adalah tempat pemeriksaan kesehatan, biasanya tanpa fasilitas perawatan menginap, berada di bawah pengawasan dokter/tenaga medis, tidak termasuk klinik yang terdapat di puskesmas/rumah sakit.

**Tabel 2.20**  
**Gambaran Tentang Rasio Puskesmas di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Puskesmas	15	10	10	13	13
2	Jumlah Penduduk	112040	113025	114003	114980	116011
3	Rasio Puskesmas, Per Satuan Penduduk	0,13	0,09	0,09	0,11	0,11

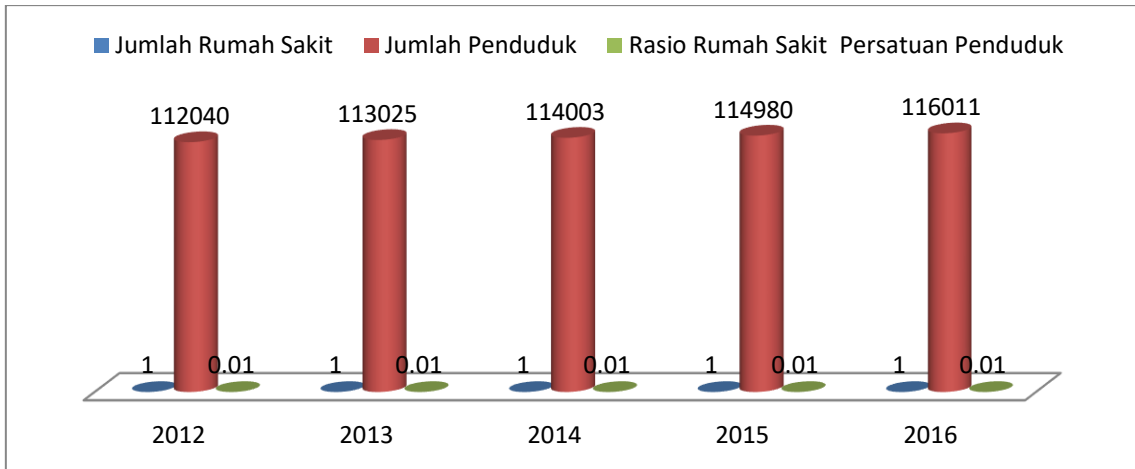
Sumber :BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

1 (satu) unit Puskesmas per 120.000 jiwa dengan kualitas lokasi di pusat lingkungan/kecamatan, bersih, mudah dicapai, tenang, jauh dari sumber penyakit, sumber bau/sampah, serta jauh dari sumber pencemaran lainnya. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan. Berdasarkan data pada tabel di atas, rasio puskesmas mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi Tahun 2012 dengan rasio 0,13 dan yang terendah Tahun 2013 dan 2014 dengan capaian 0,09 poin.

### 4. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Makin tinggi nilai rasio ini menunjukkan, makin tinggi

tingkat kemampuan suatu daerah dalam penyelenggaraan layanan bidang kesehatan.



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.43**  
**Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk**

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 bahwa dari Tahun 2011-2016 jumlah rumah sakit di kabupaten ini sebanyak satu unit dengan rasio 0,01. Dengan harapan pada Januari 2018 rumah sakit Pratama yang terdapat di Lumbi-lumbia Buko Selatan resmi beroperasi.

**5. Rasio dokter per satuan penduduk**

**Tabel 2.21**  
**Rasio Dokter per Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Dokter	38	34	21	21	27
Jumlah Penduduk	112040	113025	114003	114980	116011
Rasio Dokter Persatuan Penduduk	0,34	0,3	0,18	0,18	0,23

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya bertugas untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Dokter yang dimaksud di sini adalah dokter umum dan

dokter ahli/spesialis, tetapi tidak termasuk dokter hewan. Rasio dokter per 10000 penduduk menurut standar pelayanan minimal adalah 40 persen dari 10000 penduduk.

Standar Kementerian Kesehatan, yaitu 26 dokter per 100.000 penduduk atau dengan angka 0,26. Berdasarkan hasil perhitungan rasio dokter di Kabupaten Banggai Kepulauan kurun Tahun 2012-2016 hanya Tahun 2013 dengan rasio dokter di atas standar Kementerian Kesehatan yaitu 0,30. Selain itu, rasio dokter di Kabupaten Banggai Kepulauan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes.

Kegunaan dari perhitungan rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat juga diinterpretasikan sebagai semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan layanan kesehatan dan semakin mampu daerah tersebut menyelenggarakan otonomi.

#### **6. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah rasio untuk mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis. Dari sisi lain, rasio ini juga merupakan indikasi ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.

**Tabel 2.22**  
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah Nakes	654	387	na	432	309
1	Perawat	391	239	na	259	75
2	Bidan	222	128	na	144	213
3	Farmasi	41	20	na	29	21
4	Jumlah Penduduk	112040	113025	114003	114980	116011
	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	5,84	3,42	0,00	3,76	2,66

Na, data belum tersedia

Sumber: Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka berbagai tahun, data diolah

Indikator ini digunakan sebagai indikasi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Semakin tinggi nilai indikator ini, makin tinggi kemungkinan akses penduduk terhadap kesehatan, dan

makin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Target ideal yang diharapkan dapat dicapai dalam rangka pencapaian tujuan adalah 88 persen dari kelahiran bayi mendapat pertolongan linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan).

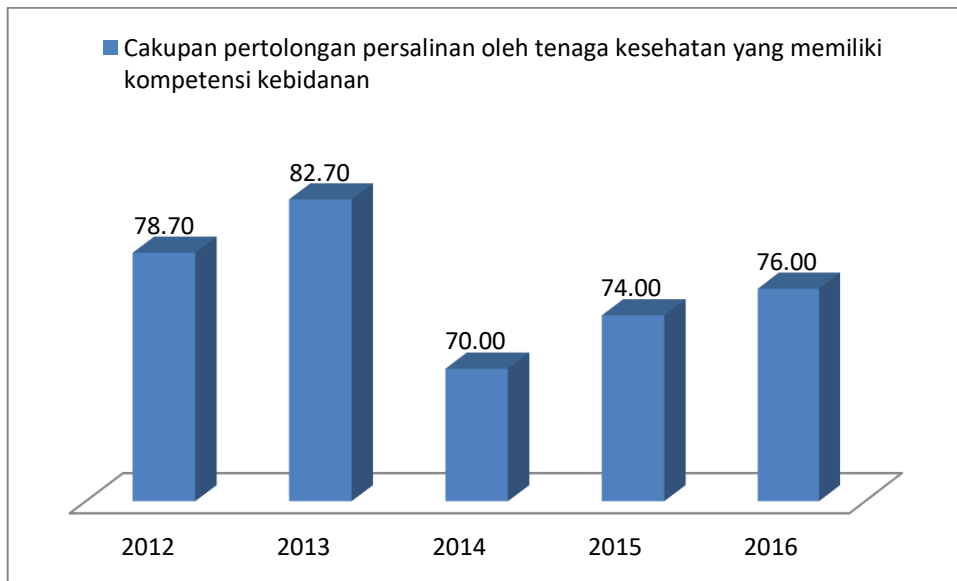
Berdasarkan data pada tabel di atas yang menyajikan rasio tenaga medis terhadap penduduk, yakni Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai rasio medis yang berfluktuasi. Rasio tenaga medis yang terkecil Tahun 2016 yakni 2,66 poin dan rasio tenaga medis yang tertinggi Tahun 2012 yakni 3,8 poin. Berdasarkan data BPS, bahwa di Kabupaten Banggai Kepulauan yang terbanyak adalah tenaga medis perawat, disusul oleh bidan dan farmasi.

#### **7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter, dan tenaga para medis lainnya). Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan Ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Manfaat Melakukan Persalinan di tempat Pelayanan Tenaga Kesehatan antara lain:

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang profesional serta diakui pemerintah;
2. Peralatan bersih dan steril;
3. Tersedia tempat pelayanan yang bersih dan nyaman;
4. Tersedia obat-obatan dan peralatan medis darurat ;
5. Pelayanan yang komprehensif dan ramah ;
6. Manfaat persalinan dengan tenaga kesehatan dengan meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terutama ibu-ibu dengan tingkat pendidikan yang rendah secara

berkesinambungan seperti penyuluhan pada setiap kali posyandu dan mengaktifkan kelas ibu.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.44**

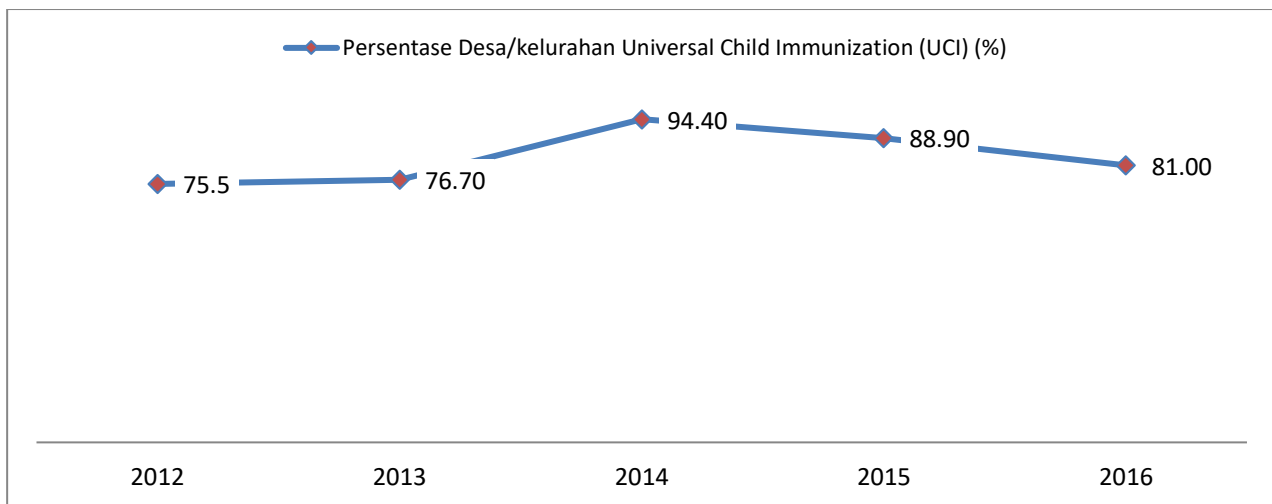
**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Berdasarkan dokumen SDG's, meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 persen (2015: 91,51 persen). Kurun waktu 2012-2016 persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan belum mencapai target SDG's.

### **8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak Sekolah Dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Pada Tahun 2014, Kementrian Kesehatan menargetkan bahwa seluruh desa dan kelurahan di Indonesia telah 100 persen UCI. Namun untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, hingga Tahun 2016 capaian UCI 81 persen mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2014 yang mencapai 94,40 persen desa UCI.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.45**  
**Persentase Desa UCI terhadap Seluruh Desa**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan (2012 – 2016)**

Guna mencapai target 100 persen UCI desa/ kelurahan pada Tahun 2014, perlu dilakukan berbagai upaya percepatan melalui Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional untuk mencapai UCI (GAIN UCI)(Kemenkes 2014).

GAIN UCI merupakan upaya terpadu berbagai sektor terkait dari tingkat Pusat sampai Daerah untuk mengatasi hambatan serta memberikan dukungan untuk keberhasilan pencapaian UCI desa/kelurahan.

### **9. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Tanda-tanda klinis dari gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor.

Definisi gizi buruk atau malnutrisi adalah suatu bentuk terparah akibat kurang gizi menahun. Selain akibat kurang konsumsi jenis makanan bernutrisi seimbang, gizi buruk pada anak juga dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan gangguan pencernaan atau gangguan penyerapan zat makanan yang penting untuk tubuh.

Banyak faktor yang dapat mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang seimbang, dapat juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna.

Persentase balita gizi buruk adalah proporsi balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur.

**Tabel 2.23**  
**Jumlah Balita Penderita Gizi Buruk dan Balita Gizi Buruk yang Ditangani di Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2012-2016**

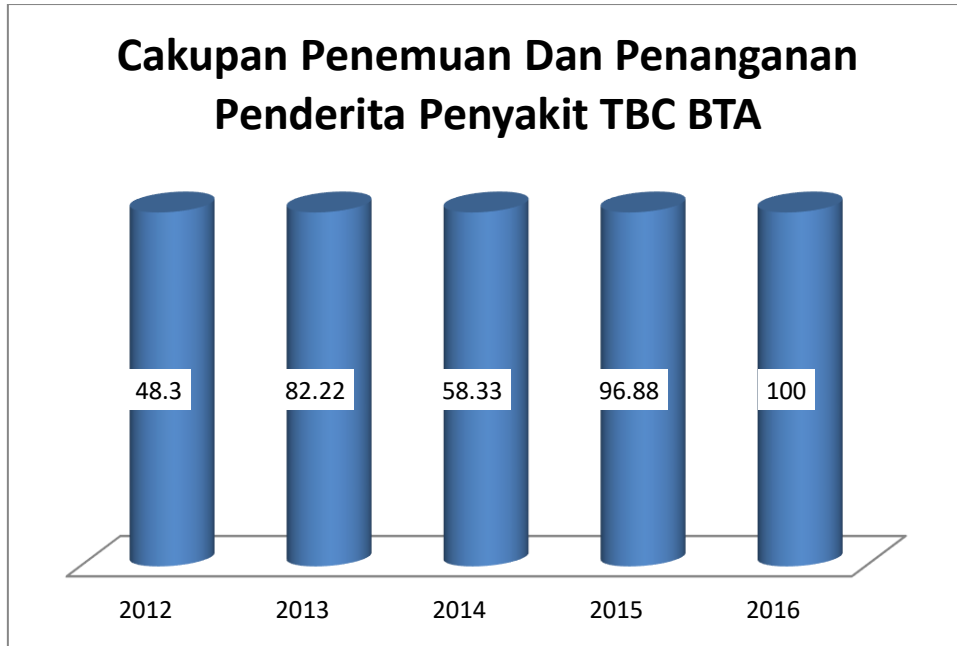
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	13	16	44	17	27
Jumlah Bayi Gizi Buruk	68	16	44	17	27
Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	19,12	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status anak balita dan wanita hamil. Oleh karena itu, sasaran dari program perbaikan gizi makro ini berdasarkan siklus kehidupan yaitu dimulai dari wanita usia subur, dewasa, ibu hamil, bayi baru lahir, balita, dan anak sekolah.

#### **10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari tahun ke tahun sejak Tahun 2012 terus mengalami peningkatan, dari 48,3 persen Tahun 2012 hingga mencapai 100 persen pada Tahun 2016. Gambar berikut menunjukkan perkembangan tersebut.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.46**

**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Banggai Tahun 2012-2016**

**11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

Penyakit DBD berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat. Masyarakat yang kurang peduli kebersihan lingkungan dan ancaman penyakit berbahaya merupakan lokasi yang sangat baik sebagai endemik DBD. Diperlukan kesadaran dan peran aktif semua lapisan masyarakat untuk memusnahkan demam berdarah dengue dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

**Tabel 2.24**

**Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	9	32	5	2	54
TahunJumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	9	32	5	2	54
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1	1	1	1	1

Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

Penyakit demam berdarah *dengue* atau yang disingkat sebagai DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus *dengue* yang berasal dari nyamuk *aedes aegypti* betina lewat air liur gigitan saat menghisap darah manusia.

Kurun waktu 2012-2016 jumlah penderita yang ditangani berfluktuasi dengan jumlah yang terbanyak Tahun 2016 dengan 54 kasus dan seluruh kasus yang ditemukan ditangani dengan nilai cakupan satu.

Selama nyamuk *aedes aegypti* tidak terkontaminasi virus *dengue*, maka gigitan nyamuk DBD tersebut tidak berbahaya. Jika nyamuk tersebut menghisap darah penderita DBD, maka nyamuk menjadi berbahaya karena dapat menularkan virus *dengue* yang mematikan. Untuk itu perlu pengendalian nyamuk jenis *aedes aegypti* agar virus dengue tidak menular dari orang yang satu ke orang yang lain.

Gejala orang yang terserang penyakit Demam Berdarah *Dengue* / DBD Badan demam panas tinggi lebih dari 2 hari. Nyeri pada ulu hati. Terdapat bercak bintik merah di kulit yang tidak hilang walau ditekan, ditarik, diregangkan dan lain sebagainya. Penderita dapat mengeluarkan darah dari hidung (mimisan), muntah darah, dan dapat melalui buang air besar. Penderita terlihat pucat, gelisah, ujung kaki dan ujung tangan dingin.

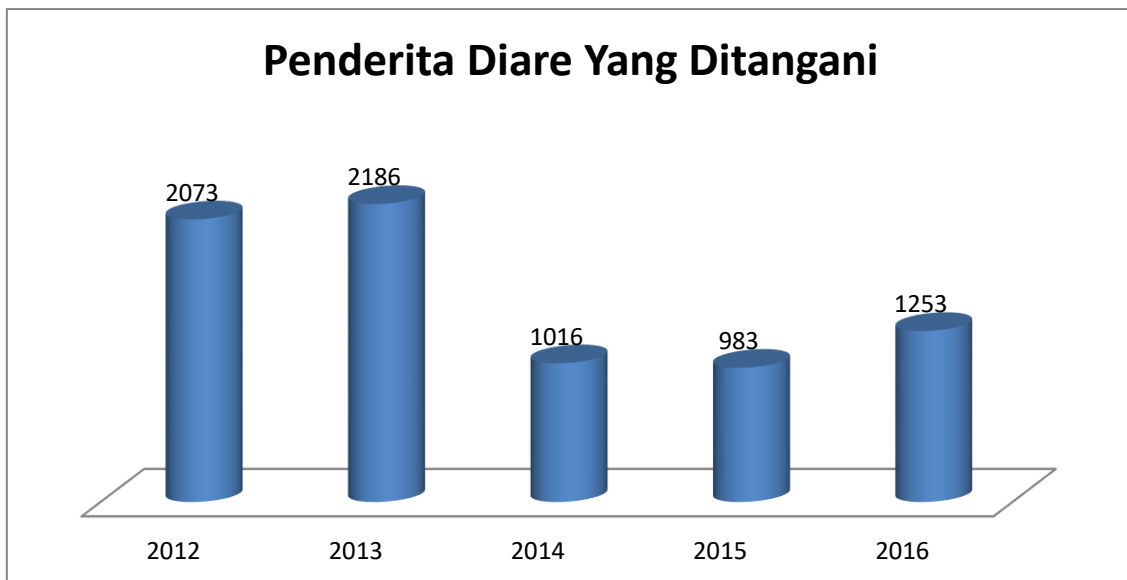
Orang yang terindikasi terserang demam berdarah harus secepatnya diberi pertolongan medis dengan dibawa ke puskesmas, dokter atau rumah sakit untuk diobati. Terlambat memberi pertolongan pada penderita DBD dapat menyebabkan penderita meninggal dunia. Serangan penyakit DBD (demam berdarah *dengue* dapat muncul kapan saja sepanjang tahun dan dapat menyerang siapa saja mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, orang yang sehat kuat hingga yang sedang sakit, orang yang tinggal di perumahan mewah sampai yang gelandangan semua dapat kena penyakit Demam Berdarah *Dengue* yang berbahaya dan mematikan.

## **12. Penderita Diare Yang Ditangani**

Diare (bahasa Inggris: *diarrhea*) adalah sebuah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit tiga kali dalam 24 jam. Di negara berkembang, diare adalah

penyebab kematian paling umum kematian balita, dan juga membunuh lebih dari 2,6 juta orang setiap tahunnya.

Menurut WHO (1999) secara klinis diare didefinisikan sebagai bertambahnya defekasi (buang air besar) lebih dari biasanya/lebih dari tiga kali sehari, disertai dengan perubahan konsisten tinja (menjadi cair) dengan atau tanpa darah. Secara klinik dibedakan tiga macam *sindroma diare* yaitu diare cair akut, disentri, dan diare persisten. Sedangkan menurut menurut Depkes RI (2005), diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja, yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar biasanya tiga kali atau lebih dalam sehari.



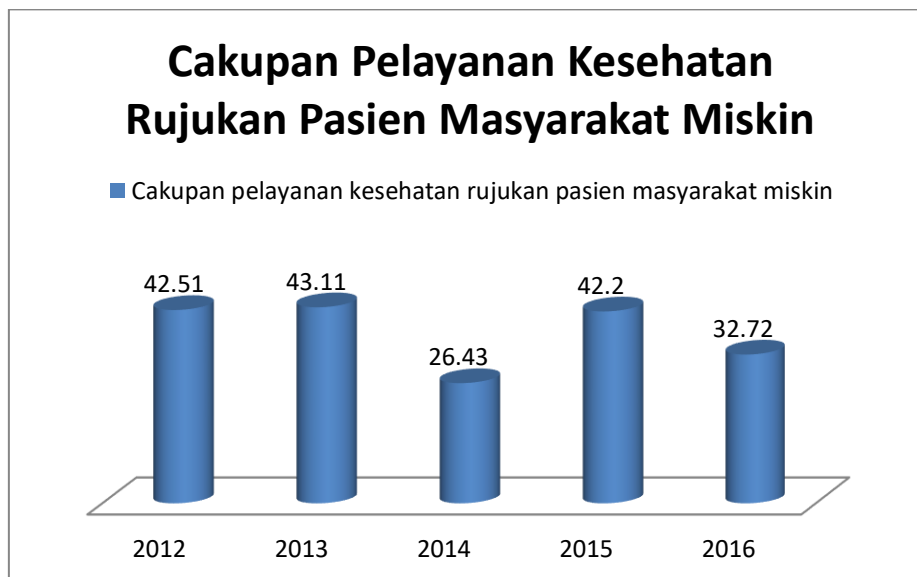
Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.47**  
**Penderita Diare Yang Ditangani**  
**Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Berdasarkan data Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, diperoleh data bahwa jumlah penderita diare yang ditemukan di Kabupaten Banggai Kepulauan berfluktuasi dengan capaian tertinggi Tahun 2013 sebanyak 2186 kasus. Jumlah penderita mengalami penurunan Tahun 2015 dengan 983 kasus namun kembali meningkat pada Tahun 2016 mencapai 1253 atau mengalami peningkatan 2,46 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Jumlah penduduk miskin diukur berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Adapun garis kemiskinan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 adalah sebesar Rp215.634,- per bulan meningkat menjadi Rp290.742,- per bulan pada Tahun 2016. Jumlah Penduduk miskin di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung menurun sepanjang tahun. Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen, dari jumlah 18.570 jiwa di Tahun 2015 meningkat menjadi 18.720 di Tahun 2016. Namun secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk menurun. Berikut ini gambar yang menunjukkan pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.48**

#### **Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Kemiskinan adalah keadaan yang tidak disukai seluruh orang namun adakalanya kemiskinan adalah sebuah keadaan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah melalui berbagai programnya mengupayakan agar masyarakat miskin mendapatkan berbagai pelayanan salah satunya pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD) Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa cakupan pelayanan pasien masyarakat miskin masih relatif rendah. Dari total penduduk miskin yang dirujuk, belum seluruhnya terlayani dengan persentase tidak mencapai 50 persen dari rujukan Pasien masyarakat miskin

#### **14. Cakupan Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah salah satu prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunankesehatan suatu wilayah kerja tertentu (Depkes 2011).

Pengertian puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Depkes, 2009).

Jika ditinjau dari sistim pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka Puskesmas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran.

**Tabel 2.25**  
**Cakupan Puskesmas Kabupaten Banggai Kepulauan (2012 – 2016)**

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Jumlah Puskesmas</b>	15	10	10	13	13
<b>Jumlah Kecamatan</b>	12	12	12	12	12
<b>Cakupan Puskesmas</b>	1,25	0,83	0,83	1,08	1,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

Jumlah puskesmas di Kabupaten Banggai Kepulauan berfluktuasi dengan jumlah yang terbanyak Tahun 2012 sebanyak 15 unit dan menurun pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebanyak 10 unit. Hingga Tahun 2016, jumlah puskesmas mencapai 13 unit puskesmas. Jumlah kecamatan di Kabupaten ini berjumlah 12 dari Tahun 2012-2016.

Berdasarkan keadaan itu cakupan puskesmas hanya dipengaruhi oleh jumlah puskesmas, dengan cakupan yang tertinggi Tahun 2012 sebesar 1,25 poin dan yang terendah Tahun 2013 dan Tahun 2014 yakni 0,83 poin angka indikator ini lebih tinggi lebih baik. Indikator ini sebagai gambaran awal tentang kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat dengan mendekatkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah kecamatan.

#### **15. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4**

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang ke empat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) sesuai standar yang ditetapkan dengan syarat:

- Satu kali dalam trimester pertama (sebelum 14 minggu);
- Satu kali dalam trimester kedua (antara minggu 14-28);
- Dua kali dalam trimester ketiga (antara minggu 28-36 dan setelah minggu ke 36);
- Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan-keluhan tertentu;
- Faktor-faktor yang mempengaruhi Ante Natal Care (ANC).

Berdasarkan data ibu hamil di Kabupaten Banggai Kepulauan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi namun yang menjadi fokus adalah jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan ibu hamil K4 tidak mencapai

100 persen kurun waktu 2012-2016. Hal ini berarti ada ibu hamil yang tidak memperoleh suplemen bagi ibu hamil.

**Tabel 2.26**  
**Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Di Kabupaten Banggai Kepulauan**

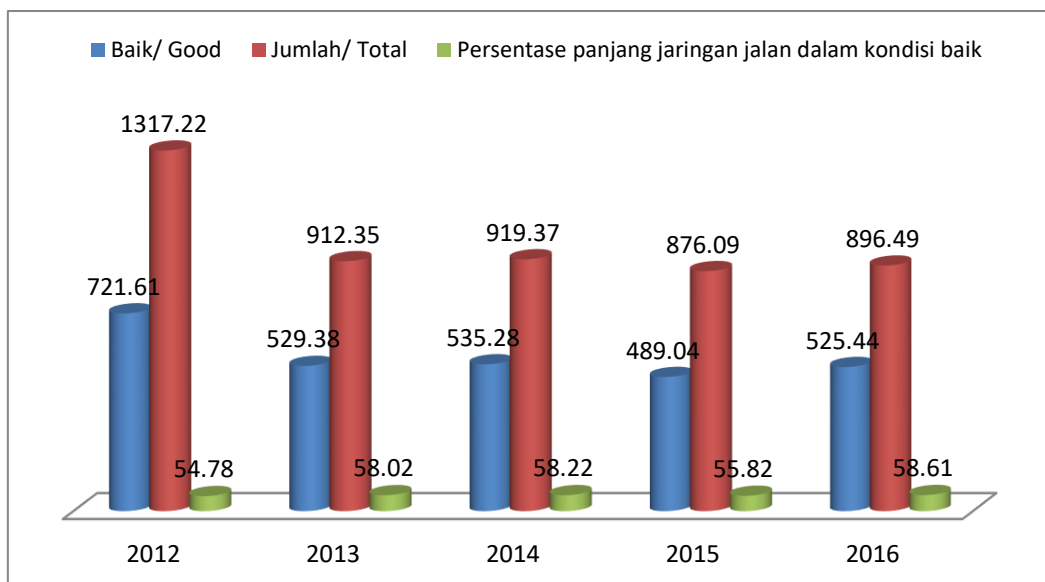
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Melakukan Kunjungan K4	3548	2003	2171	2222	2078
Jumlah Ibu Hamil	3714	2554	2757	2787	2392
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	0,96	0,78	0,79	0,80	0,87

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

### 2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar.



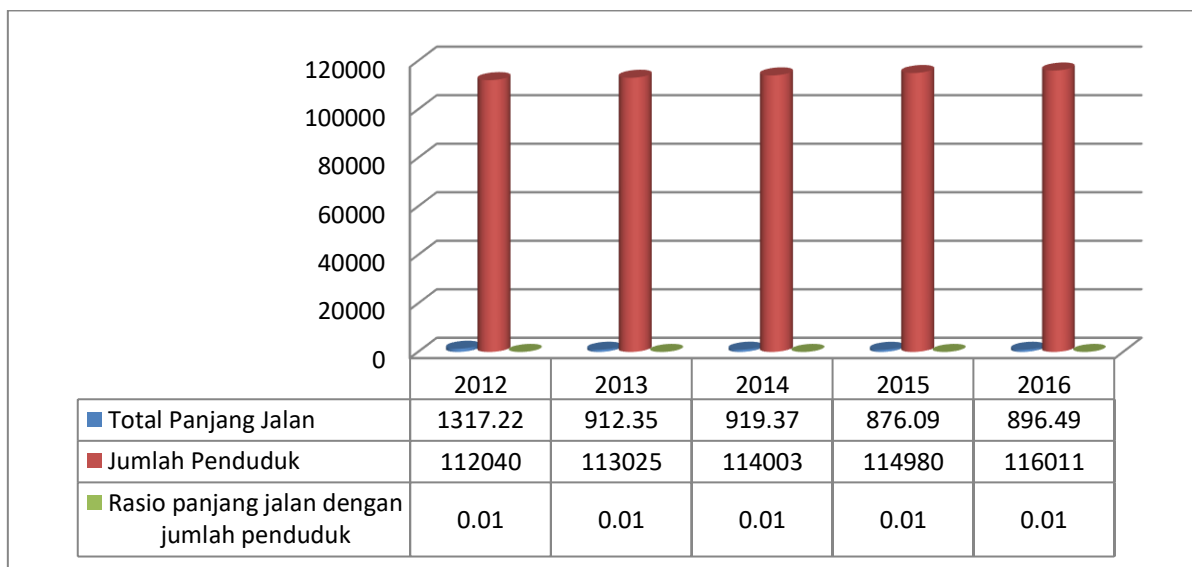
Sumber BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.49**  
**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2012 – 2016 (Dalam Km)**

### b. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini maka makin baik dengan indikasi awal makin banyak masyarakat yang dilayani.

Nilai rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Sumber dari Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

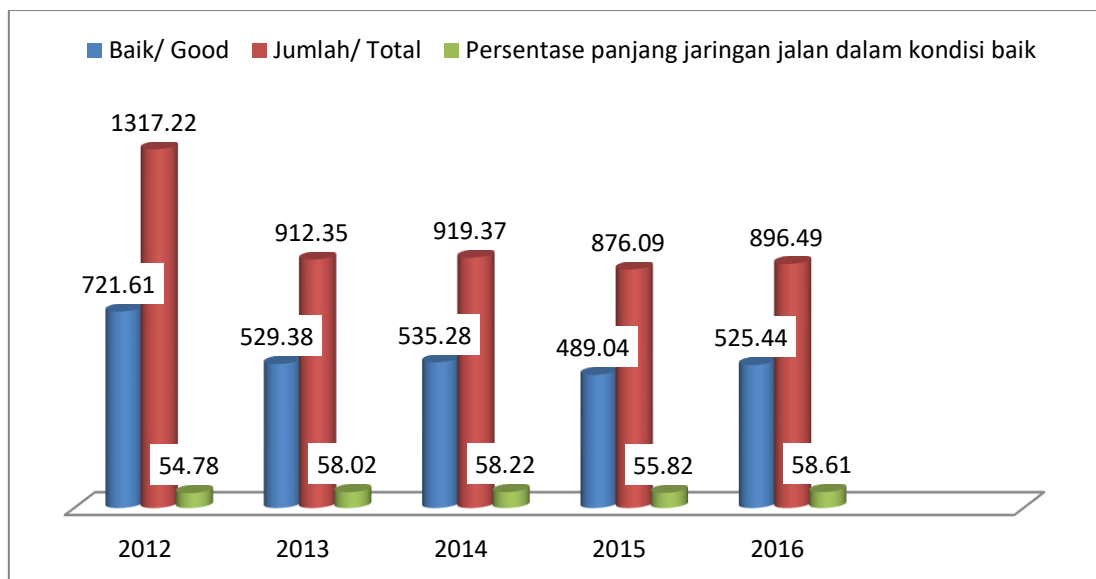
**Gambar 2.50**  
**Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Hasil perhitungan dengan membandingkan antara total panjang jalan dibagi dengan jumlah penduduk diperoleh hasil yang konstan dari Tahun 2012-2016.

### c. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)

Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah angka perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, terhadap panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Mutu jalan di suatu daerah berpengaruh terhadap berbagai kegiatan penduduk, khususnya kegiatan perdagangan dan upaya untuk melakukan integrasi antar wilayah terbelakang dengan pasar yang lebih besar.

Nilai indikator ini memiliki kegunaan untuk mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan yang ada di suatu daerah tertentu. Hal tersebut dapat juga dibaca sebagai kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana publik. Semakin besar nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana publik.



Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.51**  
**Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012 – 2016**

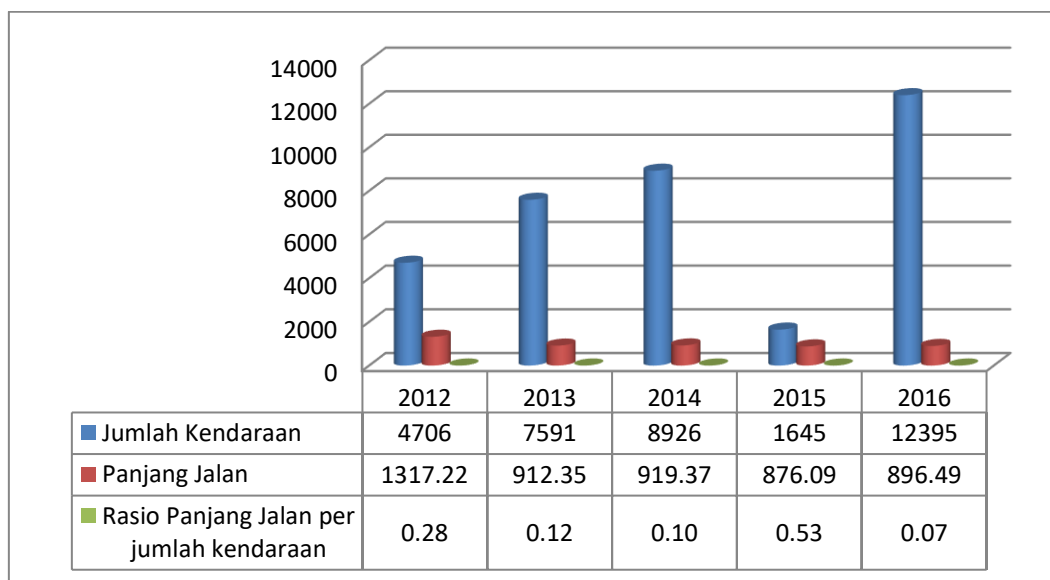
Pada pengukuran indikator ini tim mengasumsikan bahwa proporsi jalan dalam kondisi baik merupakan jalan yang dapat ditempuh dengan roda empat dengan kecepatan  $\geq 40$  Km perjam.

Berdasarkan data panjang jalan berdasarkan kondisi jalan, kurun waktu 2012-2016 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik masih di

bawah 60 persen dari total jalan. Di sisi lain, proporsi panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak parah cenderung berfluktuasi dengan proporsi yang paling besar Tahun 2012 sebanyak 35,74 persen dari total panjang jalan dan yang paling kecil Tahun 2013 dan Tahun 2014 dengan kisaran 21 persen.

#### d. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Kegunaan Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membangun fasilitas. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan daerah dalam membangun fasilitas wilayah, dan semakin mampu daerah tersebut melaksanakan otonomi.



Sumber : BPS Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.52**

#### **Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

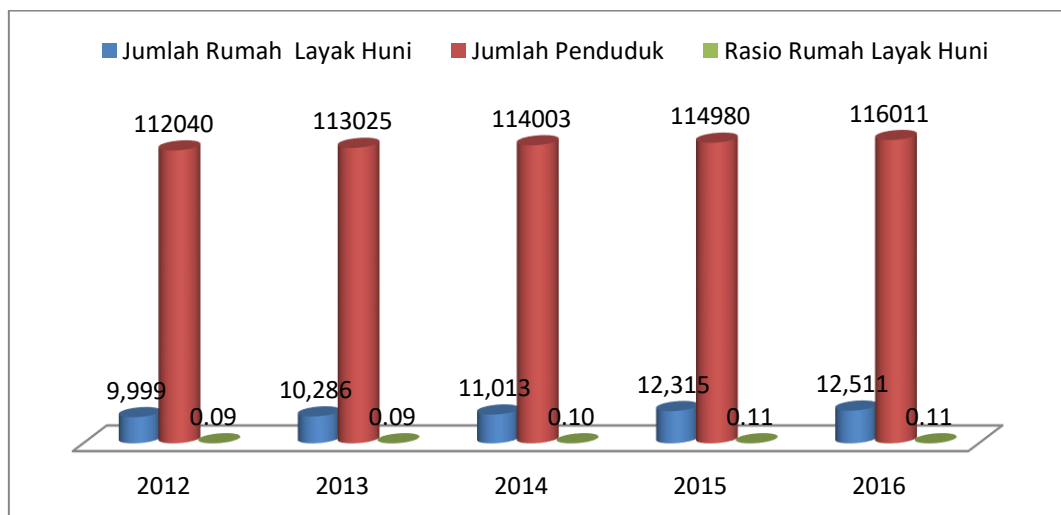
Berdasarkan data data pada gambar sebelumnya dapat dilihat bahwa rasio jumlah panjang jalan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Rasio tertinggi tahun 2015 0,53 dan yang terendah tahun 2016 sebesar 0,07. Dengan menurunnya rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan sebagai indikasi awal menurunnya kemampuan suatu daerah untuk membangun membangun fasilitas wilayah.

#### 2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

##### 1. Rasio rumah layak huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dsb) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman. Termasuk rumah gubuk. Ciri – ciri rumah tidak layak huni adalah kondisi di mana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial dengan kriteria antara lain :

- 1) Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m<sup>2</sup> sedangkan di desa kurang dari 10 m<sup>2</sup> ;
- 2) Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya ;
- 3) Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum di proses ;
- 4) Jenis lantai tanah ;
- 5) Tidak mempunyai fasilitas tempat mandi, cuci, kakus (MCK).



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.53**  
**Rasio Rumah Layak Huni**  
**Di Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2016**

Berdasarkan data yang dihimpun dari PERANGKAT DAERAH dan BPS, diperoleh bahwa kurun waktu 2012-2016 rasio jumlah rumah layak

huni mengalami peningkatan dengan rasio yang cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 rasio mencapai 0,11 yang bermakna setiap 11 rumah penduduk di Kabupaten Banggai Kepulauan terdapat 1 rumah yang tidak layak huni.

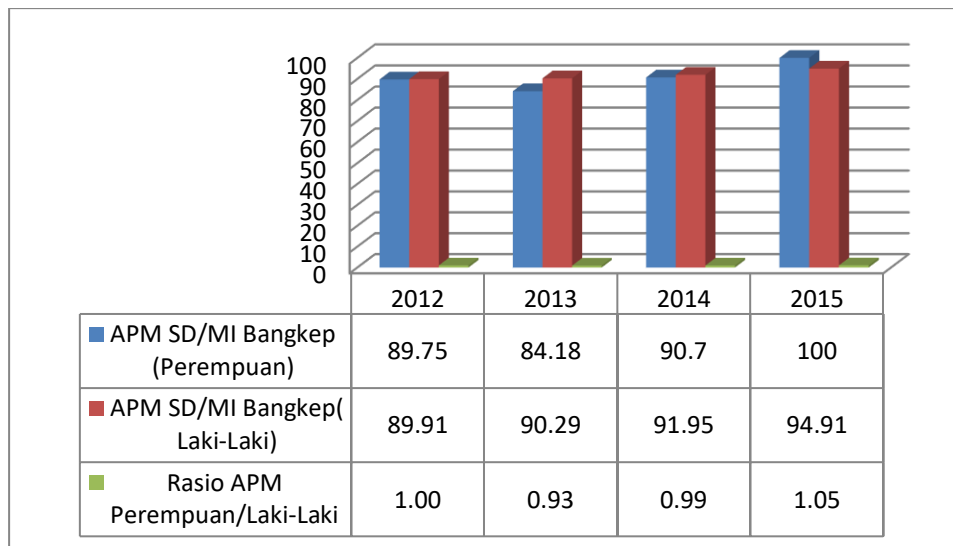
## 2.4.2 Urusan Wajib Non Dasar

### 2.4.2.1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/MI

Pendidikan adalah salah satu aspek penting dari pembangunan manusia. Untuk menghilangkan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan, akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi.

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, jika hasil perhitungan menunjukkan angka di bawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SD lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.54**

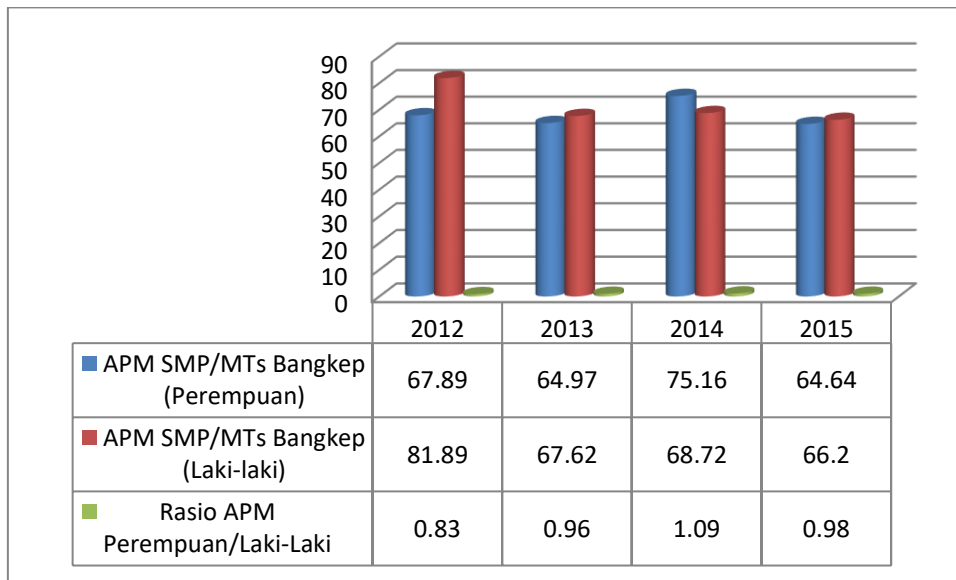
### **Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/MI Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2015**

Berdasarkan gambar yang menyajikan rasio antara APM perempuan terhadap laki-laki Tahun 2012 dan 2015 di atas 100 dan Tahun 2013 dan 2015 berada di bawah 100. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2012 dan 2015 menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan indikator tersebut, untuk kasus Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 belum sesuai dengan SDG's. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada Tahun 2019.

**2. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Tingkat SMP/MTs**

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, jika hasil perhitungan menunjukkan angka di bawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SMP/MTs lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

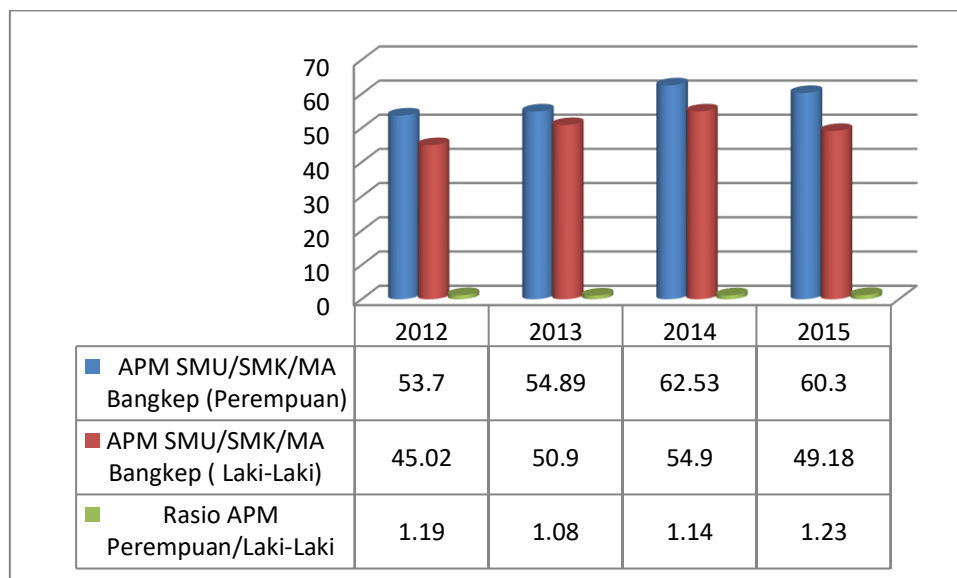
**Gambar 2.55**  
**Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP/MTs**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2015**

Berdasarkan gambar yang menyajikan rasio antara APM perempuan terhadap laki-laki Tahun 2012-2015 hanya Tahun 2014 yang di atas angka 100. Hal ini mengindikasikan bahwa pada Tahun 2014 menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut.

Berdasarkan indikator tersebut, untuk kasus Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 belum sesuai dengan SDG's. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket yang setara gender pada Tahun 2019.

### 3. Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMU/SMK/MA

Rasio APM perempuan terhadap laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu, jika hasil perhitungan menunjukkan angka di bawah 100 persen. Ini berarti bahwa pada jenjang pendidikan SMU/SMK/MA lebih banyak murid laki-laki yang bersekolah dibandingkan dengan murid perempuan. Sebaliknya, rasio APM perempuan terhadap laki-laki menunjukkan angka di atas 100 persen menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.56**

### **Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMU/SMK/MA Kabupaten Banggai Kepulauan 2012-2015**

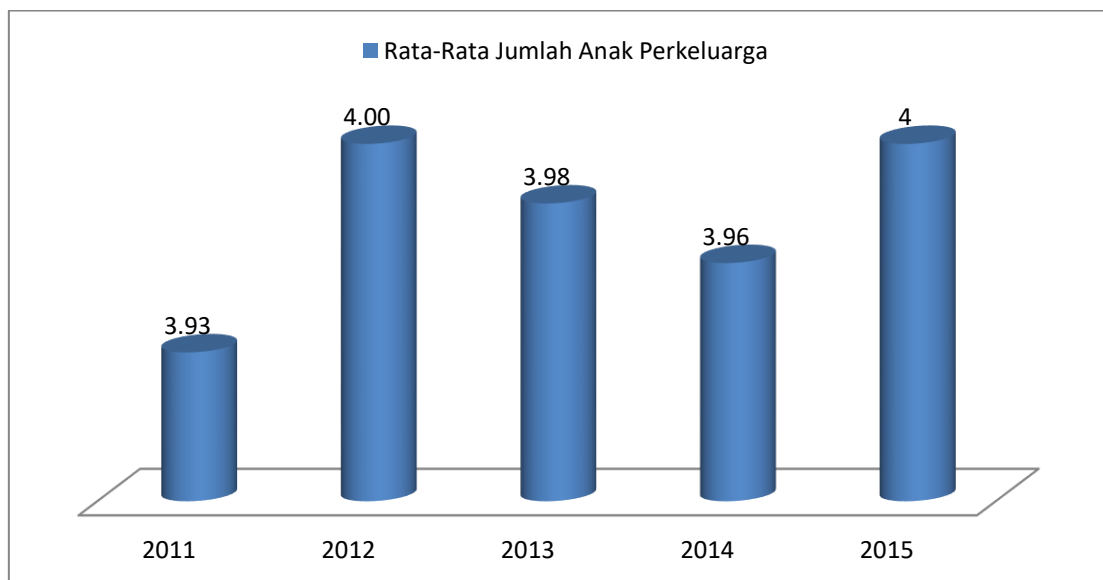
Berdasarkan gambar yang menyajikan rasio antara APM perempuan terhadap laki-laki Tahun 2012-2015 rasio di atas angka 100. Hal ini

mengindikasikan bahwa pada Tahun 2012-2015 menggambarkan murid perempuan lebih banyak dibandingkan murid laki-laki pada jenjang pendidikan tersebut.

#### 4. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah angka rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Indonesia. Tingginya kelahiran bayi di Indonesia, yang mencapai 4,2 juta setiap tahun, antara lain disebabkan oleh rendahnya partisipasi program keluarga berencana pada pasangan usia subur.

Angka idealnya rata-rata jumlah anak per keluarga di Indonesia adalah 2,1 anak. Nilai indikator ini mengukur jumlah anak dalam setiap keluarga yang mencerminkan tercapai atau tidaknya norma keluarga kecil bahagia (NKKKB) dengan ukuran rata-rata jumlah anak per keluarga 2,1. Oleh karena itu, nilai indikator ini harus dibaca terbalik, angka rata-rata jumlah anak dalam setiap keluarga di suatu daerah, menunjukkan kegagalan daerah tersebut mencapai NKKBN. Oleh karenanya semakin rendah kemampuan daerah tersebut dalam merealisasi amanat undang-undang untuk menyelenggarakan otonomi daerah.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

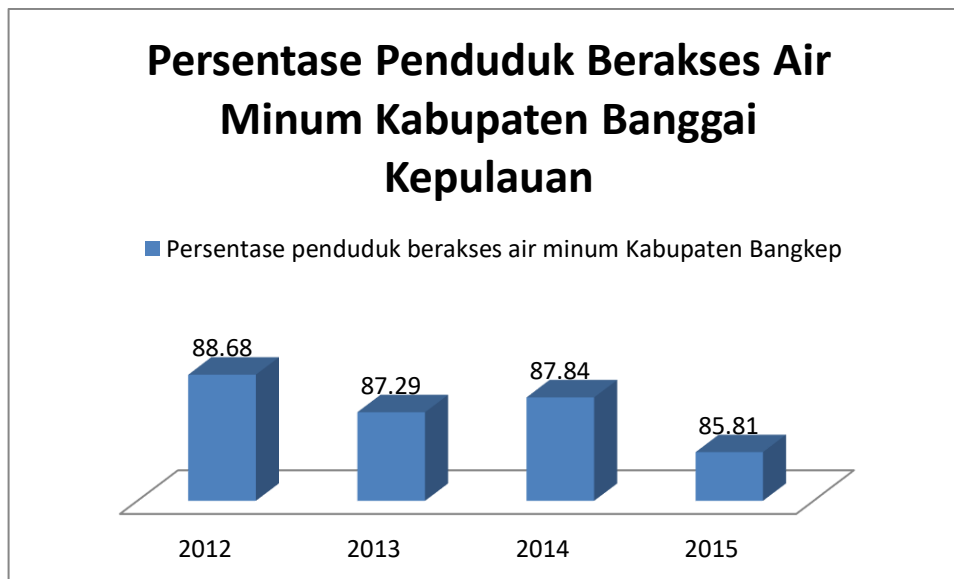
**Gambar 2.57**  
**Rata-Rata Anak Perkeluarga di Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2011-2015**

## 2.4.2.2 Lingkungan Hidup

### 1. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

Air minum (*drinking water*) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.58**

### **Persentase Jumlah Penduduk Berakses Air Minum**

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik diperoleh bahwa penduduk Banggai Kepulauan belum sepenuhnya mendapat pelayanan air minum yang sesuai dengan standar. Periode 2012-2016 persentase penduduk yang dapat mengakses air minum berkisar 88,68 persen di Tahun 2012 dan 87,53 persen pada Tahun 2016 dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

Semakin tinggi nilai prosentase penduduk yang dapat mengakses air minum sesuai dengan standar kebutuhan minimal, menunjukkan semakin mampu daerah tersebut menyediakan pelayanan kesehatan. Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada Tahun 2019 menjadi 100 persen (2014: 70 persen). Berdasarkan indikator SDG's pada Tahun 2015 sudah mencapai standar.

#### **2.4.2.3 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

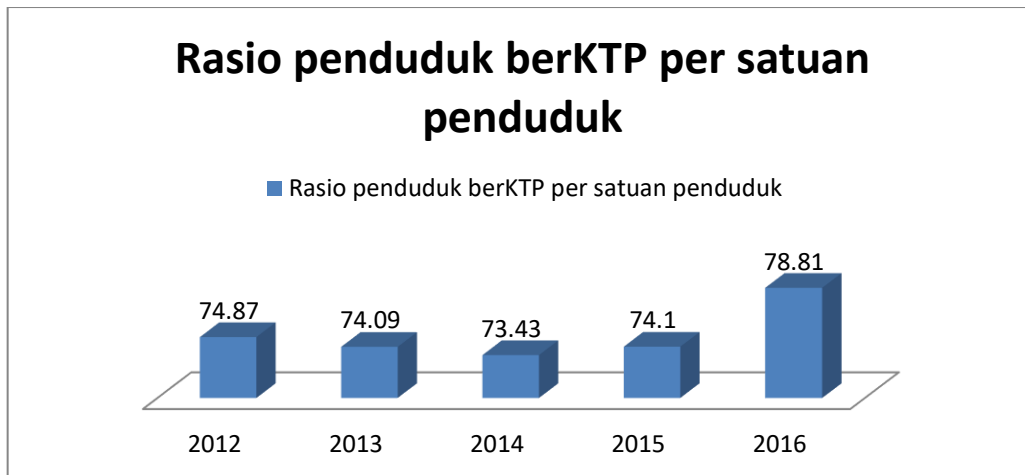
##### **1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk**

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Penduduk berumur di atas 17 tahun, atau telah/pernah menikah wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan data dari EKPD bahwa kurun waktu dari Tahun 2012-2016 persentase jumlah penduduk yang ber-KTP di Kabupaten Banggai Kepulauan cenderung meningkat dengan capaian tertinggi Tahun 2016 78,81 persen.

Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan tata administrasi kependudukan yang baik dan pelayanan daerah tersebut terhadap penduduk yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menjamin terselenggaranya tata administrasi kependudukan dan tingkat pelayanan terhadap penduduk, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.



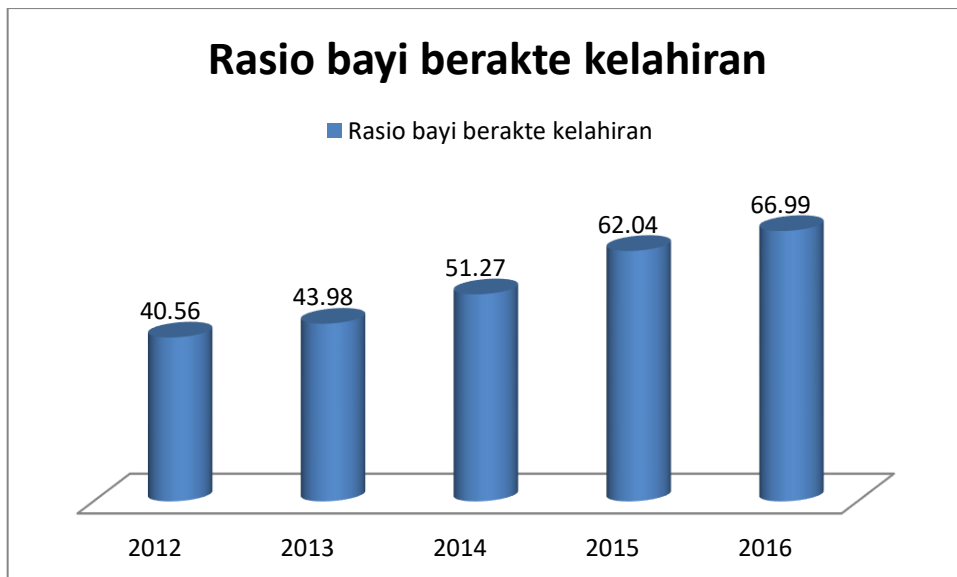
Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.59**

**Persentase Penduduk berKTP per satuan Penduduk  
Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

## 2. Rasio bayi berakte kelahiran

Persentase bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 (satu) tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.60**

**Rasio bayi berakte kelahiran Di Kabupaten Banggai Kepulauan**

Pada Tahun 2012 persentase bayi mempunyai akte kelahiran di Kabupaten Banggai Kepulauan 40,56 persen dan kurun waktu 2013-2016

terus mencapai peningkatan dengan capaian tertinggi Tahun 2016 66,99 persen.

Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan tata administrasi kependudukan yang baik dan pelayanan daerah tersebut terhadap penduduk yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menjamin terselenggaranya tata administrasi kependudukan dan tingkat pelayanan terhadap penduduk, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

### **3. Akta Nikah**

Rasio pasangan ber-akte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah dalam 1 (satu) tahun yang berakte terhadap jumlah keseluruhan pasangan nikah pada tahun yang sama.

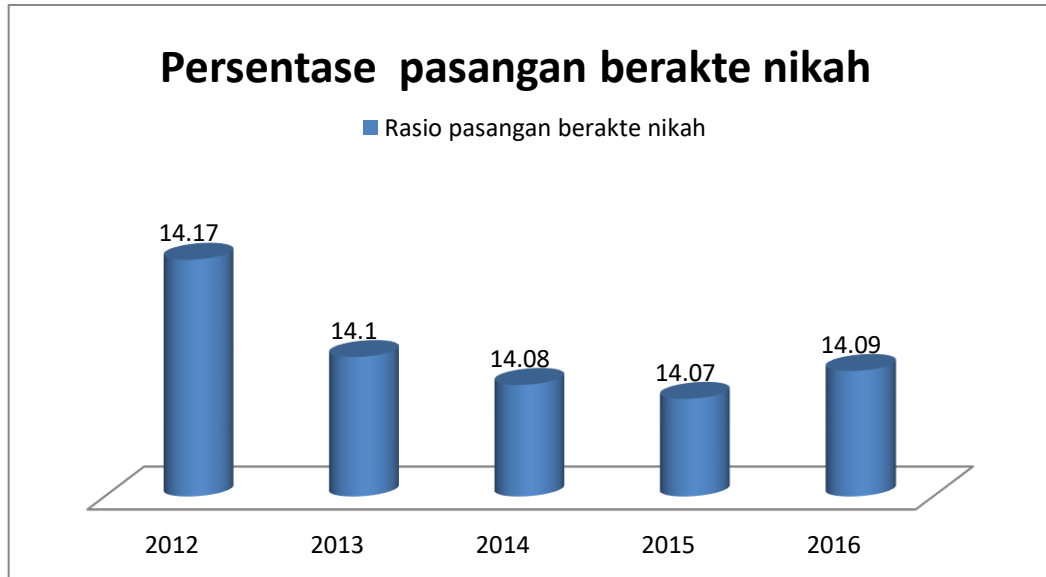
Pencatatan perkawinan wajib dilakukan oleh setiap pasangan nikah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-undang tersebut, usia perkawinan adalah 19 tahun bagi Pria dan 16 tahun bagi Wanita.

Waktu untuk mencatatkan perkawinan adalah 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Jika kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, harus dengan Dispensasi dari Camat yang harus ditandatangani Camat. Ketentuan waktu pencatatan pernikahan diwajibkan sebelum 1 (satu) bulan sejak Perkawinan menurut Agama dilangsungkan.

Nilai indikator ini mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan tata administrasi kependudukan yang baik, khususnya dalam pencatatan pernikahan, dan pelayanan daerah tersebut terhadap penduduk yang melangsungkan pernikahan di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menjamin terselenggaranya tata administrasi kependudukan dan tingkat pelayanan terhadap penduduk, dan semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Persentase pasangan berakte nikah di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016 belum mencapai 20 persen dengan capaian Tahun 2016 yakni 14,9 persen dari total pasangan nikah pada tahun yang bersangkutan.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.61**  
**Persentase pasangan berakte nikah**  
**Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

### 2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

Kerangka indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam pencapaian pembangunan. Kinerja atas layanan urusan pilihan menjadi salah satu bahagian yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut. Indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian, dan industri.

#### 2.4.3.1 Pariwisata

Pariwisata menjadi kebutuhan manusia, dengan wisata dapat menghilangkan kepenatan dan lelah serta menghilangkan stres. Pariwisata menjadi industri baru yang dapat menambah pertumbuhan ekonomi yang

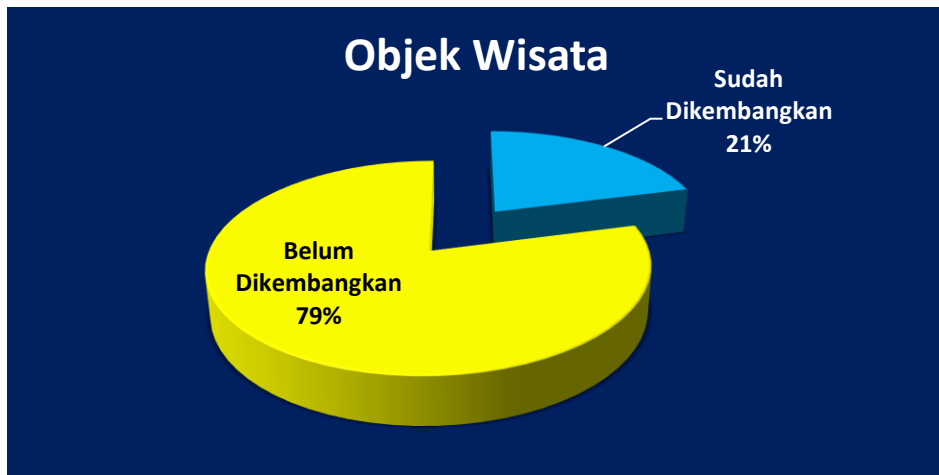
cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pengelolaan tempat-tempat wisata daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki potensi wisata yang beragam dan unik, khususnya wisata bahari. Daerah ini memiliki keindahan khas wilayah maritim, baik obyek wisata pantai pasir putih maupun bawah laut.

Pada Program Pembangunan berkelanjutan (SDG's), Pemerintah berupaya mencapai sasaran pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Diharapkan kontribusi pariwisata dapat mencapai 8 persen terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2 persen). Dan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada Tahun 2019 (2014: 9 juta).

### **1. Kunjungan Wisata**

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki objek wisata yang dapat menarik wisatawan berkunjung di tempat ini. Sebagian besar adalah objek wisata bahari sebanyak 21 objek, dan wisata alam 16 objek. Sementara untuk objek wisata agro sebanyak 4 objek dan untuk permintaan khusus sebanyak 2 objek. Namun belum semua objek wisata sudah dikembangkan. Tercatat ada 9 objek wisata yang sudah dikembangkan, di lain pihak 43 objek wisata lainnya belum dikembangkan.

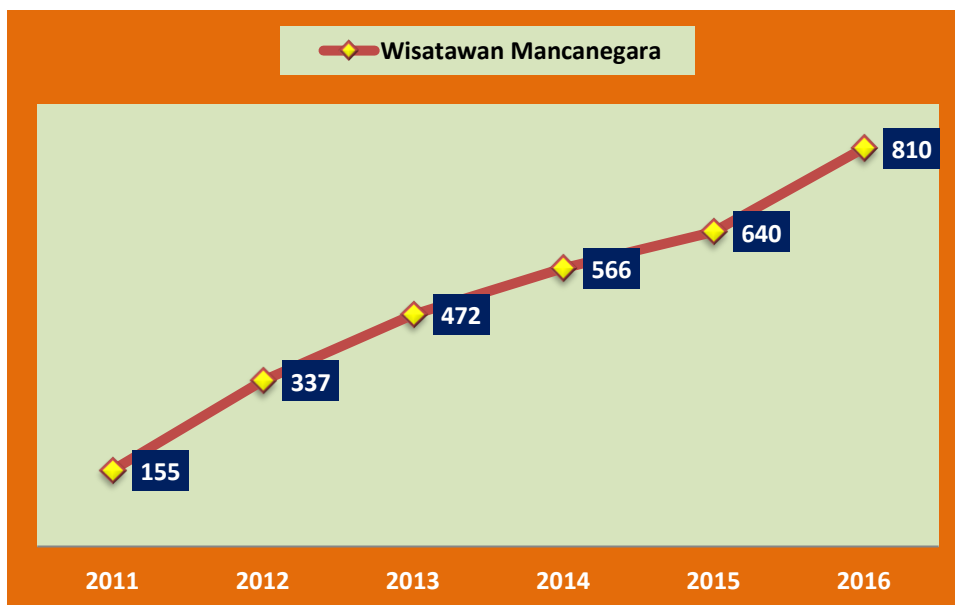
Objek wisata yang sudah dikembangkan yaitu objek wisata alam meliputi Air Terjun Tambang, Permandian Lengbola, Desa Wisata Tatendeng, dan Gua Pentu. Objek wisata permintaan khusus suatu pusat penangkaran Satwa Endemik Gagak Peling: Objek Wisata Argo yang meliputi peternakan siput/mutiara, tambak udang, budidaya rumput laut; dan wisata bahari yang meliputi Pantai Teduang, Permandian Lomboan, Pantai Mandel, dan Pantai Lalanday.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.62**  
**Pemanfaatan Objek Wisata Di Kabupaten Banggai Kepulauan**

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengalami peningkatan periode 2012-2016. Rata-rata peningkatan kunjungan wisatawan per tahun sebesar 31,73 persen. Pada Tahun 2011, jumlah kunjungan 115 orang, mengalami peningkatan terus-menerus hingga Tahun 2016 menjadi 810 orang wisatawan.

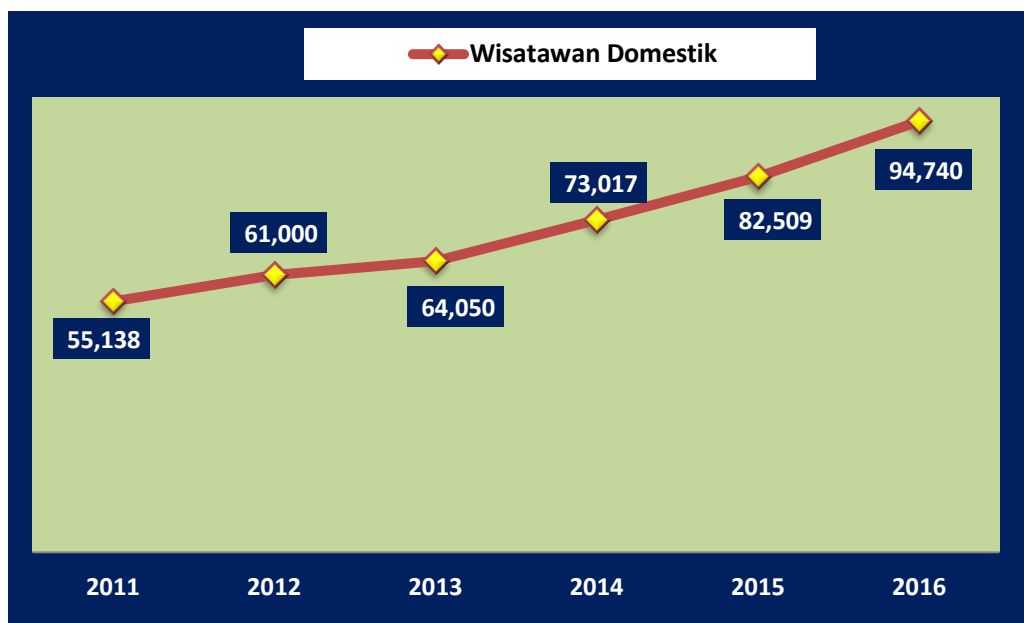


Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.63**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara Berkunjung Di Kabupaten Banggai Kepulauan**

Jumlah kunjungan wisatawan domestik juga mengalami peningkatan terus-menerus. Tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan domestik Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 82.509 orang, lebih tinggi dibandingkan kunjungan wisatawan Tahun 2014 mencapai 73.017 orang. Hal ini menunjukkan Kabupaten Banggai Kepulauan secara perlahan mulai dikenal oleh wisatawan domestik bahkan di mancanegara.

Pada Tahun 2015, jumlah akomodasi hotel yang tersedia di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah 8 buah, dan jumlah restoran/rumah makan adalah 3 buah. Hotel-hotel dan restoran/rumah makan tersebut berada di Kecamatan Tinangkung.



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.64**  
**Jumlah Wisatawan Domestik Berkunjung**  
**Di Kabupaten Banggai Kepulauan**

#### 2.4.3.2 Pertanian

##### 1. Kontribusi Sektor Pertanian /Perkebunan Terhadap Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan mengalami penurunan terus menerus sejak Tahun 2012-2015. Tahun 2012 sektor pertanian/perkebunan memberikan kontribusi sebesar 25,22 persen terhadap PDRB Kabupten Banggai Kepulauan, dan Tahun 2015 kontribusi

pertanian/perkebunan turun menjadi 23,88 persen. Tanaman hortikultura semusim, dan tanaman perkebunan memegang peranan penting terhadap pembentukan nilai sektor pertanian/perkebunan Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2012-2015, namun kontribusinya menunjukkan trend yang menurun. Pada Tahun 2012 kontribusi tanaman hortikultura semusim sebesar 4,03 persen, turun menjadi 3,62 persen di Tahun 2015. Di lain pihak, tanaman perkebunan Tahun 2012 kontribusi sebesar 15,28 persen, turun menjadi 14,52 persen di Tahun 2015.

**Tabel 2.27**  
**Kontribusi Sektor Pertanian /Perkebunan Berdasar Harga Konstan (2010) Terhadap Terhadap PDRB Tahun 2012-2015**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Pertanian/Perkebunan (juta rupiah)	452.025,5	476.484,4	499.507,2	523.555,3
PDRB Kabupaten Banggai Kepulauan (juta rupiah)	1.792.017,6	1.920.748,2	2.056.627,0	2.192.338
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (%)	25,22	24,81	24,29	23,88

Sumber : Banggai Kepulauan Dalam Angka 2013-2016, data diolah

## 2. Kontribusi Sektor Pertanian (Pangan) Terhadap PDRB

Ukuran pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan prioritas yang telah digariskan pada sektor pertanian utamanya sub sektor pertanian tanaman pangan adalah terjaminnya pelestarian swasembada pangan dengan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi yang didukung berbagai program penunjang peningkatan produksi.

Kontribusi sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan terus-menerus sejak Tahun 2012-2015. Tahun 2012, tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar 10,76 persen terhadap PDRB pertanian/perkebunan Kabupten Banggai Kepulauan, dan Tahun 2013 kontribusi sektor pertanian/perkebunan turun menjadi 10,43 persen, penurunan ini terus terjadi hingga Tahun 2015, kontribusi pertanian/perkebunan menjadi 9,51 persen.

**Tabel 2.28**  
**Kontribusi Tanaman Pangan Berdasar Harga Konstan 2010**  
**Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2012-2014**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Tanaman Pangan (juta rupiah)	48.650,5	49.681,2	49.719,8	49.776,8
Pertanian/Perkebunan (juta rupiah)	452.025,5	476.484,4	499.507,2	523.555,3
Kontribusi Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan (%)	10,76	10,43	9,95	9,51

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2013-2016

### 3. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Perkebunan tahunan berperan penting dalam pembentukan sektor pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan. Perkebunan tahunan dengan kontribusi terbanyak dibandingkan tanaman pangan, dan tanaman hortikultura.

Kontribusi perkebunan tahunan mengalami peningkatan terus-menerus sejak Tahun 2012-2015. Tahun 2012, perkebunan tahunan memberikan kontribusi sebesar 61,25 persen terhadap PDRB pertanian/perkebunan Kabupten Banggai Kepulauan, dan Tahun 2015 kontribusi pertanian/perkebunan meningkat menjadi 64,35 persen.

**Tabel 2.29**  
**Kontribusi Perkebunan Tahunan Berdasar Harga Konstan 2010**  
**Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan Tahun 2012-2015**  
**(Juta Rupiah)**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Perkebunan Tahunan	276.879,3	296.712,0	316.259,6	336.920,2
PDRB Pertanian/Perkebunan	452.025,5	476.484,4	499.507,2	523.555,3
Kontribusi Sektor Perkebunan Tahunan Terhadap PDRB Pertanian/Perkebunan (%)	61,25	62,27	63,31	64,35

Sumber : Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2013-2016

Perkebunan menjadi hal penting dalam perekonomian suatu daerah, perkebunan dapat memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian daerah, bahkan bagi perekonomian nasional. Dengan meningkatnya peran sub sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional diharapkan dapat memperkuat pembangunan perkebunan secara menyeluruh. Sektor perkebunan menjadi sektor strategis dengan nilai ekonomi tinggi.

**Tabel 2.30**  
**Luas Area Perkebunan Di Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2012-2016**

Jenis Komoditi	Luas Area (Ha)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kelapa Dalam	32340,99	13213,30	20205,7	13977,75	13979,75
Kakao	8662,07	4502,03	7009,5	4325,51	3582,60
Kopi Robusa	80,60	39,30	66,7	30,40	29,70
Cengkeh	5687,02	2842,76	4083,5	2898,95	2957,67
Jambu Mete	8478,27	3612,61	6168,9	2689,97	2584,34
Kemiri	1280,86	626,91	1236,0	626,26	631,31
Vanili	159,89	67,56	121,3	48,90	46,49
Lada	23,45	6,63	23,1	4,06	3,96
Pala	758,34	259	988,8	266	266,00
Kapuk	21,0	17,50	19,5	14,30	3,30

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2013-2016, data diolah

Jenis tanaman perkebunan yang diusahakan di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu kelapa, kakao, cengkeh, jambu mente, kemiri, vanili, kopi rombusta, lada, pala, dan kapuk. Berdasarkan luas area (ha) periode 2012-2016 luas area panen terluas adalah tanaman kelapa dalam, dan kakao. Luas area tanaman kelapa dalam dan kakao Tahun 2012 masing-masing sebesar 32.340,99 ha, dan 8.662,070 ha. Namun luas area perkebunan

tanaman kelapa dalam menurun hingga Tahun 2016 menjadi 13.979,75 ha, dan kakao luas area menjadi 3.582,60 ha. Seluruh jenis tanaman perkebunan mengalami penurunan luas area perkebunan di Tahun 2016 dibandingkan Tahun 2015.

**Tabel 2.31**  
**Produksi Perkebunan Di Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2012-2016**

Jenis Komoditi	Produksi (Ton)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kelapa Dalam	17055,350	10929,43	10830,75	10263,00	10027,50
Kakao	4174,820	3573,30	3062,93	2491,29	1869,01
Kopi Robusa	7,520	6,80	4,39	2,96	2,95
Cengkeh	1183,22	970,29	114,42	801,51	837,40
Jambu Mete	884,50	737,38	519,31	401,72	376,20
Kemiri	263,08	166,72	163,08	133,59	201,83
Vanili	6,86	6,71	3,97	2,96	2,53
Lada	1,1	1,06	1,13	3,37	0,52
Pala	79,67	76,37	77,38	62,21	62,21
Kapuk	5,00	5,42	4,51	4,12	1,14

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2013-2017, data diolah

Menurut data produksi perkebunan, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016 menunjukkan produksi tanaman kelapa dalam dan kakao paling besar dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Pada Tahun 2015 produksi tanaman kelapa dalam mencapai 10.263,00 ton, penurunan yang cukup besar dibandingkan produksi tahun 2012 yaitu 17.055,35 ton. Produksi tanaman kakao Tahun 2015 sebesar 2.491,29 ton, lebih kecil dibandingkan produksi kakao Tahun 2012 sebesar 4.174,82 ton. Selain penurunan produksi tanaman kelapa dalam dan kakao, produksi tanaman jambu mente juga menurun di Tahun 2015, menurut data BPS produksi jambu mente Tahun 2014 sebesar 519,31 ton turun menjadi 401,72 ton atau turun menjadi (-22,64 persen) Tahun 2015. Produksi tanaman perkebunan Tahun 2015 mengalami penurunan di seluruh jenis tanaman.

Pada Tahun 2016, sebagian besar produksi perkebunan mengalami penurunan produksi, kecuali produksi tanaman cengkeh, dan kemiri justru mengalami peningkatan produksi dibandingkan Tahun 2015, peningkatan produksi masing-masing sebesar 4,48 persen dan 51,08 persen. Di sisi lain, tanaman pala dengan produksi Tahun 2016 sama besar dengan produksi Tahun 2015, yaitu 62,21 ton.

**Tabel 2.32**  
**Produktivitas Perkebunan Di Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2012-2016**

Jenis Komoditi	Produktivitas (Ton/Ha)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kelapa Dalam	0,527	0,827	0,536	0,734	0,717
Kakao	0,482	0,794	0,437	0,576	0,522
Kopi Robusa	0,093	0,173	0,066	0,097	0,099
Cengkeh	0,208	0,341	0,028	0,276	0,283
Jambu Mete	0,104	0,204	0,084	0,149	0,146
Kemiri	0,205	0,266	0,132	0,213	0,320
Vanili	0,043	0,099	0,033	0,061	0,054
Lada	0,047	0,160	0,049	0,830	0,131
Pala	0,105	0,295	0,078	0,234	0,234
Kapuk	0,238	0,310	0,231	0,288	0,345

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2013-2017, data diolah

Pada uraian sebelumnya disebutkan luas area perkebunan yang menurun mengakibatkan produktivitas perkebunan juga menurun. Selain luas area perkebunan, faktor cuaca juga mempengaruhi produksi perkebunan. Produktivitas perkebunan Kabupaten Banggai Kepulauan rentang waktu 2012-2013 mengalami peningkatan produktivitas. Tahun 2013 kelapa dalam dan kakao dengan produktivitas terbanyak, yaitu 0,827 ton/ha, dan 0,794 ton/ha. Namun pada Tahun 2014 secara menyeluruh produktivitas tanaman perkebunan menurun, dan Tahun 2015 produktivitas tanaman perkebunan kembali meningkat dibandingkan Tahun 2014. Pada Tahun 2016 terdapat empat jenis tanaman perkebunan

dengan produktivitas yang meningkat, yaitu kopi robusa, cengkeh, kemiri, dan kapuk. Tanaman perkebunan dengan produktivitas menurun, yaitu kelapa dalam, kakao, jambu mente, vanili, dan lada.

#### **4. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Komoditas pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan luas panen, padi sawah dengan luas panen terbesar dibandingkan luas panen komoditas lainnya. Pada Tahun 2011 luas panen padi sawah Kabupaten Banggai Kepulauan seluas 640 ha, mengalami peningkatan menjadi 961 ha di Tahun 2012 dan 1001 ha di Tahun 2013. Namun pada Tahun 2014 luas panen turun menjadi 615 ha, dan kembali meningkat menjadi 856 ha (39,51 persen) di Tahun 2015. Pertambahan luas panen Tahun 2015 karena adanya peranan dari pemerintah, yakni program OPL (Optimasi Penggunaan Lahan) di beberapa wilayah potensi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

#### **5. Padi dan Bahan Pangan Utama Lokal**

Pertambahan luas panen padi sawah berdampak positif terhadap produksi yang dihasilkan. Rata-rata pertumbuhan produksi padi sawah periode 2011-2015 sebesar 13,82 persen. Tahun 2011 produksi padi sawah sebanyak 2512 ton, dan Tahun 2012 meningkat menjadi 3.495 ton, peningkatan produksi seiring dengan pertambahan luas panen. Pada Tahun 2014 luas panen turun sebesar 38,56 persen, mengakibatkan produksi mengalami penurunan menjadi 2.291 ton atau turun sebesar (-14,4 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun Tahun 2015 produksi padi sawah kembali meningkat menjadi 3.452 ton (11,61 persen) dibandingkan Tahun 2014.

Padi menjadi komoditas utama di Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perluasan area persawahan perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Selain padi sawah, sejak Tahun 2015 komoditas padi ladang mulai dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kecamatan Tinangkung Utara menjadi daerah yang

mengusahakan padi ladang dengan luas panen 1 ha. Besaran kenaikan padi ladang tidak sama dengan padi sawah. Tahun 2015 produksi padi ladang sebanyak 2 ton, namun Tahun 2013 dan Tahun 2014 produksi padi ladang belum menghasilkan karena belum dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Meningkatnya produksi padi di Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai harapan dari program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Pagi, Jagung, dan Kedelai). Secara Nasional, Kabupaten Banggai Kepulauan bukanlah kabupaten potensi padi jika dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk meningkatkan produksi padi pemerintah melakukan program GEMA PALAGUNG 2001, Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) yang dicanangkan sejak Tahun 2006, dan program terbaru pemerintah yaitu program UPSUS PAJALE. Dengan program tersebut diharapkan akan meningkatkan produksi padi nasional, termasuk Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kabupaten Banggai Kepulauan tidak hanya mengembangkan padi, namun pengembangan komoditas palawija juga diusahakan di daerah ini. Komoditas palawija misalnya kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.

Komoditas palawija khususnya kacang tanah dengan produksi terbanyak dibandingkan komoditas palawija lainnya. Pada Tahun 2011 produksi kacang tanah sebanyak 2.063 ton, mengalami peningkatan produksi hingga Tahun 2014 menjadi 11.920 ton, namun Tahun 2015 sedikit mengalami penurunan produksi (1,68 persen). Penurunan produksi kacang tanah signifikan dengan penurunan luas panen, yaitu pada Tahun 2014 luas panen kacang tanah 779 ha dan produksi sebesar 11.920 ton, namun Tahun 2015 luas panen turun menjadi 776 ha, dengan tingkat produksi sebesar 11.720 ton. Hal ini menunjukkan bahwa luas panen berpengaruh terhadap produksi.

Perkembangan produksi tanaman palawija (jagung, kacang hijau, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar) periode Tahun 2014-2015 memperlihatkan adanya kenaikan maupun penurunan pada setiap komoditi. Tahun 2015 produksi jagung dan ubi kayu mengalami peningkatan masing-masing

sebesar 4,53 persen dan 7,86 persen dibandingkan Tahun 2014. Di lain pihak, produksi kedelai dan ubi jalar Tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar 25 persen dan 24,97 persen.

**Tabel 2.33**  
**Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Utama Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Banggai Kepulauan**

Deskripsi	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Luas Panen (Ha)</b>					
Padi Sawah	640	961	1001	615	858
Padi Ladang	0	0	0	0	1
Jagung	609	165	286	114	117
Kacang Tanah	1193	747	712	779	776
Kacang Hijau	3	0	1	0	3
Kedelai	6	1	2	4	3
Ubi Kayu	381	131	135	134	180
Ubi Jalar	280	85	125	101	89
<b>Produksi (Ton)</b>					
Padi Sawah	2.512	3.495	3.731	2.291	3.452
Padi Ladang	-	-	-	-	2
Jagung	1.828	456	1.064	375	392
Kacang Tanah	2.063	9.510	14.130	11.920	11.720
Kacang Hijau	20	-	10	-	20
Kedelai	60	1	20	4	3
Ubi Kayu	8.233	2.678	2.889	3.461	3.733
Ubi Jalar	3030	922	1.086	929	697

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2014-2017, data diolah

Luas panen yang berkurang menyebabkan hasil produksi menurun, Tahun 2015 luas panen kedelai 3 ha atau turun 25 persen. Di lain pihak, ubi jalar menurun menjadi sebesar 89 ha atau turun sebesar 11,88 persen dibandingkan luas panen Tahun 2014. Tanaman kedelai masuk dalam komoditi UPSUS PAJALE secara nasional, namun kedelai bukan sasaran dari program ini. Proses penanaman dan pemanenan tanaman palawija masih dikelola secara swadaya oleh petani, pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan diharapkan dapat memberikan bantuan kepada petani untuk lebih meningkatkan produksi pertaniannya.

**Tabel 2.34**  
**Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan**  
**Tahun 2011-2016**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan**

<b>Produktivitas (Ton/Ha)</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Padi Sawah	3,93	3,64	3,73	3,73	4,02	3,92
Padi Ladang	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Jagung	3,00	2,76	3,72	3,29	3,35	4,86
Kacang Tanah	11,73	12,73	19,85	15,30	15,10	11,68
Kacang Hijau	6,67	0,00	10,00	0,00	6,67	0,9
Kedelai	10,00	0,78	10,00	1,00	1,00	0
Ubi Kayu	21,61	20,44	21,40	25,83	20,74	15,60
Ubi Jalar	10,82	10,85	8,69	9,20	7,83	7,28

Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka Tahun 2012-2017, data diolah

Tabel 2.34 menunjukkan perkembangan produktivitas tanaman palawija (jagung, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar). Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan output dengan input. Produktivitas dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan petani dalam produksi pertanian. Untuk mengetahui besarnya produktivitas suatu produksi pertanian, maka produksi tanaman dibagi dengan luas tanaman pertanian yang dimaksud.

Perkembangan produktivitas tanaman padi sawah dan tanaman palawija Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2012-2016 berfluktuatif. Padi sawah, menjadi salah satu tanaman pangan yang produktivitasnya berfluktuatif, pada Tahun 2012 produktivitas padi sawah sebesar 3,64 ton/ha, dan Tahun 2013 dan 2014 produktivitas naik menjadi 3,73 ton/ha, Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 4,04 ton/ha, dan tahun 2016 produktivitas padi sawah turun menjadi 3,92 ton/ha.

Menurut tabel 2.34 peningkatan produktivitas padi khususnya padi sawah karena adanya pergerakan luas panen, dan pemerintah melakukan program OPL (Optimasi Penggunaan Lahan) di beberapa wilayah potensi padi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tanaman jagung produktivitasnya juga berfluktuatif, yakni pada Tahun 2012 produktivitas jagung sebesar 2,76 ton/ha, dan Tahun 2013 produktivitas naik menjadi 3,72 ton/ha. Namun Tahun 2014-2016 produktivitas tanaman jagung mengalami peningkatan terus-menerus, sampai Tahun 2016 produktivitas jagung sebesar 4,86 ton/ha. Tahun 2016 menjadi capaian tertinggi produktivitas tanaman jagung di Kabupaten Banggai Kepulauan

Tanaman jagung menjadi salah satu komoditi yang dijadikan objek dalam program UPSUS PAJALE, hasilnya belum nampak terlihat karena adanya kemarau panjang di Tahun 2015, sehingga terjadi kemunduran waktu tanam dan waktu panen.

Dalam SDGs dituangkan bahwa dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan menjadi tantangan untuk mewujudkannya. Sasaran Global bahwa pada Tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan. Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi sasaran nasional RPJMN.

## **6. Hortikultura**

Hortikultura berasal dari bahasa latin yakni "*hortus*" (tanaman kebun) dan "*cultura/colere*" (budidaya), sehingga dapat diartikan sebagai tanaman yang dibudidayakan di sekitar rumah atau kebun. Istilah hortikultura saat ini sering digunakan untuk menyebut beberapa jenis tanaman yang dapat dibudidayakan, Sistem *hortikulturan* sering digunakan dalam proses pertanian modern. Tumbuhan hortikultura berupa sayuran, buah, daun atau hias, dan juga tanaman hias. Tanaman hortikultura khususnya sayur-sayuran yang diproduksi di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu bawang merah, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terung, ketimun, kangkung, dan bayam.

**Tabel 2.35**  
**Luas Panen Tanaman Sayur-Sayuran**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013-2016**

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)			
	2013	2014	2015	2016
Kacang Panjang	88	93	43	78
Cabe Besar	13	3	2	
Cabe Rawit	58	68	56	69
Tomat	88	94	62	83
Terung	67	61	45	58
Ketimun	32	42	14	
Kangkung	50	49	41	69
Bayam	70	54	42	69
<b>Luas Panen</b>	<b>466</b>	<b>464</b>	<b>305</b>	<b>426</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2014-2017, data diolah

Sejak Tahun 2013-2015 luas panen hortikultura khususnya sayur-sayuran di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami penurunan 3,04 persen. Pada Tahun 2013 luas panen hortikultura 466 ha, dan Tahun 2014-2015 mengalami penurunan luas panen menjadi 464 ha dan 305 ha atau turun sebesar 33,62 persen.

Tanaman hortikultura yang mengalami penurunan luas panen dari Tahun 2013-2014 yaitu cabe besar, terung, kangkung, dan bayam. Namun tanaman hortikultura yang mengalami peningkatan luas panen yaitu kacang panjang, cabe rawit, tomat, dan ketimun.

Tanaman kacang panjang dan tomat memiliki luas panen terbesar dibandingkan tanaman lainnya. Pada Tahun 2015 secara menyeluruh luas panen tanaman hortikultura mengalami penurunan. Luas panen yang mendominasi pada Tahun 2015 yaitu tomat dan cabe rawit, masing-masing sebesar 62 ha dan 56 ha. Sementara, tanaman dengan luas panen paling rendah yaitu cabe besar dan ketimun, masing-masing sebesar 2 ha dan 14 ha.

**Tabel 2.36**  
**Perkembangan Produksi Sayur-Sayuran**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013-2016**

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
Kacang Panjang	245	249,3	113,7	210,9
Cabe Besar	32,5	7,6	5,1	-
Cabe Rawit	138,1	205,5	172,4	247,4
Tomat	267	335,6	219,7	361,7
Terung	180,9	183,1	138,1	228
Ketimun	105,2	135,3	43,3	-
Kangkung	230	231,5	171	331,5
Bayam	90,9	63,3	51,6	86,9
<b>Jumlah Produksi</b>	<b>1289,6</b>	<b>1411,2</b>	<b>919,8</b>	<b>1466,4</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2014-2017, data diolah

Perkembangan produksi sayur-sayuran periode 2013-2014 menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,43 persen. Tahun 2015 produksi sayur-sayuran sebesar 919,8 ton atau mengalami penurunan 34,82 persen dibandingkan produksi Tahun 2014 sebanyak 1411, 2 ton. Tahun 2015 secara keseluruhan terjadi penurunan produksi sayur-sayuran di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tanaman cabe dan tomat mendominasi produksi sayur-sayuran Tahun 2015, masing-masing memproduksi sebanyak 172,4 ton dan 219,7 ton. Tahun 2016 produksi sayur-sayuran secara menyeluruh mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, produksi tertinggi adalah tomat dan kangkung, masing-masing 361,7 ton dan 331,5 ton.

Perkembangan produktivitas tanaman sayur-sayuran Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2013-2014 menunjukkan peningkatan produktivitas, Tahun 2013 produktivitas sayur-sayuran 2,77 ton/ha, meningkat menjadi 3,04 ton/ha di Tahun 2014. Namun Tahun 2015 produktivitas turun menjadi 3,02 ton/ha. Penurunan produktivitas disebabkan karena luas panen yang menurun, di samping itu faktor cuaca yang tidak menentu.

Keterbatasan produksi lokal tanaman sayur-sayuran, maka untuk memenuhi kebutuhan seperti kubis/kol, wortel, dan buncis diperlukan pasokkan dari luar wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Tabel 2.37**  
**Perkembangan Produktivitas Sayur-Sayuran**  
**Tahun 2011-2016**

Jenis Tanaman	Produktivitas (ton/ha)			
	2013	2014	2015	2016
Kacang Panjang	2,78	2,68	2,64	2,70
Cabe Besar	2,50	2,53	2,55	
Cabe Rawit	2,38	3,02	3,08	3,59
Tomat	3,03	3,57	3,54	4,36
Terung	2,70	3,00	3,07	3,93
Ketimun	3,29	3,22	3,09	
Kangkung	4,60	4,72	4,17	4,80
Bayam	1,30	1,17	1,23	1,26

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2014-2017, data diolah

Pada Tahun 2013-2016 tanaman tomat mendominasi produktivitas dibandingkan sayur-sayuran lainnya. Pada Tahun 2013 khusus pada tanaman kacang panjang, cabe rawit, cabe besar, tomat, terung dan kangkung. produksi tomat sebesar 3,03 ton/ha, dan meningkat menjadi 3.57 ton/ha di tahun 2014. Namun Tahun 2015, produktivitas tanaman tomat turun menjadi 3,45 ton/ha, dan kembali meningkat di Tahun 2016 menjadi 4,36 ton/ha. Penurunan luas panen berpengaruh negatif terhadap produksi, dan produktivitas tanaman tomat. Di sisi lain, tanaman bayam dengan tingkat produktivitas yang sangat rendah, untuk Tahun 2015 produktivitasnya hanya sebesar 1,23 ton/ha. Namun Tahun 2016 produktivitasnya meningkat menjadi 1,26 ton/ha.

Kabupaten Banggai Kepulauan juga mengusahakan produksi buah-buahan, secara umum tanaman buah-buahan yang diusahakan yaitu mangga, durian, dukuh/langsat, jeruk, pisang, pepaya, nenas, dan lainnya.

Periode 2013-2015 produksi buah dukuh/langsat dan pisang sangat banyak. Rata-rata produksi tanaman dukuh/langsat periode 2013 – 2015 sebesar 24.816 kwintal per tahun, dan tanaman pisang sebesar 15,427 kwintal. Berdasarkan data produksi buah-buahan Tahun 2013-2015, terdapat beberapa komoditas buah-buahan mengalami peningkatan produksi terus-menerus yaitu tanaman alpukat, pisang, jambu air, dan manggis.

**Tabel 2.38**  
**Perkembangan Produksi Buah-Buahan**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013-2015**

Jenis Tanaman	Produksi (Kuintal)			Jenis Tanaman	Produksi (Kuintal)		
	2013	2014	2015		2013	2014	2015
Alpukat	48	55	73	Nangka/ Cempedak	1.299	1.704	1.581
Belimbing	202	804	779	Nanas	457	256	238
Dukuh/ langsat	13.507	39.676	21.266	Pepaya	5.436	7.189	5.103
Durian	2.329	14.785	14.292	Pisang	14.730	15.771	15.780
Jambu Biji	77	159	159	Rambutan	-	-	1.268
Jambu Air	728	916	1.003	Salak	2	1	0
Jeruk Siam	600	783	300	Sirsak	135	196	123
Jeruk Besar	274	471	0	Melinjo	1	-	0
Mangga	3.959	5.841	3.005	Semangka	64	95	0
Manggis	418	3.133	3.811				

Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2014-2017, data diolah

#### 2.4.3.3 Kehutanan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukkan kawasan hutan di provinsi. Fungsi pokok hutan yaitu hutan lindung, hutang produksi dan hutan konservasi. Hutan semestinya dipertahankan kelestariannya karena sebagai penyangga kehidupan.

Luas hutan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 235.870.00 ha, terdiri dari hutan lindung seluas 26.676.00 ha, suaka alam dan pelestarian alam seluas 89.775.00 ha, yaitu mencakup hutan produksi seluas

39.614.00 ha, terbatas seluas 25.649.00 ha dan tetap dapat dikonservasi seluas 24.512.00 ha. Di lain pihak luas hutan sebagai area penggunaan lain (APL) seluas 119.419.00 ha (50,63 persen).

**Tabel 2.39**  
**Luas Hutan Kabupaten Banggai Kepulauan Menurut Fungsinya**  
**Tahun 2016**

No	Fungsi	Luas (ha)	%
1	Hutan Lindung	26.676.00	11,31
2	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	-	-
	* Hutan Produksi	39.614.00	16,79
	* Terbatas	25.649.00	10,87
	* Tetap Dapat Konservasi	24.512.00	10,39
3	Areal Penggunaan Lain (APL)	119.419.00	50,63
	<b>Jumlah</b>	<b>235.870.00</b>	<b>100</b>

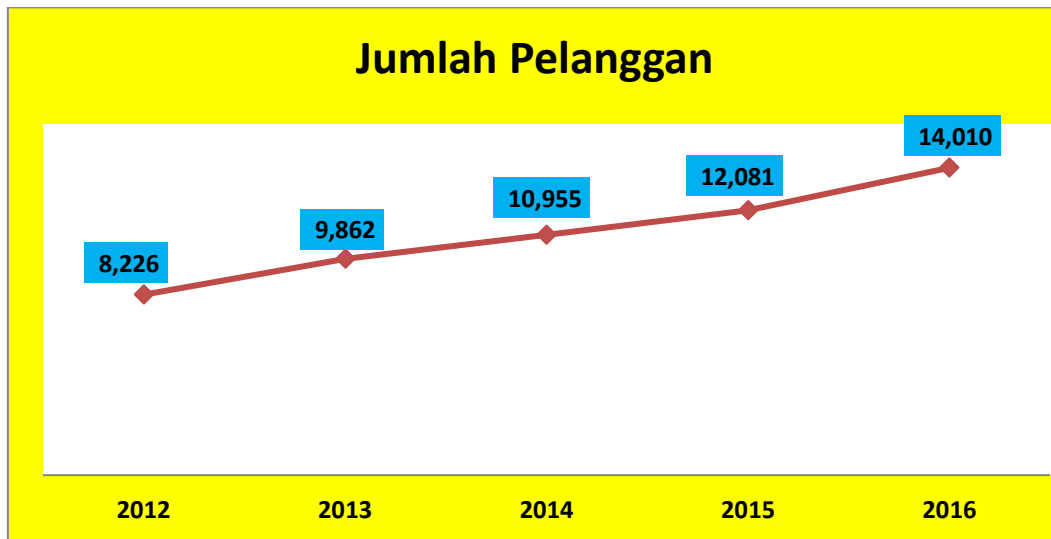
Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka 2017, data diolah

Hutan lindung terluas terdapat di Kecamatan Bulagi Selatan seluas 14.196.00 ha, Di lain pihak hutan produksi terluas di Kecamatan Tinangkung sebesar 9.094.00 ha, dan fungsi hutan sebagai area penggunaan lain (APL) terluas terdapat di Kecamatan Totikum 13.203.00 ha.

#### **2.4.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral**

Salah satu kebutuhan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan listrik sebagai sumber penerangan, listrik tak dapat dipisahkan dari aktivitas rumah tangga dan aktivitas perekonomian lainnya. Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Banggai Kepulauan juga membutuhkan listrik sebagai sumber penerangan. Kebutuhan listrik di Kabupaten Banggai Kepulauan ditopang pembangkit listrik menggunakan mesin diesel, tenaga listrik ini diproduksi oleh cabang ranting PLN Kabupaten Banggai Kepulauan. Belum semua daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menikmati listrik dari PLN, masih saja ada daerah yang menggunakan listrik non PLN dan bukan listrik.

## 1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik



Sumber : BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2017

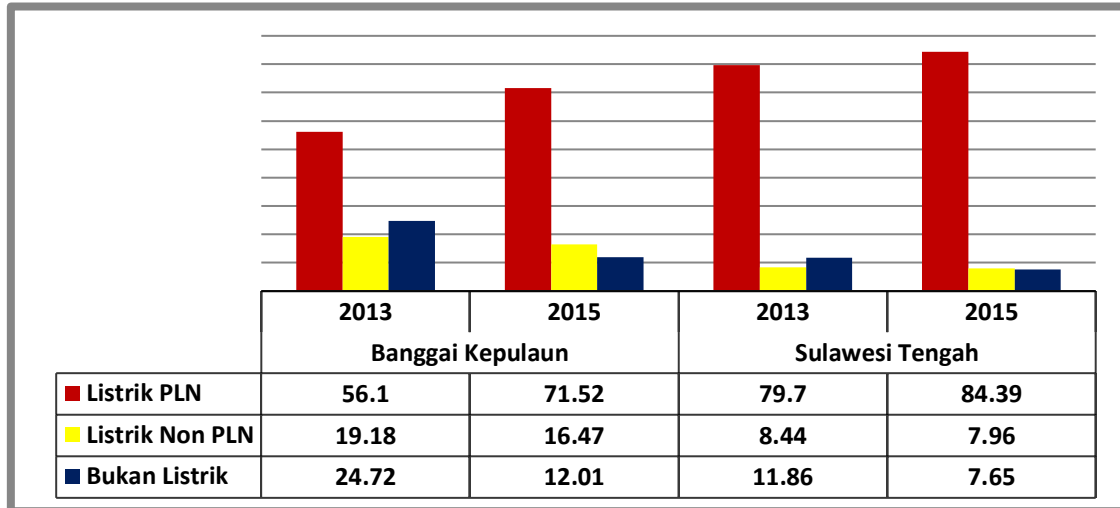
**Gambar 2.65**  
**Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2012-2016**

Jumlah pelanggan PLN periode Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan terus-menerus. Tahun 2012 pelanggan PLN sebanyak 8.226 pelanggan, meningkat menjadi 10.955 pelanggan di Tahun 2014. Tahun 2016 meningkat menjadi 14.010 pelanggan, baik rumah tangga, instansi pemerintah, swasta dan lain-lain. Tenaga listrik yang diproduksi PLN tahun 2016 sebesar 11.531. 200 kwh.

Gambar 2.66 menunjukkan bahwa Tahun 2013 sebesar 56,1 persen rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah menggunakan listrik untuk kebutuhan penerangan, dan Tahun 2015 persentase rumah tangga menggunakan listrik naik menjadi 71,52 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang dapat menikmati listrik, dan ini menjadi kemajuan bagi Kabupaten Banggai Kepulauan.

Tahun 2013, tercatat 19,18 persen rumah tangga Kabupaten Banggai Kepulauan menggunakan listrik non PLN, dan turun menjadi 16,47 persen di Tahun 2015. Angka persentase ini masih lebih tinggi dari persentase rumah tangga Sulawesi Tengah yang menggunakan listrik non PLN (Misalnya: generator). Di sisi lain masih terdapat pula rumah tangga yang sumber penerangannya berasal dari bukan listrik (misalnya: petromak dan

pelita). Tahun 2013 sebesar 24,72 persen rumah tangga menggunakan bukan listrik dan Tahun 2015 turun menjadi 12,02 persen, kondisi ini menunjukkan semakin banyak rumah tangga yang menggunakan PLN dan listrik non PLN sebagai sumber penerangan.



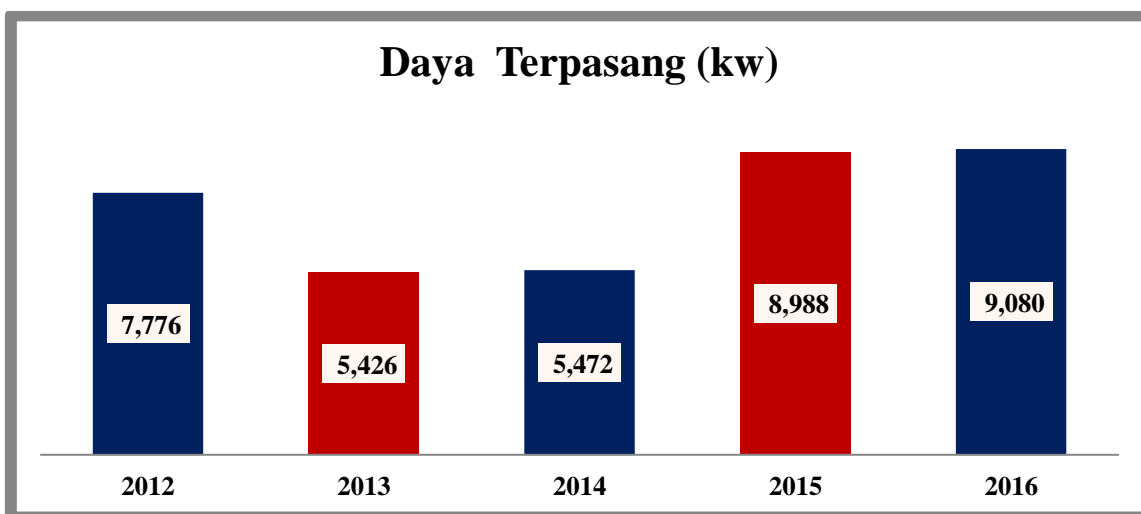
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banggai Kepulauan 2013 dan 2015

**Gambar 2.66**

**Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2015**

## 2. Daya Terpasang

Jumlah daya terpasang Tahun 2012 sebesar 7.776 kw, turun menjadi 5.426 kw di Tahun 2015 (turun 30,22 persen). Namun Tahun 2015-2016 daya terpasang meningkat dari 8.988 kw menjadi 9.080 kw. Persentase peningkatan daya terpasang Tahun 2016 sebesar 1,024 persen.



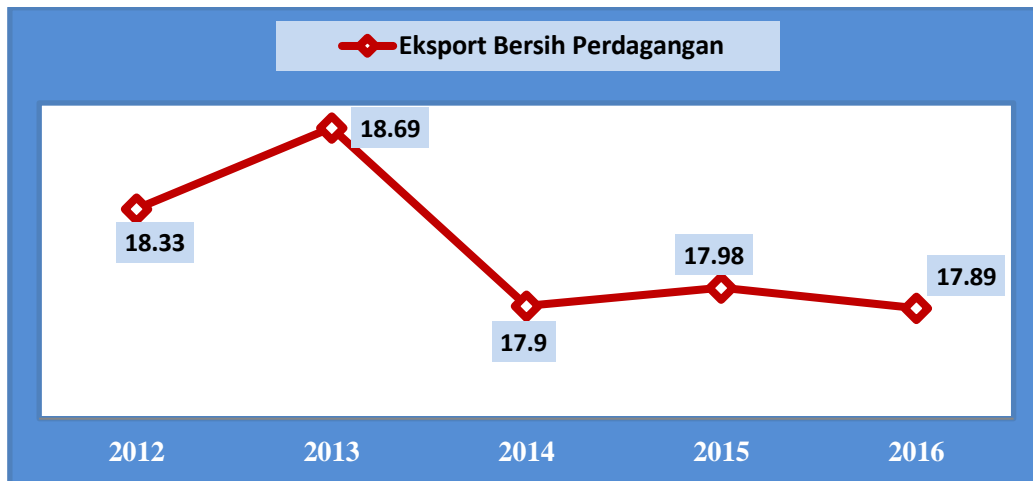
Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2017

**Gambar 2.67**

**Daya Terpasang Tahun 2012-2016**

### 2.4.3.5 Perdagangan

#### 1. Ekspor Bersih Perdagangan



Sumber : EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.68**  
**Ekspor Bersih Perdagangan (%) Kabupaten Banggai Kepulauan**

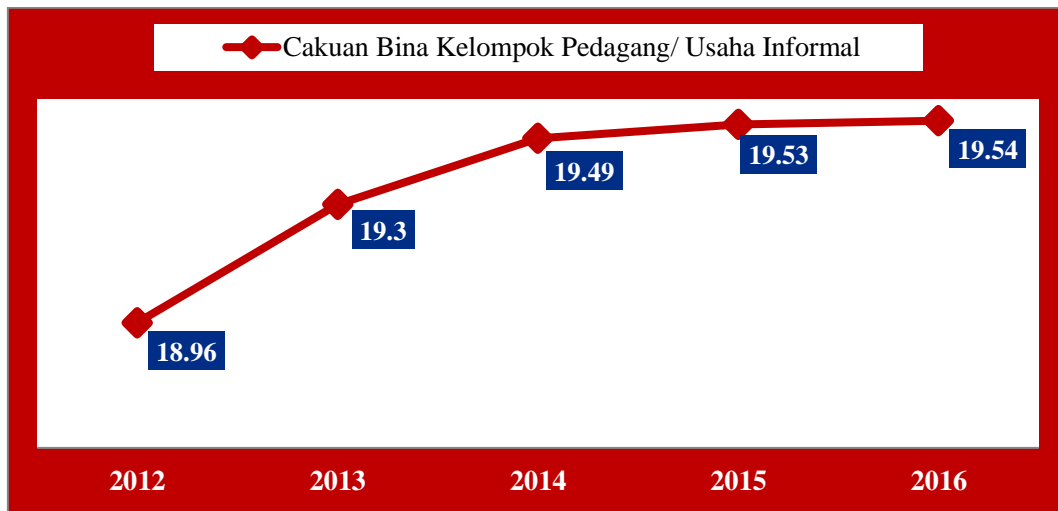
Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan *trend* yang tidak stabil atau berfluktuatif. Pada Tahun 2012, nilai ekspor bersih perdagangan sebesar 18,33 dan Tahun 2013 meningkat menjadi 18,69. Namun Tahun 2014 ekspor bersih perdagangan kembali menurun menjadi 17,90.

#### 2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal merupakan persentase dari jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan pembinaan dari pemerintah daerah (PEMDA). Menurut data EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa persentase cakupan bina kelompok pedagang di daerah ini menunjukkan peningkatan dari Tahun 2012-2016. Pada Tahun 2012 cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 18,96 persen, meningkat menjadi 19,30 persen di Tahun 2013.

Pada Tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan bina kelompok pedagang/usaha informal masing-masing meningkat menjadi 19,53 persen dan 19,54 persen. Pembinaan yang diberikan PEMDA bagi kelompok

pedagang/usaha informal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi kelompok pedagang/ usaha informal.



Sumber : EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.69**  
**Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal**  
**Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2012-2016**

#### 2.4.3.6 Kelautan dan Perikanan

Dijelaskan dalam SDG's bahwa melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan global. Pada Tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.

Menurut sasaran nasional RPJMN 2015-2019 bahwa produksi perikanan tangkap dapat meningkat menjadi 6.982.560 ton pada Tahun 2019 (2015: 6.299.290 ton).

Perikanan dibedakan atas dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya, perikanan tangkap terdiri dari penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Di pihak lain perikanan budidaya

diklasifikasikan atas jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah.

### 1. Produksi Perikanan

Total produksi perikanan tangkap Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014-2016 sebesar 61.067,40ton. Berdasarkan data BPS, bahwa perikanan laut Tahun 2014 sebesar 12.172,40 ton, produksi perikanan laut tertinggi adalah Kecamatan Liang sebesar 4.548,30 ton, selanjutnya disusul Kecamatan Peling Tengah sebesar 1.288,30 ton dan Kecamatan Tinangkung Selatan sebesar 1.021,60 ton.

Produksi perikanan laut Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 menunjukkan peningkatan produksi. Produksi perikanan laut sebesar 35.642,00 ton. Produksi perikanan laut terbanyak berada di Kecamatan Liang yaitu sebesar 7.120,00 ton dan Kecamatan Totikum sebesar 3.345,00 ton.

**Tabel 2.40**  
**Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan**  
**Di Banggai Kepulauan Tahun 2014-2015 (Ton)**

No	Kecamatan	Perikanan Laut			Perairan Umum			Jumlah
		2014	2015	2016**	2014	2015	2016**	
1	Totikum	830.60	3 345.00	-	-	-	-	4 175.60
2	Totikum Selatan	487.40	2 540.00	-	-	-	-	3 027.40
3	Tinangkung	711.80	2 310.00	-	-	-	-	3 021.80
4	Tinangkung Selatan	1 021.60	2 925.00	-	-	-	-	3 946.60
5	Tinangkung Utara	689.60	2 790.00	-	-	-	-	3 479.60
6	Liang	4 548.30	7 120.00	-	-	-	-	11 668.30
7	Peling Tengah	1 288.30	3 100.00	-	-	-	-	4 388.30
8	Bulangi	598.00	2 532.00	-	-	-	-	3 130.00
9	Bulangi Selatan	505.60	2 145.00	-	-	-	-	2 650.60
10	Bulangi Utara	406.30	1 946.00	-	-	-	-	2 352.30
11	Boko	318.70	2 230.00	-	-	-	-	2 548.70
12	Buko Selatan	766.20	2 659.00	-	-	-	-	3 425.20
<b>Jumlah</b>		<b>12 172.40</b>	<b>35 642.00</b>	<b>13 253.00</b>	-	-	-	<b>61 067.40</b>

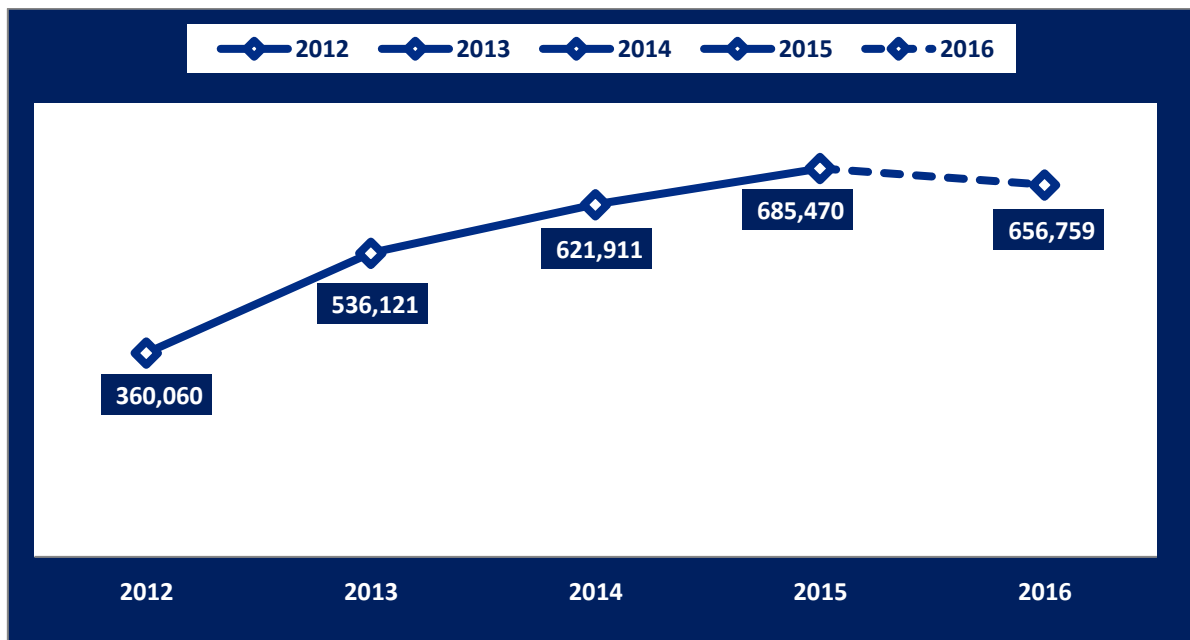
Sumber: BPS, Kabupaten Banggai Dalam Angka Tahun 2015-2017, data diolah

## 2. Produksi Rumput Laut

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen rumput laut *E. cottoni* terbesar ke-3 di Indonesia. Produksi terbesar rumput laut di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Produksi rumput laut Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2012-2015 menunjukkan peningkatan, Tahun 2012 produksi sebesar 360.060 ton, meningkat menjadi 536.121 ton di Tahun 2013, di Tahun 2015 produksi menjadi 685.470 ton, atau meningkat sebesar 10,22 persen dibandingkan produksi Tahun 2014. Namun di Tahun 2016 produksi rumput laut sebesar 656.759 ton, atau turun sebesar 4,19 persen dibandingkan Tahun 2015.

Produksi rumput laut tahun 2012-2016 lebih banyak dibandingkan target produksi rumput laut pada RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan 2011-2016 menargetkan produksi rumput laut Tahun 2011 sebesar 17.000 ton dan Tahun 2016 sebesar 27.000 ton.



Sumber : EKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, data diolah

**Gambar 2.70**  
**Produksi Rumput Laut Kabupaten Banggai Kepulauan**  
**Tahun 2012-2016**

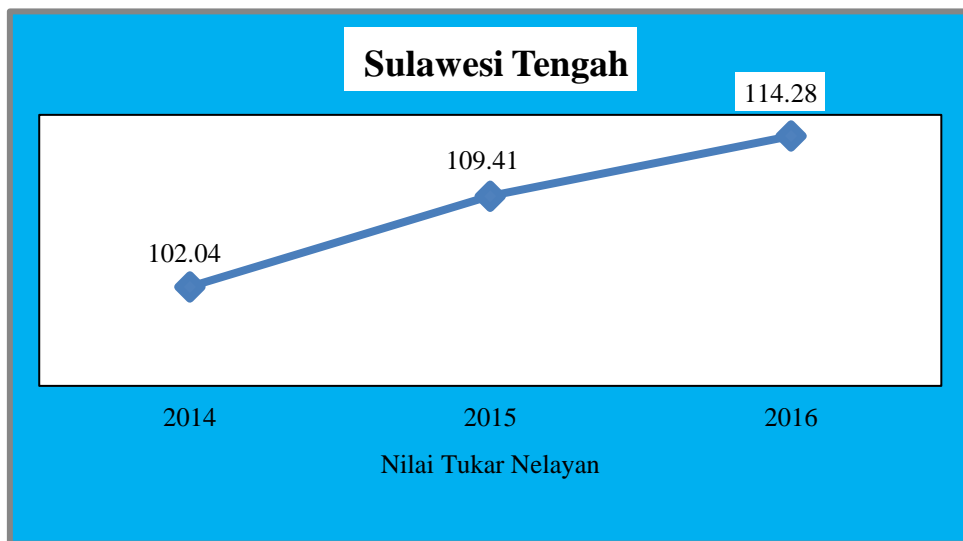
### 3. Nilai Tukar Nelayan

Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya petani dan nelayan yang kurang mampu menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan indikator ini, kita dapat melihat bagaimana perkembangan usaha sektor pertanian dan sektor perikanan khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu. Perkembangan kedua sektor usaha tersebut diharapkan dapat merangsang tingkat produktivitas produk pertanian dan perikanan melalui pendekatan yang lebih mutakhir serta meningkatkan pendapatan terutama masyarakat, terutama masyarakat di wilayah perdesaan.

Nilai Tukar Nelayan atau disingkat NTN dapat dijadikan indikator dari *proxy* kesejahteraan nelayan yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan Indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). It adalah produksi yang dihasilkan oleh nelayan dan Ib adalah segala konsumsi RTP (rumah tangga nelayan), biaya produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Apabila NTN lebih dari 100, maka dapat dikatakan petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya atau pendapatan nelayan naik, lebih besar dari pengeluarannya. Dan apabila NTN sama dengan 100, berarti nelayan mengalami impas, kenaikan atau penurunan harga produksinya sama dengan kenaikan atau penurunan harga barang konsumsi, pendapatan nelayan sama dengan pengeluarannya. Jika NTN kurang dari 100 berarti nelayan mengalami defisit, kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya, pendapatan nelayan turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Nelayan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Sulawesi Tengah selama kurun waktu tiga tahun terakhir rata-rata NTN selalu berada di atas 100 persen, dan ini menunjukkan pertanda kehidupan nelayan beranjak menuju sejahtera. Tahun 2014 rata-rata NTN Sulawesi Tengah sebesar 102,04, mengalami peningkatan di Tahun 2015 menjadi 109,41 dan Tahun 2016 NTN menjadi 114,28.



Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2017

**Gambar 2.71**  
**Rata-Rata Nilai Tukar Nelayan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2014-2016**

**Tabel 2.41**  
**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	2012R	2013R	2014R	2015R	2016 R	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>												
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	8,49	8,51	8,54	8,6	8,67	7,9	7,18	7,02	6,66	6,4	< Target
1.2	PDRB (ADHK)	857.892	930.577	1.010.017	1.096.887	1.191.932	1.792.018	1.920.748	2.055.537	2.192.338	2.332.565	>Target
1.3	PDRB (ADHB)	1.733.726	1.734.752	1.881.728	1.883.955	2.044.780	1.993.248	2.222.446	2.479.327	2.727.662	2.991.611	>Target
1.4	Laju inflasi provinsi	7,2	7,4	7	6,5	6	5.87	7.57	8.85	4.17	1.49	< Target
1.5	PDRB per kapita (Harga Konstan)						10,13	16,99	18,03	19,07	20,11	-
1.6	Indeks gini						0,34	0,3	0,32	0,32	0,362	-
1.7	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	82,82	83,74	84,63	85,5	86,33	82,97	83,70	84,44	83,92	83,82	< Target
Fokus Kesejahteraan Masyarakat												
1	Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf	95,6	96,08	96,56	97,04	97,52	95,07	95,08	96,56	97,04	98,96	> Target
1.2	Angka rata-rata lama sekolah						7,20	7,38	7,39	7,73	7,94	-
1.3	Angka partisipasi kasar											
a	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	103	102,5	102	101,5	101	100.1	107.49	107.49	105.25	110.96	>Target
b	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	95	96	97	97,5	98	97.24	90.73	90.73	99.49	77.26	< Target
1.4	Angka Pendidikan yang ditamatkan											
1.5	Angka Partisipasi Murni											

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	2012R	2013R	2014R	2015R	2016 R	
a	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,5	81,9	82,1	82,8	83,2	87.64	87.14	87.14	90.34	97.38	> Target
b	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	67	67,8	68,1	68,9	70,2	64.3	66.46	66.46	80.54	65.4	< Target
c	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	44,8	45,3	46,7	47,3	48	48.16	52.66	52.66	60.69	54.19	> Target
2	Kesehatan											
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi						992,04	988,58	988,48	970,93	982,36	-
2.2.	Angka usia harapan hidup (* Angka perhitungan lama)	64,33	64,4	64,46	64,49	64,51	62	62	64	64,35	64,44	< Target
4.1	Rasio penduduk yang bekerja						96,58	95,26	97,65	97,78	97,78	-
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>												
1	Kebudayaan											
1.1	Jumlah grup kesenian						12	12	13	14	14	-
2	Pemuda dan Olahraga											
2.1.	Jumlah klub olahraga						112	115	120	124	128	-
2.2.	Jumlah gedung olahraga						-	2	2	2	2	-
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>												
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>												
1	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>											
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (adhk)						486,081	503,443	526,176	666,221	612,979	-
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita						211,247	215,751	193,466	281,499	274,403	-
1.3.	Produktivitas total daerah						21.46	22.82	24.19	36.64	38.99	-
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>												
1	<b>Perhubungan</b>											

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	2012R	2013R	2014R	2015R	2016 R	
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	18,25	18,5	18,5	18,75	18,75	0,28	0,12	0,10	0,57	0,08	< Target
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum						22350	23410	24480	28914	29520	-
	Jumlah orang (jiwa)											-
	Jumlah barang (ton)											-
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun						49995	80810	80940	82475	84145	-
	Dermaga (orang)											-
	Dermaga (Barang)	22	22,5	22,95	23,4	23,65						-
	Terminal (Orang)											-
	Terminal (Barang)											-
<b>2</b>	<b>Penataan Ruang</b>											-
2,1	Ketaatan terhadap RTRW											-
2,2	Luas wilayah produktif										50,59%	-
2,3	Luas wilayah Industri											-
2,4	Luas wilayah banjir								1,1	1,1	1,1	-
2,5	Luas wilayah kekeringan								23,89	23,89	23,89	-
2,6	Luas Wilayah Perkotaan								3	3	3	-
<b>3</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>											
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang											-
3,2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabangnya											-
3.1.	Jumlah restoran dan rumah makan											-
4,2	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel						11	8	8			-
<b>4</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>											
4,1	Persentase RT Pengguna Air Bersih									37%		-

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	2012R	2013R	2014R	2015R	2016 R	
<b>5</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>											
5.1.	Rasio Ketersediaan Listrik						30%	31%	34%	43%	51%	-
5.2.	Jumlah Pelanggan PLN											-
5.3.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	37,00	38,00	39,50	40,00	41,00	37%	38%	39,50%	40%	41%	=
<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>												
<b>1</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>											
1,1	Rasio lulusan S1	0,350	0,355	0,358	0,360	0,365						-
	Rasio lulusan S2	0,0159	0,0160	0,0161	0,01615	0,0162						-
1,2	Rasio ketergantungan (%)	0,640	6,50	6,65	6,75	6,85	0,63	0,55	0,55	0,55	0,55	< Target
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>												
<b>Pelayanan Urusan Wajib</b>												
1	Pendidikan											
1.1	APS Usia 7-12 tahun	88,52	88,62	88,72	88,82	88,92	95,86	95,79	98,19	98,15	100	> target
1.2	APS Usia 13-15 Tahun	94,49	94,99	95,49	95,99	96,49	92,92	89,32	92,53	92,54	97,76	> target
1.3	Rasio Siswa/Sekolah SD	100	100	100	100	100	86,56	92,63	97,18	103,94	116,20	> target
1.4	Rasio Siswa/Sekolah SMP	5	5	5	5	5	5,85	64,32	47,93	258,20	54,01	Tidak sama metode perhitungan
1.5	Rasio terhadap murid											
1	Rasio Siswa/Sekolah SD	20	20	20	20	20	959,94	734,33	915,82	623,45	1054,18	Tidak sama metode perhitungan
2	Rasio Siswa/Sekolah SMP	20	20	20	20	20	406,52	728,14	1175,35	728,95	1256,04	Tidak sama metode perhitungan
1.6	Angka partisipasi											
	APS Usia 16-18 tahun	90,79	91,29	91,79	92,29	92,79	61,04	58,88	62,92	64,09	78,31	Belum tercapai (<)
1.7	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 16-18 tahun sekolah	3	3	3	3	3	42,87	41,39	46,71	51,1	61,44	Tidak sama metode perhitungan

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
		2012P	2013P	2014P	2015P	2016P	2012R	2013R	2014R	2015R	2016 R	
1.8	Rasio posyandu per satuan balita	Tidak Ada data pada Target RPJMD 2011-2016					12	23,01	14,11	13,91	14,44	
1.9	Persentase penolong kelahiran oleh tenaga medis	37,62	37,92	38,42	38,82	39,22	96,43	96,43	100	82,4	82,5	melampaui (>)
1.10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,63	75,73	75,73	75,83	76	71,15	71,93	68,97	74,03	75,51	Belum tercapai (<)
1.11	Angka Pengangguran	4,05	4	3,95	3,9	3,85	3,42	4,74	2,35	2,22	2,23	melampaui (>)
1.12	Persentase koperasi aktif	95	98	101	104	107	71,43	75,58	75,58	75,58	78,13	Tidak sama metode perhitungan
1.13	Persentasi Panjang Jalan Dilalui Roda 4	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,55	0,58	0,58	0,56	0,59	Belum tercapai (<)
1.14	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,585	0,587	0,587	0,59	0,59	0,55	0,58	0,58	0,56	0,59	=
1.15	Persentase Jumlah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	90	91	91	92	92			1.337,50	1.337,50	1.337,50	Tidak sama metode perhitungan
1.16	Persentase penduduk berakses air minum	36,22	37,32	38,42	39,52	40,62	2,93	3,66	4,06	4,88	5,4	Belum tercapai (<)
<b>Pelayanan Urusan Pilihan</b>												
	Kelautan dan Perikanan											
1.	Produksi Perikanan Tangkap	19.944	21.000	24.000	27.000	30.500	66.031	18.575	12.172	35.642	13.253	tahun terakhir < target
2.	Produksi Rumput Laut	17.000	19.000	21.000	24.000	27.500	360.060	536.121	621.911	685.470	656.759	> target